

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 11 No. 02 (2022)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI

Vol 11, No. 02 (2022)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020).

Alamat:

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Kementerian Sosial RI

Jl. Margaguna Raya No. 1, Radio Dalam, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420

e-mail: sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Editorial Team

Pembina

Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Penanggungjawab

Afrizon Tanjung, M.Si., Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Manajer Jurnal

Noor Anggorowati, SIP., MPA., Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

Pimpinan Editor

Dr. Toton Witono, ST., MA., Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Editor Bagian

Nyi R. Irmayani, SH., M.Si. Scopus ID [57956596800](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Habibullah, S.Sos., M.Kesos. Scopus ID: [57732733900](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Drs. Indro Widi Handoko, M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Jazak Akbar Hidayat, SHI., MA., Ph.D. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Mujiastuti, S.Pd., MSW. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Siti Rohmanatin Fitriani, S.Th.I., MA., Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, Papua, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos., MA., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Dr. Sri Widayanti, S.PdI., MA. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Agus Wahyudi, S.ST. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta

Proofreader

Djulia Maryati, S.Sos., M.Kesos. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI, Jakarta

Layout Editor

Ahmad Fahmi Faturohman, SI.Pus. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Rafi Prakas, SE. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI, Jakarta

Sekretariat

Baiq Endang Dwi Handayani, M.Si. Kepala Bagian Tata Usaha
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Riska, SE., M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI, Jakarta

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D., Scopus ID: [35261484600](#), Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Raya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D., Scopus ID: [57210976685](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D., Scopus ID: [7409586829](#), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., Scopus ID: [25823852000](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D., Scopus ID: [56516912500](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Binahayati Rusyidi, Ph.D., Scopus ID: [55778489900](#), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, Scopus ID: [36632972600](#), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos., M.Si. Ph.D., Scopus ID: [57209449684](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D., Scopus ID: [57210163446](#), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudha, S.Sos. M.Pd., Scopus ID: [57201631933](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D. Scopus ID: [57223229321](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Hari Harjanto Setiawan, M.Si. Scopus ID: [57225011816](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Badrun Susantyo, Ph.D. Scopus ID: [57223215291](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Yanuar Farida Wismayanti, SST., MA., PhD. Scopus ID: [57202466692](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Daftar isi

Kompetensi Administrator Pekerjaan Sosial pada Pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten <i>Gina Indah Permata Nastia dan Soni Akhmad Nulhaqim</i>	298 - 310
Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak <i>Fatwa Nurul Hakim</i>	311 - 321
Structural Equation Modeling untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual terhadap Kesehatan Mental Mahasiswi di Kota Surabaya <i>Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, dan Alfisyahrina Hapsery</i>	322 - 337
Board Game: Cara Pembelajaran Yang Menyenangkan Bagi Orang Dewasa <i>Wustari L. Mangundjaya, Seta A.Wicaksana, dan Callista Hapsari Almira Inez Ersya</i>	338 - 348
Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak <i>Antonius Supriyanto dan Lina Miftahul Jannah</i>	349 - 363
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB <i>Yumantoko</i>	364 - 378
Pengaruh Kompetensi Petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Terhadap Kualitas Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin <i>Ruaida Murni dan Hari Harjanto Setiawan</i>	379 - 393

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 11, No. 02, Januari – April 2022 menyoroti tentang lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik dari segi pelaksana maupun organisasi.

Tulisan Gina Indah Permata Nastia dan Soni Akhmad Nulhaqim, melihat pelayanan Kesejahteraan sosial dari sisi administrasi pekerjaan sosial. Merupakan proses menjalankan suatu organisasi yang meliputi tujuan, kebijakan, kepegawaian, administrasi, pelayanan, dan evaluasi. Namun, pengelolaan pekerjaan sosial di organisasi layanan manusia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya untuk mendukung infrastruktur organisasi dan fungsi administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kompetensi administrator pekerjaan sosial yang dimiliki oleh pimpinan. Hasilnya menunjukkan bahwa pimpinan yang memiliki latar belakang pekerjaan sosial akan memahami pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai pekerja sosial. Pimpinan harus menjaga dan meningkatkan kompetensinya sebagai pekerja sosial. Selain itu, jika pemimpin dan/atau administrator organisasi memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi manajerial di bidang pekerjaan sosial akan berdampak pada efektivitas distribusi layanan organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tulisan Fatwa Nurul Hakim menjelaskan eksistensi pendamping sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Subyek penelitian adalah pendamping sosial anak terlantar di LKSA, dianalisis secara deskriptif interpretative tentang peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial menjalankan peran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah tercapai, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan fisik, kebutuhan pelayanan psikologis, kebutuhan pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak terlantar. Karya nyata pendamping sosial juga didorong oleh motivasi yang tinggi untuk menjalankan amal sholeh yang diperintahkan agama. Rekomendasi penelitian, diharapkan Kementerian Sosial selaku yang mengatur regulasi memberikan perhatian terhadap LKSA dengan meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimtek, serta perlu meninjau ulang besaran insentif yang diterima pendamping LKSA dilihat dari cakupan wilayah dampingan dan jumlah KPM yang didampingi serta lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pendampingan supaya dapat memenuhi hak – hak anak

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch. Iqbal Nasurulloh Al-Amin, dan Alfisyahrina Hapsery menulis tentang pelecehan seksual yang merupakan salah satu bentuk tindakan asusila yang melanggar hukum dan juga norma sosial yang terjadi di masyarakat. Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat pelecehan tertinggi memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kasus pelecehan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan instrumen penelitian adalah kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least

Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelecehan yang kerap kali terjadi pada mahasiswi adalah pelecehan verbal secara langsung dengan mayoritas pelaku pelecehan merupakan orang yang telah lama dikenal oleh korban. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan diantaranya adalah bentuk pelecehan seksual, gaya berpakaian korban dan kelainan seksual pelaku. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi kondisi psikologi mahasiswi sehingga menyebabkan kesehatan mental mahasiswi terganggu. Diperlukan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui penyuluhan sosial.

Wustari L. Mangundjaya, Seta A.Wicaksana, Callista Hapsari Almira Inez Ersya, menulis tentang Pengembangan SDM memerlukan adanya perubahan pendekatan sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini setiap individu harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini serta berkompetisi dengan sehat. Pada era revolusi Industri 4.0 kompetensi merupakan hal yang esensial, sehingga setiap individu harus mempelajari kompetensi baru. Meskipun demikian, proses pembelajaran merupakan proses yang kompleks, tidak dapat demikian saja dilakukan. Dalam hal ini, boardgame dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu individu, khususnya orang dewasa dalam mempelajari kompetensi baru maupun meningkatkan keterampilan yang sudah dimilikinya. Studi ini menggunakan 120 partisipan yang terdiri dari 60 partisipan karyawan dan 60 partisipan mahasiswa. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas boardgame sebagai salah satu alat/metode pelatihan bagi orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boardgame adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk orang dewasa mempelajari hal-hal baru dengan menyenangkan, dan memperoleh hasil pembelajaran yang efektif.

Antonius Supriyanto dan Lina Miftahul Jannah menulis tentang percepatan penurunan stunting lintas sektoral terintegrasi di seluruh provinsi hingga desa di seluruh Indonesia. Implementasi kebijakan konvergensi sangat tergantung kemampuan dan kapasitas pemerintah serta kondisi sosial, ekonomi, geografis dan masyarakatnya. Pemerintah kabupaten lebak berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 12,9% selama 3 tahun upaya konvergensi. Penelitian ini berusaha mengetahui tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi penurunan stunting kabupaten lebak tahun 2022 untuk mengetahui keberhasilan program penurunan stunting itu terjadi karena integrasi kebijakan yang telah dibangun pemerintah kabupaten secara tepat ataukah keberhasilan kerjasama dan koordinasi peran dominan instansi tertentu dengan keberhasilan unsur pendukung lainnya. Pengukuran tingkat integrasi menggunakan pendekatan Candel dan Biesbroek (2016) melalui analisis 4 variabel dimensi integrasi kebijakan yaitu Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals dan Policy Instrument. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan kuisioner tertulis informan dari 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak. Hasil penelitian adalah keberhasilan program penurunan stunting belum didukung dengan tingkat integrasi kebijakan yang tinggi. Upaya konvergensi penurunan stunting belum memenuhi kriteria disebut tingkat integrasi tinggi. Diperlukan penguatan di beberapa instrument kebijakan untuk merealisasikan integrasi kebijakan yang tinggi.

Yumantoko menulis tentang program pemberdayaan masyarakat skema perhutanan sosial (PS) sudah lama berjalan. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mengancam sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. Namun program tersebut berjalan lambat dari target 12,7 juta hektar (dari 2014 hingga 2024), pada 2021 baru tercapai 4,5 juta hektar. Hal ini tidak lepas dari program itu sendiri kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses PS dengan melihat dari kacamata pemberdayaan itu sendiri. Studi membahas dari sisi informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan lembaga lokal. Penelitian ini mengambil kasus PS di kawasan Sesaot, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai informan penting secara purposive. Hasilnya menunjukkan bahwa fasilitator dan petani masih kurang memahami informasi PS. Partisipasi masyarakat belum terlihat karena campur tangan fasilitator masih besar. Akuntabilitas dalam program pemberdayaan dilakukan dengan melaporkan hasil kegiatan untuk pihak-pihak tertentu. Kapasitas

organisasi lokal perlu ditingkatkan agar petani menjadi berdaya. Terjadi penambahan aset dan kemampuan individu dalam mengembangkan usaha kehutanan, namun tidak semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama.

Ruaida Murni dan Hari Harjanto Setiawan menulis tentang pengaruh Kompetensi petugas pada Sistem Layanan Terpadu (SLRT) terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin. SLRT merupakan salah satu solusi untuk menyatukan layanan pemerintah bagi keluarga miskin. Hal ini membutuhkan Kompetensi petugas yang mampu memberikan pelayanan kepada penerima manfaat secara maksimal. Metode yang digunakan adalah kuantitatif didukung data kualitatif. Responden terdiri dari petugas dan penerima manfaat. Lokasi penelitian adalah SLRT di Indonesia dengan cara stratifiet random sampling. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan; a) seberapa pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kualitas layanan; b) seberapa besar pengaruh ketrampilan terhadap kualitas layanan dan seberapa besar pengaruh konsep diri terhadap kualitas layanan. Penelitian ini akan bermanfaat secara praktis untuk mengembangkan kapasitas SLRT dan untuk pengembangan keilmuan Kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, kapasitas petugas sangat signifikan berpengaruh terhadap pelayanan bagi masyarakat miskin. Petugas memahami secara keseluruhan yang terkait dengan pelayanan, memahami Pedoman Umum, program Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Memiliki keterampilan yang mampu membantu menyelesaikan masalah dan menindak lanjuti keluhan penerima manfaat. Memiliki sikap tidak pilih kasih terhadap penerima manfaat, selalu siap membantu menyelesaikan keluhan, bersikap sopan, ramah dan dapat memberi penjelasan dengan baik. Penelitian ini berkontribusi dalam praktek Pekerjaan sosial khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2022
Redaksi

Kompetensi Administrator Pekerjaan Sosial pada Pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten

Gina Indah Permata Nastia ^{1*}  Soni Akhmad Nulhaqim ¹ 

¹ Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jln. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135

* Korespondensi: gina19007@mail.unpad.ac.id; Tel: +62-8772-288-4000

Diterima: 16 November 2020; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Administrasi pekerjaan sosial adalah proses menjalankan suatu organisasi yang meliputi tujuan, kebijakan, kepegawaian, administrasi, pelayanan, dan evaluasi. Namun, pengelolaan pekerjaan sosial di organisasi layanan manusia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya untuk mendukung infrastruktur organisasi dan fungsi administrasi. Salah satunya adalah banyak organisasi layanan manusia dikelola oleh administrator yang tidak memiliki keterampilan manajemen di bidang pekerjaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi pekerja sosial di Yayasan Belajar Istana Anak Banten (ISBANBAN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kompetensi administrator pekerjaan sosial yang dimiliki oleh pimpinan Yayasan ISBANBAN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa Direktur Yayasan ISBANBAN memiliki latar belakang pekerjaan sosial dan memahami pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai pekerja sosial. Dalam hal ini, pimpinan Yayasan ISBANBAN harus menjaga dan meningkatkan kompetensinya sebagai pekerja sosial. Selain itu, jika pemimpin dan/atau administrator organisasi memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi manajerial di bidang pekerjaan sosial akan berdampak pada efektivitas distribusi layanan organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kata kunci: kompetensi, administrator, pekerja sosial, pemimpin, yayasan

Abstract: Social work administration is the process of running an organization which includes objectives, policies, staffing, administration, services, and evaluation. However, the management of social work in human service organizations faces various challenges related to the lack of resources to support the organization's infrastructure and administrative functions. One is that many human service organizations are managed by administrators who do not have management skills. Field of social work. This study aims to describe the competence of social workers owned by the management of the Banten Children's Palace Learning Foundation (ISBANBAN). The research method used in this study is a qualitative descriptive method. This method is used to describe the competence of social work administrators possessed by the leadership of the ISBANBAN Foundation. The data collection techniques used in this study were interviews and survei documents. The results show that the Director of isbanban foundation has a social work background and understands knowledge, attitudes, and behaviors as a social worker. In this regard, the leadership of isbanban foundation must maintain and improve his competence as a social worker. In addition, if the leader and / or administrator of the organization has an educational background, experience and managerial competence in the field of social work will have an impact on the effectiveness of the distribution of services of the organization and in accordance with the goals to be achieved.

Keywords: competence, administrator, social work, leader, foundation

1. Pendahuluan

Sejak awal, pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki berbagai tugas dengan tujuan mereka untuk membantu dan memberikan dukungan pada orang lain (Gibson, 2017). Di Indonesia, praktik pekerjaan sosial adalah upaya profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan terawasi untuk mencegah disfungsi sosial dan memulihkan serta meningkatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pekerja sosial, di sisi lain, adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam praktik pekerjaan sosial dan telah memperoleh sertifikat kompetensi. Hal ini berdasarkan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Praktik pekerjaan sosial, selain dilakukan dengan individu, keluarga, dan kelompok kecil, juga dilakukan dalam ruang lingkup organisasi, seperti sekolah, klub di sekolah, bisnis, dan organisasi layanan manusia (Zastrow, 2017).

Praktik pekerjaan sosial saat ini telah mengalami reformasi (Gibson, 2017). Para pekerja sosial yang biasanya melaksanakan praktik pekerjaan sosial secara tradisional, di mana mereka memperoleh banyak beban kerja dalam menangani klien, kini diharuskan untuk bergerak dalam administrasi sosial kontemporer (Page, 2010). Dalam hal ini, pekerja sosial tidak perlu lagi mengembangkan hubungan terapeutik dan melaksanakan praktik langsung dengan klien, namun mereka diharuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada dokumen, mengelola para profesional lain, atau menghadiri pertemuan (Gibson, 2017). Sementara itu, fungsi tradisional pekerja sosial dapat dilakukan oleh profesional lain, misalnya dalam sistem perlindungan anak, bantuan praktis berupa dukungan pengasuhan dapat diberikan oleh pekerja dukungan keluarga, bantuan emosional dan terapeutik dapat dilakukan oleh konselor, dan fasilitasi kerja kelompok dapat dilakukan oleh pekerja komunitas (Ferguson, 2014; Forrester, 2016; Gibson, 2017).

Inggris merupakan contoh negara yang melaksanakan reformasi signifikan dalam sistem perlindungan anak (Munro, 2011). Reformasi tersebut mendorong efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam pendistribusian pelayanan, meskipun membutuhkan beberapa skala waktu dan sejumlah dokumen yang perlu dikerjakan oleh pekerja sosial (Parton, 2014). Adapun reformasi tersebut terjadi karena adanya sejumlah kasus yang tidak teralokasikan dalam laporan inspeksi para pekerja sosial, yang menyebabkan penilaian negatif terhadap layanan (Ofsted, 2012).

Administrasi pekerjaan sosial merupakan komponen penting bagi sebuah lembaga pelayanan sosial dalam memberikan pelayanan. Administrasi merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang mencakup upaya untuk mengarahkan keseluruhan program organisasi layanan manusia. Administrasi memiliki beberapa fungsi bagi sebuah organisasi layanan manusia. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah menetapkan tujuan program organisasi; menganalisis kondisi sosial di masyarakat; membuat keputusan mengenai layanan yang perlu diberikan; mempekerjakan dan melindungi anggota staf; menyiapkan struktur organisasi; mengelola urusan keuangan; serta mengamankan dana untuk operasi organisasi. (Zastrow, 2017). Dengan kata lain, administrasi pekerjaan sosial merupakan proses menjalankan lembaga yang melibatkan tujuan, kebijakan, staf, manajemen, layanan, dan evaluasi. Administrasi pekerjaan sosial membantu mentransformasi kebijakan sosial menjadi pelayanan sosial yang konkrit (Kidneight, 1950). Metode pekerjaan sosial ini mengimplementasikan program yang dikhususkan untuk populasi yang rentan dan kurang beruntung, seperti wanita, anak-anak dengan disabilitas, orang-orang dengan sakit kronis, lanjut usia, dan sebagainya (Kumar, 2017). Selain itu, metode ini juga mengelola program yang ditujukan untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan, serta bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan program organisasi layanan manusia, dengan mengelola sumber daya yang tersedia, membuka banyak pilihan untuk klien agar mereka dapat menyesuaikan diri dan melakukan pemulihan dari masalah yang mereka hadapi, serta meningkatkan kondisi psikososial dan fungsi ekonomi klien atau penerima manfaat (Kumar, 2017).

Organisasi layanan manusia memiliki visi dan misi yang didasarkan pada prinsip humanistik, dan apa yang mereka kerjakan merupakan pekerjaan moral (Hasenfeld, 2010 dalam Pak, Cheung, Tsui, 2016). Dalam sebuah organisasi layanan manusia, proses administrasi biasanya dikontrol dan dilakukan oleh seorang atau lebih orang di atasnya yang memfasilitasi kerja lembaga dan staf. Orang yang mengontrol dan melaksanakan proses administrasi ini disebut sebagai administrator. Efektivitas

organisasi layanan manusia, dalam hal ini, bergantung pada keberhasilan individu dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin atau administrator.

Organisasi layanan manusia saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Salah satu tantangannya adalah bahwa model pemberian layanan sosial saat ini berubah, mengharuskan organisasi layanan manusia untuk berinovasi secara kompetitif dan menunjukkan dampaknya dengan mengukur hasil (Mosley & Smith, 2018). Sementara adanya tuntutan untuk berinovasi secara kompetitif, organisasi layanan manusia dihadapkan dengan permasalahan mengenai langkanya sumber daya yang mendukung infrastruktur dan fungsi administratif organisasi, yakni salah satunya adalah adanya kondisi berkurangnya peran pekerja sosial sebagai administrator dalam organisasi layanan manusia (Bugg-Levine & Ali, 2016). Hal ini disebabkan oleh mendominasinya para profesional di luar bidang kesejahteraan sosial dalam menggantikan posisi pekerja sosial sebagai administrator organisasi layanan manusia, seperti para profesional di bidang bisnis, administrasi publik, ekonomi, pengacara, dan sebagainya (Perlmutter, 2006). Padahal, organisasi layanan sosial seharusnya dikelola oleh para pekerja sosial (Wilson & Lau, 2011). Isu ini menimbulkan berbagai konsekuensi.

Penelitian terbaru menemukan bahwa pemimpin dengan latar belakang bisnis atau manajemen cenderung menjalankan organisasi layanan manusia seperti organisasi yang berorientasi pada keuntungan (Robichau & Wang, 2018). Selain itu, para pekerja sosial dalam organisasi layanan manusia dibawah oleh mereka dengan latar belakang pendidikan di luar pekerjaan sosial, dan banyak organisasi layanan manusia yang dikelola oleh administrator-administrator yang tidak memiliki pengalaman dan keterampilan di bidang pekerjaan sosial (Miller, 1986 dalam Wuenschel, 2006). Mereka menjalankan perannya dalam manajemen organisasi layanan manusia dengan usaha untuk menghasilkan efisiensi biaya dan memberikan pelayanan yang rasional, namun sedikit pemahaman mengenai praktik pekerjaan sosial (Karger, 1986). Padahal, manajemen dalam organisasi layanan manusia memerlukan keterampilan yang berbeda dari manajemen jenis organisasi lainnya (Gummer, 1987; Hasenfeld, 2000; Patti, 2000). Sebagai tambahan, konsekuensi lainnya adalah berkurangnya nilai-nilai pekerjaan sosial yang diartikulasikan dalam budaya organisasi yang berkaitan dengan penyediaan layanan, pembuatan kebijakan, dan advokasi. Meskipun para profesional lainnya pun memiliki dasar etika, namun aspek unik dari profesi pekerjaan sosial adalah ketaatannya pada seperangkat nilai etika dan prinsip-prinsip yang berupaya meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi (Bliss, Pecukonis, & Snyder-Vogel, 2014). Isu-isu ini membutuhkan perhatian lebih dari para pekerja sosial profesional untuk meningkatkan kepemimpinan yang berasal dari bidang kesejahteraan sosial (Wuenschel, 2006).

Selain disebabkan oleh mendominasinya para profesional di luar bidang kesejahteraan sosial, berkurangnya peran pekerja sosial sebagai administrator organisasi layanan manusia adalah kurangnya kompetensi para pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial level makro (Bliss, Pecukonis, & Snyder-Vogel, 2014). Bahkan, organisasi layanan manusia mengalami kesulitan dalam menemukan pemimpin dan administrator pekerjaan sosial (Nesoff, 2007; Patti, 2000, 2003) karena adanya penurunan minat terhadap administrasi pekerjaan sosial di antara para mahasiswa dan sekolah pekerjaan sosial dalam konsentrasi administrasi (Ezell, Chernesky, & Healy, 2004). Dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator pekerjaan sosial, pekerja sosial lebih berkomitmen terhadap nilai-nilai birokrasi, seperti stabilisasi dan pemeliharaan sistem, efisiensi, dan garis bawah, dibandingkan dengan nilai-nilai berorientasi klien, pemberdayaan, perubahan sosial, dan advokasi (Perlmutter, 2006). Beberapa pekerja sosial juga merasa bahwa mereka harus memiliki posisi kepemimpinan, terlepas dari kompetensinya (Perlmutter, 2006).

Permasalahan lainnya adalah meskipun berbagai sekolah pekerjaan sosial telah melibatkan administrasi pekerjaan sosial sebagai bagian dari fokus dan tujuan pembelajarannya, fokus utama dari sekolah-sekolah tersebut cenderung memberikan edukasi mengenai praktik secara langsung (Austin, 1997), dan sekolah tidak memiliki kurikulum yang memadai mengenai fungsi penting administrator dalam pekerjaan sosial (Lohmann & Lohmann, 2002). Hal ini membuat sekolah pekerjaan sosial

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pendidikan administrasi pekerjaan sosial dengan pertumbuhan industri pelayanan sosial yang pesat pada abad ke-20 (Patti, 1984).

Dukungan administratif yang terbatas memiliki konsekuensi yang serius bagi cara kerja internal organisasi layanan manusia, seperti cara orang-orang di dalamnya berkolaborasi, berkomunikasi, dan menjalankan praktiknya (Hager, Pollak, Wing, & Rooney, 2004; Woltmann et al., 2008 dalam Choy-Brown, Stanhope, Wackstein, & Cole, 2020). Dukungan administratif yang terbatas ini dapat melemahkan kapasitas organisasi layanan manusia untuk meningkatkan misi mereka. Oleh karena itu, sejumlah penelitian mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat memperbaiki dan meningkatkan iklim organisasi layanan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai (Aarons & Sommerfeld, 2012). Pemimpin transformasional ini menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dengan memberikan energi pada staf, memodelkan perilaku etis, mendorong pemecahan masalah dan inovasi, dan mengembangkan staf untuk menemukan potensi mereka. Kepemimpinan transformasional ini memiliki hubungan yang positif terhadap keberfungsian tim dalam organisasi (Corrigan, Diwan, Campion, & Rashid, 2002). Adapun penelitian dari Goldkind & Pardasani (2013) menyebutkan bahwa orang-orang dengan latar belakang pendidikan pekerjaan sosial memiliki gaya kepemimpinan transformatif yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan non-sosial.

Pak, Cheung, & Tsui (2016) menyebutkan bahwa dalam pekerjaan sosial, nilai-nilai inti dari pelayanan sosial salah satunya meliputi kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh administrator pekerjaan sosial ini merupakan aspek penting bagi kemajuan dan keberhasilan sebuah lembaga pelayanan sosial dalam pencapaian tujuan lembaga. Menurut Skidmore (1995), kompetensi yang harus dimiliki oleh administrator pekerjaan sosial, di antaranya meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kualitas dan kompetensi administrator pekerjaan sosial juga dilihat dari wawasan yang dimiliki oleh administrator; keberanian administrator untuk membuat pendekatan-pendekatan baru dalam menjalankan organisasi; kesadaran administrator terhadap nilai-nilai, kualitas, dan inteligensi orang lain; kemampuan administrator untuk melibatkan, mendukung, mengembangkan, dan belajar dari orang lain; kebijaksanaan administrator dalam memilih tindakan; semangat administrator untuk memberikan yang terbaik dan menuntutnya dari orang lain; ketahanan administrator untuk tetap fokus pada hasil; serta kedisiplinan administrator dalam menjalankan tugas dan belajar (Zwanenberg & Consulting, 2010).

Yayasan Belajar Istana Anak Banten adalah sebuah yayasan sosial yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Yayasan ini didirikan pada 10 Februari 2013 oleh para eksekutif muda bergelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Padjadjaran, dengan jumlah relawan awal sebanyak 15 orang. Tujuan yayasan ini adalah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Banten mendapatkan pendidikan yang terbaik. Program pertama Yayasan Isbanban adalah Learning Week dan Taman Bacaan. Learning Week adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh para relawan setiap hari Minggu untuk anak-anak di desa binaan. Taman Baca adalah program yang menghimpun donasi buku dari masyarakat dan mendirikan taman baca (Istana Belajar Anak Banten, 2017).

Pada tahun 2014, Yayasan ISBANBAN memberikan pelatihan pertama bagi relawan dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Banten yang disebut Banten Youthcation 2014. Pelatihan ini diikuti oleh 40 relawan muda dari Kota Serang, Provinsi Serang, Provinsi Tangerang, Lebak, Cilegon dan Pandeglang. Dalam pelatihan tersebut, kami melakukan pelatihan pembuatan taman baca dengan konsep "komunal" dan "hidup bersama" selama dua hari satu malam. Sejak pelatihan, Yayasan ISBANBAN telah mendirikan 6 cabang baru di Kota Serang, Provinsi Serang, Provinsi Tangerang, Lebak, Cilegon dan Pandeglang (Istana Belajar Anak Banten, 2017).

Pada tahun 2015, Yayasan ISBANBAN mendirikan unit bisnis/*social enterprise* pertama bernama CARE INSTITUTE, serta membentuk chapter baru di Kota Tangerang Selatan. Kemudian pada tahun 2016, ISBANBAN resmi berubah status dari komunitas menjadi Yayasan Istana Belajar Anak Banten, yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No, AHU - 0008514.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Istana Belajar

Gina Indah Permata Nastia dan Soni Akhmad Nulhaqim

Kompetensi Administrator Pekerjaan Sosial pada Pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten

Anak Banten. Pada tahun ini juga, Yayasan ISBANBAN membentuk program ke-3, yakni program ISBANBAN Dreams Scholarship. Program ini merupakan program pemberian beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki potensi untuk dikembangkan (Istana Belajar Anak Banten, 2017). Pada tahun 2018, Yayasan ISBANBAN resmi bekerjasama dan menjadikan Yayasan Ikhlas Paguyuban sebagai donatur utama Yayasan ISBANBAN pada tahun 2018. Yayasan ISBANBAN juga telah secara resmi mengangkat 14 karyawan yang aktif di bawah arahan Yayasan ISBANBAN. Keuangan, Direktur Program, Pemasaran, Humas, IT, Sumber Daya Manusia (Istana Belajar Anak Banten, 2017).

Seperti disebutkan di atas, Yayasan ISBANBAN adalah organisasi layanan manusia yang didirikan dan dijalankan oleh seorang pekerja sosial dengan gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang kompetensi pekerja sosial di Yayasan ISBANBAN. Dalam artikel ini, pemimpin yang bergelar sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial ini adalah pendiri Yayasan ISBANBAN. Mendeskripsikan kemampuan seorang manajer kerja. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu "Bagaimana kompetensi pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten sebagai administrator pekerjaan sosial?".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan penelitian dokumen. Selain itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari empat informan, termasuk salah seorang direktur Yayasan ISBANBAN. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari peneliti, yaitu melalui website Yayasan ISBANBAN. Survei dilakukan di Yayasan Belajar Rumah Anak Banten (ISBANBAN) dan dilakukan selama dua bulan mulai September hingga akhir Oktober 2020.

Selain itu, setelah data yang diperlukan terkumpul melalui proses pengumpulan data, dilakukan analisis data dengan menganalisis data yang terkumpul berupa wawancara terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh Yayasan ISBANBAN. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model tematik. Model analitik ini merupakan metode analisis data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema dalam data yang dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006). Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini: reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil

3.1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu aspek penting bagi operasi sebuah lembaga pekerjaan sosial yang efektif. Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang administrator pekerja sosial antara lain meliputi pengetahuan administrator mengenai tujuan, kebijakan, layanan, serta sumber daya organisasi. Selain itu, administrator pekerja sosial juga perlu memiliki pengetahuan dasar tentang dinamika tingkah laku manusia serta sumber daya masyarakat, terutama yang berhubungan dengan lembaganya (Skidmore, 1995). Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki pengetahuan mengenai tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, serta sumber daya dari yayasan. Ia menyebutkan bahwa tujuan-tujuan Yayasan ISBANBAN antara lain meningkatkan wawasan dan keterampilan anak-anak di daerah pedesaan Banten, meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, dan memberdayakan anak muda Banten untuk berkontribusi di bidang pendidikan melalui kerelawanan.

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang berlaku di Yayasan ISBANBAN antara lain adalah (1) setiap relawan melakukan masa pengabdian selama satu tahun; (2) relawan harus mengikuti sejumlah pelatihan dan persiapan untuk turun ke lapangan pada setiap bentuk program pengabdian di desa

binaan; serta (3) setiap pengurus wajib mengikuti prosedur kebijakan manajemen organisasi, seperti perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Menurut pemimpin yayasan, kebijakan-kebijakan ini dapat mengukur dampak, mengevaluasi setiap hal yang perlu ditingkatkan, serta meningkatkan performa sumber daya manusia di Yayasan.

Selain kebijakan, pemimpin pun memiliki pengetahuan mengenai pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Yayasan ISBANBAN. Pelayanan-pelayanan tersebut antara lain adalah mendirikan Taman Baca dan Pengajaran untuk anak-anak yang berada di tujuh kabupaten/kota di Banten; memberikan beasiswa dukungan sekolah SMP, SMA, dan kuliah kepada 46 adik binaan di Banten; serta memberdayakan anak muda Banten untuk menjadi pemimpin lokal peduli pendidikan melalui akademi kepemimpinan.

Adapun sumber daya Yayasan ISBANBAN yang diketahui oleh pemimpin yayasan, yaitu terdiri dari pengurus dan relawan. Pengurus dalam hal ini berperan untuk mengelola kegiatan organisasi harian, sementara relawan berperan untuk menjalankan program yayasan di lapangan/desa binaan. Sumber daya ini ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui salah satu departemen yang dimiliki oleh Yayasan ISBANBAN, yakni Departemen *Human Resource and Volunteer Development*. Program yang mereka lakukan diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan pengembangan diri melalui *Online Skill Class*; peningkatan kapasitas keterampilan pengajaran melalui *Volunteer Upgrading*; serta peningkatan kapasitas kepemimpinan melalui *Isbanban Leadership Academy*.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya masyarakat, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki pengetahuan bahwa sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat adalah kelompok organisasi kepemudaan desa (Karang Taruna), Komite Sekolah, Dewan Kemakmuran Masjid, Tokoh Masyarakat, serta Pemangku kepentingan desa, seperti Kepala Desa, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Adapun hubungan mereka terhadap Yayasan ISBANBAN selama ini, yaitu yayasan berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi bersama pihak desa melalui Kepala Desa, sehingga adanya peran dan partisipasi masyarakat di desa binaan.

Berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang dinamika tingkah laku manusia, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki pengetahuan bahwa dalam *Human Behaviour and Social Environment* (HBSE), perilaku manusia terbentuk dari berbagai dimensi diantaranya individual (manusia itu sendiri, seperti usia, *gender*, *health*, dan sebagainya), mikrosistem (keluarga, sekolah, teman sebaya, dan sebagainya), mesosistem (gabungan dua atau lebih mikrosistem, seperti keluarga dan sekolah), ekosistem (industri, media massa, pelayanan sosial, politik lokal, dan sebagainya), serta makrosistem (perilaku dan ideologi budaya).

Pemimpin juga memiliki pengetahuan mengenai metode intervensi pekerjaan sosial. Dalam pelaksanaan programnya, metode intervensi pekerjaan sosial yang digunakan oleh pemimpin dalam memberikan pelayanan adalah metode *Community Organization & Community Development*. Menurut pengetahuannya, metode ini mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap proses dan peningkatan pendidikan anak-anak di suatu daerah (desa binaan Yayasan ISBANBAN).

Selain mengenai metode intervensi pekerjaan sosial, pemimpin Yayasan ISBANBAN juga memiliki pengetahuan mengenai proses manajemen bisnis. Dalam manajemen bisnis, terdapat 5 proses fundamental, yakni *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling*. Kelima proses tersebut diimplementasikan oleh pemimpin dalam menjalankan operasi yayasan. Dalam proses *planning*, Yayasan ISBANBAN membuat rapat tahunan (di setiap bulan Desember) untuk merencanakan program 1 tahun ke depan, serta rapat per kuartal dan semester untuk melihat pencapaian yayasan.

Dalam menjalankan perannya, administrator organisasi layanan manusia perlu menekankan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi (Hasenfeld, 2015). Dalam proses *organizing*, Yayasan ISBANBAN menerapkan nilai RESPECT (*Respect*, *Empathy*, *Special*, *Engage*, *Collaboration*, dan *Trust*). kepada seluruh relawan untuk mencapai terjadinya keselarasan dan keharmonisan kerelawanan di internal organisasi. Mereka membentuk kepengurusan di daerah guna memudahkan mereka dalam hal koordinasi dan pengorganisasian. Dalam proses *staffing*, Yayasan ISBANBAN setiap tahun membuat program *Isbanban Leadership Academy* yang dimaksudkan untuk mencari talenta terbaik relawan internal Yayasan ISBANBAN untuk disiapkan sebagai pengurus Yayasan ISBANBAN di masa yang akan

Gina Indah Permata Nastia dan Soni Akhmad Nulhaqim

Kompetensi Administrator Pekerjaan Sosial pada Pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten

datang. Para peserta *academy* disaring melalui seleksi yang cukup ketat, seperti seleksi administrasi dan wawancara. Hal ini dilakukan guna menemukan orang yang tepat dalam setiap penempatan posisi strategis di Yayasan ISBANBAN. Dalam proses *directing*, Yayasan ISBANBAN membuat pertemuan awal di masa kepengurusan dan kerelawanan baru, yakni di awal tahun. Hal ini dilakukan guna menciptakan pemahaman bersama tentang apa saja yang akan dilakukan pada program pengabdian di desa binaan dan bagaimana teknis dan prosedur yang dijalankan di Yayasan ISBANBAN.

Selanjutnya, dalam proses *controlling*, Yayasan ISBANBAN memiliki kepengurusan di tujuh daerah, dimana masing-masing setiap 1 kuartal (3 bulan sekali), yayasan mengadakan kunjungan dan juga mengevaluasi berbagai program di lapangan. Hal ini mereka lakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di manajemen Yayasan ISBANBAN. Adapun pengetahuan pemimpin Yayasan ISBANBAN mengenai cara sebuah organisasi berjalan, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik secara struktural maupun fungsional. Menurut pengetahuannya, agar sebuah organisasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, organisasi tersebut harus melibatkan dua hal, yakni yang pertama adalah partisipasi dan peran masyarakat untuk duduk bersama melakukan analisis dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat (*need assessment*). Kemudian, hal yang perlu dilibatkan selanjutnya adalah pelaksanaan di masyarakat yang mengutamakan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan proses evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan ISBANBAN, evaluasi oleh yayasan dilakukan setiap semester dan tahunan. Mereka mengevaluasi pada 4 hal, yakni di antaranya mengenai program, *human resources* (sumber daya manusia), dan *funding* (pendanaan). Dalam mengevaluasi program, yayasan melakukan evaluasi mengenai kesesuaian program dengan harapan dan capaian yang diinginkan, serta kesesuaian pelayanan yang oleh yayasan dengan prosedur yang ada. Apakah prosedur pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ada. Berkaitan dengan *human resources* (sumber daya manusia), yayasan melakukan evaluasi mengenai bagaimana pengurus dan relawan berperan terhadap penyelenggaraan berbagai program yayasan. Selanjutnya, yayasan melakukan evaluasi mengenai capaian pengelolaan keuangan dan bagaimana merencanakan rencana keuangan ke depan. Terakhir, proses evaluasi dilakukan terhadap media dan informasi yang digunakan, yakni bagaimana efektivitas penggunaan media dan informasi terhadap publikasi informasi yang terjadi di internal maupun eksternal Yayasan ISBANBAN.

3.2. Sikap

Selain pengetahuan, seorang administrator pekerjaan sosial yang berkompeten juga perlu memiliki sekumpulan sikap yang profesional. Sikap-sikap profesional ini penting bagi hubungannya dengan staf dan masyarakat. Adapun sikap-sikap tersebut meliputi sikap menghormati tiap anggota tim sebagai individu yang memiliki kekhasan; mengetahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan menerima premis ini bagi tim dan dirinya; berharap dapat memberikan keadaan fisik dan suasana kejiwaan yang akan membantu tiap anggota tim agar dapat memberikan yang terbaik; menyadari pentingnya nilai-nilai; memiliki pikiran terbuka dan menerima ide-ide baru dan kenyataan-kenyataan; serta mengetahui bahwa kesejahteraan lembaga lebih penting daripada kesejahteraan pegawai lainnya, termasuk dirinya sendiri (Skidmore, 1995).

Dilihat dari sikapnya, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki sikap menghormati terhadap setiap anggota tim sebagai individu yang memiliki kekhasan. Dalam hal ini, pemimpin memahami karakter dari tiap anggotanya, dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Ia tidak pernah membedakan anggota satu dengan anggota lainnya, dan senantiasa menghargai staf dalam hal penyampaian pendapat, ide, masukan, maupun kritikan. Selain sikap hormat, pemimpin mengetahui bahwa dia menerima ini untuk timnya dan dirinya sendiri. Ia selalu terbuka dalam hal menerima masukan dan kritikan, serta selalu menerima ketika ada keputusan yang kurang sesuai, dan senantiasa memiliki keinginan untuk memperbaiki melalui diskusi. Ia menganggap dirinya dan anggotanya sama, sehingga energi positif yang diberikan selalu masuk dan membuat anggotanya jauh lebih berkualitas.

Selanjutnya, pemimpin memiliki harapan untuk menciptakan kondisi fisik dan suasana mental yang membantu setiap anggota tim melakukan yang terbaik. Ini tercermin dalam proses komunikasi dengan anggota tim. Komunikasinya yang baik dan sopan membuat anggotanya merasa nyaman dan rileks. Selain itu, pemimpin juga selalu membawakan suasana dengan penuh semangat, ceria, dan asik, sehingga tetap terlihat santai, namun maksud dan tujuannya tersampaikan. Adanya komunikasi seperti ini mampu menghilangkan *gap* antara pemimpin dengan anggota tim lainnya. Dalam hal nilai, pemimpin Yayasan ISBANBAN menyadari pentingnya nilai-nilai. Di yayasan, pemimpin menerapkan nilai RESPECT, yang merupakan singkatan dari *Respect, Empathy, Special, Engage, Collaboration*, dan *Trust*. Nilai ini merupakan nilai yang akan selalu menjadi landasan dalam berpikir dan berperilaku. Berkaitan dengan nilai-nilai tersebut, pemimpin selalu berperan layaknya teman, kakak, bahkan orang tua. Ia selalu percaya dan meyakini bahwa setiap orang berproses dan akan tumbuh. Ia juga menganggap anggotanya spesial, dan selalu memotivasi untuk terus menjadi lebih baik. Dalam hal *trust*, pemimpin selalu percaya dan memberikan kesempatan, bahkan dukungan kepada setiap anggota tim, untuk sama-sama berkembang bersama Yayasan. Nilai-nilai inilah yang membuat Yayasan ISBANBAN hingga saat ini bertahan. P

Pemimpin Yayasan ISBANBAN juga terbuka dengan semua masukan dan kritikan. Sikap ini ia terapkan agar dapat melahirkan ide-ide yang tak terduga untuk program selanjutnya. Pemimpin meyakini bahwa setiap masukan dan kritikan yang diolah dengan sikap yang positif akan melahirkan suatu gagasan dan terobosan terbaru untuk masa yang akan datang. Pemimpin juga selalu memiliki keinginan untuk mempelajari hal baru dan mencari ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya. Pemimpin Yayasan ISBANBAN juga senantiasa mengutamakan kepentingan lembaga daripada kepentingan anggota-anggota di dalamnya, termasuk dirinya sendiri. Baginya, kesejahteraan lembaga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya maupun kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada anak-anak Banten dalam upaya peningkatan pendidikan.

3.3. Tindakan

Disamping pengetahuan dan sikap, seorang administrator pekerja sosial yang berkompeten dan efektif juga perlu mengambil banyak peran dan melakukan banyak tindakan manajerial. Menurut Skidmore (1995), terdapat 18 tindakan yang perlu dimiliki oleh seorang administrator pekerja sosial yang berkompeten dan efektif. Namun dari 18 tindakan tersebut, penelitian ini hanya akan mengkaji 5 tindakan, yakni tindakan-tindakan administrator pekerjaan sosial yang berasosiasi dengan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan dalam lembaga yang menentukan pencapaian, hasil, dan *output* yang akan dicapai oleh sebuah lembaga. Adapun tindakan-tindakan administrator pekerjaan sosial kompeten dari Skidmore (1995) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yakni di antaranya demokrasi (*democrating*), perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menentukan prioritas (*setting priorities*), dan pembuatan keputusan (*decision making*).

Pemimpin Yayasan ISBANBAN dan anggota-anggotanya selalu bertukar pikiran dan pendapat di setiap kesempatan rapat dan pertemuan. Pemimpin juga sering meminta pandangan para pengurus dalam mengambil tindakan. Ia selalu mendengarkan dan menerima pendapat seluruh anggota, karena menganggap bahwa setiap relawan itu spesial dan memiliki cara atau nilai masing-masing. Dengan kepedulian dan rasa empati yang dimiliki oleh pemimpin, perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap anggota dapat mempersatukan seluruh anggota.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin Yayasan ISBANBAN selama ini dimulai dengan mimpi bersama yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan. Pemimpin selalu membuat tujuan dari diadakannya sebuah program, serta manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Ketika sudah jelas maksud dan tujuan dari program tersebut, pemimpin kemudian membentuk sebuah perencanaan, yakni mulai dari panitia hingga teknisnya. Pemimpin selalu memulai diskusi dengan tim yang kecil, kemudian dilanjutkan dengan tim yang besar.

Pemimpin Yayasan ISBANBAN dibantu oleh pembina, sekretaris, pengurus, bendahara, *Human Resource Development* (HRD), anggota tim yayasan, serta para *project officer* di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Selain itu, pemimpin juga dibantu oleh beberapa media online menjadi tim pendukung untuk jalannya suatu organisasi. Pemimpin Yayasan ISBANBAN mempertimbangkan sisi urgensi dan kebutuhan dalam setiap program jangka panjang dan pendek. Selain itu, pemimpin juga mempertimbangkan pilihan dengan kemungkinan resikonya sedikit.

Selanjutnya, dalam hal pembuatan keputusan, pemimpin Yayasan ISBANBAN selalu menampung seluruh masukan dari setiap anggota tim sebelum diperolehnya keputusan final. Pemimpin biasanya membuat beberapa pilihan dan selalu mempertimbangkan baik serta buruknya setiap pilihan tersebut. Setelah dipertimbangkan dengan matang, keputusan final biasanya akan tercapai, dengan pertimbangan hasil yang dapat diterima dan dilaksanakan bersama-sama. Keputusan ini diperoleh melalui analisis SWOT, yakni mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sebuah keputusan, sehingga kemungkinan resiko yang dapat terjadi sangat minim.

4. Pembahasan

Administrator pekerjaan sosial memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka mencapai keberhasilan (Al-Zahrani & Jounaidi, 2020). Administrator bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang disediakan untuk individu dan keluarga, dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan membuat ketentuan untuk pemeliharaan dan pengembangan pelayanan organisasi (Austin, 2002).

Organisasi layanan manusia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Mereka dituntut untuk dapat melakukan inovasi secara kompetitif (Mosley & Smith, 2018), sementara permasalahan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya untuk mendukung fungsi manajemen pekerjaan sosial. (Bugg-Levine & Ali, 2016). Berkurangnya peran pekerja sosial dalam fungsi administratif organisasi layanan manusia merupakan penyebab terbatasnya sumber daya tersebut. Hal tersebut di antaranya dikarenakan mendominasinya para pemimpin dan administrator organisasi yang berasal dari bidang di luar pekerjaan sosial, seperti ekonomi, hukum, manajemen, bisnis, administrasi publik, dan sebagainya (Wilson & Lau, 2011), sehingga administrator-administrator tersebut tidak memiliki pengalaman maupun keterampilan di bidang pekerjaan sosial (Miller, 1986 dalam Wuenschel, 2006). Selain itu, para pemimpin dan administrator yang terlibat di dalamnya memiliki kompetensi yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan praktik pekerjaan sosial (Bliss, Pecukonis, & Snyder-Vogel, 2014), sehingga hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan dan efektivitas organisasi, khususnya organisasi layanan manusia.

Elemen-elemen pengetahuan, sikap, dan tindakan administrator pekerjaan sosial merupakan kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dan/atau administrator dalam menjalankan dan mengoperasikan sebuah organisasi layanan manusia (Skidmore, 1995). Zwanenberg dan Consulting (2010) menambahkan bahwa kompetensi dan kualitas administrator pekerjaan sosial dapat dilihat dari wawasan yang dimiliki oleh administrator (*insight*); keberanian administrator untuk membuat pendekatan-pendekatan baru dalam menjalankan organisasi (*courage*); kesadaran administrator terhadap nilai-nilai, kualitas, dan inteligensi orang lain (*awareness*); kemampuan administrator untuk melibatkan, mendukung, mengembangkan, dan belajar dari orang lain (*relational*); kebijaksanaan administrator dalam memilih tindakan (*wisdom*); semangat administrator untuk memberikan yang terbaik dan menuntutnya dari orang lain (*passion*); ketahanan administrator untuk tetap fokus pada hasil (*resilience*); serta kedisiplinan administrator dalam menjalankan tugas dan belajar (*discipline*). Selain itu, administrator pekerjaan sosial harus menghormati kata-kata dan ide orang lain, peka terhadap budaya dan nilai orang lain, dan berempati. (Lawler & Bilson, 2010).

Administrator pekerjaan sosial merujuk pada pemimpin Yayasan Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketua Yayasan ISBANBAN memiliki pengetahuan yang baik tentang yayasan

yang dijalankannya. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan pemimpin tentang tujuan, kebijakan, layanan, dan sumber daya yayasan. Selain itu, pemimpin juga memiliki pengetahuan mengenai dinamika tingkah laku manusia, metode intervensi pekerjaan sosial, proses manajemen bisnis, cara sebuah organisasi berjalan, serta proses evaluasi organisasi.

Selain pengetahuan, pemimpin Yayasan ISBANBAN juga memiliki sikap yang baik sebagai pemimpin yayasan. Hal ini terlihat bahwa para pemimpin selalu menghargai dan menghormati perbedaan dan kepribadian seluruh karyawan yayasan. Pemimpin juga mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi anggota-anggotanya melalui sikapnya yang ramah dan rendah hati. Ia pun menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan di yayasan, yaitu nilai RESPECT. Nilai ini merupakan singkatan dari *respect, empathy, special, respect, collaboration*, dan *trust*. Selain itu, pemimpin juga memiliki sikap terbuka terhadap anggotanya dan senantiasa memprioritaskan kepentingan yayasan dibandingkan kepentingan lainnya.

Aspek tindakan yang diteliti meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yaitu demokrasi (*democrating*), perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menentukan prioritas (*setting priorities*), dan pembuatan keputusan (*decission making*). Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki tindakan yang baik dalam menjalankan tugasnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, pemimpin selalu membuka kesempatan bagi seluruh anggotanya untuk mengeluarkan pendapat dan bermusyawarah. Ia selalu mendorong seluruh anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pembuatan prioritas, dan pembuatan keputusan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin dan/atau administrator Yayasan ISBANBAN telah memiliki kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang administrator pekerjaan sosial, baik pengetahuan, sikap, maupun tindakannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski eksistensi pekerja sosial sebagai administrator di lembaga pelayanan manusia berkurang, namun Yayasan ISBANBAN memiliki pemimpin dengan latar belakang pendidikan dalam kepedulian sosial dan pekerjaan sosial. Selain itu, pemimpin Yayasan ISBANBAN bukan hanya seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan, namun ia juga memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan/atau administrator organisasi layanan manusia.

5. Kesimpulan

Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang administrator pekerjaan sosial meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yayasan ISBANBAN telah memenuhi kompetensi sebagai administrator pekerjaan sosial, dengan latar belakang pendidikan yang telah sesuai dengan kebutuhan seorang administartor, serta memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan yang sesuai dengan komptensi yang harus dimiliki oleh seorang administrator yang bekerja di organisasi layanan manusia. Kompetensi dimaksud meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki pengetahuan yang baik mengenai yayasan yang ia operasikan. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan pemimpin mengenai tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, serta sumber daya yang dimiliki oleh yayasan. Selain itu, pemimpin juga memiliki pengetahuan mengenai dinamika tingkah laku manusia, metode intervensi pekerjaan sosial, proses manajemen bisnis, cara sebuah organisasi berjalan, serta proses evaluasi organisasi.

Pemimpin Yayasan ISBANBAN juga memiliki sikap yang baik sebagai pemimpin yayasan. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemimpin yang senantiasa menghormati dan menghargai perbedaan karakter yang dimiliki oleh seluruh staf yayasan. Pemimpin juga mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi anggota-anggotanya melalui sikapnya yang ramah dan rendah hati. Ia pun menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan di yayasan, yaitu nilai RESPECT. Adapun nilai ini merupakan singkatan dari *respect, empathy, special, respect, collaboration*, dan *trust*. Pemimpin juga memiliki sikap terbuka terhadap anggotanya dan senantiasa memprioritaskan kepentingan yayasan dibandingkan kepentingan lainnya. Berkaitan dengan tindakan, pemimpin Yayasan ISBANBAN memiliki tindakan

yang baik dalam menjalankan tugasnya. Tindakan-tindakan tersebut, dalam hal ini, meliputi demokrasi (*democratizing*), perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menentukan prioritas (*setting priorities*), dan pembuatan keputusan (*decision making*).

6. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, saran dari penelitian ini adalah pengetahuan pemimpin Yayasan ISBANBAN perlu dikembangkan, ditingkatkan, dan dipertahankan. Pengetahuan tersebut menjadi indikasi yang mendukung proses implementasi pelayanan sosial yang sesuai dengan praktik pekerjaan sosial dan diharapkan implementasi tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sehingga hal ini dapat mendukung peningkatan kualitas layanan dari Yayasan ISBANBAN. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin Yayasan ISBANBAN juga dapat menjadi *role model* bagi pemimpin yayasan sosial lainnya agar dapat memiliki kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan sesuai dengan praktik pekerjaan sosial.

Selanjutnya, sikap pemimpin Yayasan ISBANBAN juga perlu dipertahankan. Sikap administrator pekerjaan sosial merupakan indikasi yang juga mendukung proses pelaksanaan layanan sosial yang sesuai dengan praktik pekerjaan sosial, karena sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia di dalam organisasi yang ia pimpin, yang mana hal ini berdampak pada peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan, sehingga sikap tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan dari Yayasan ISBANBAN. Adapun, sikap pemimpin Yayasan ISBANBAN juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemimpin yayasan sosial lainnya untuk memberikan layanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan penerima manfaat dan praktik pekerjaan sosial.

Terakhir, tindakan pemimpin Yayasan ISBANBAN juga perlu dijaga sesuai dengan praktik pekerjaan sosial. Tindakan juga merupakan indikasi yang mendukung proses pemberian layanan sosial, karena tindakan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemimpin bersama dengan timnya untuk memberikan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat. Tindakan yang sesuai dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan berdampak pada kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, termasuk Yayasan ISBANBAN. Tindakan pemimpin Yayasan ISBANBAN juga dapat dijadikan sebagai contoh bagi pemimpin yayasan sosial lainnya untuk memberikan layanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan penerima manfaat dan praktik pekerjaan sosial.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian dan penulisan artikel ini, terutama kepada Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan penulis ilmu dan kesempatan untuk menulis artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aarons, G. A. & Sommerfeld, D. A. (2012). Leadership, innovation climate, and attitudes toward evidence-based practice during a statewide implementation. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 51(4), 423-431. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.01.018>
- Al-Zahrani, S. S. A. & Jounaidi, A. R. M. R. A. (2020). The role of administration in promoting responsibilities and values for employees in the social sector in Jeddah: a pilot study. *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, VII(V), 25-32.
- Austin, D. (1997). The institutional development of social work education: the first 100 years-and beyond. *Journal of Social Work Education*, 33(3), 599-612. <https://doi.org/10.1080/10437797.1997.10778897>
- Austin, D. M. (2002). *Human Services Management: Organizational Leadership in Social Work Practice*. New York: Columbia University Press.
- Bliss, D. L., Pecukonis, E., & Snyder-Vogel, M. (2014). Principled leadership development model for aspiring social work managers and administrators: development and application. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 38, 5-15. <https://doi.org/10.1080/03643107.2013.853008>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. Retrieved from http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised_-_final.pdf
- Choy-Brown, M., Stanhope, V., Wackstein, N., & Cole, H. D. (2020). Do social workers lead differently? Examining associations with leadership style and organizational factors. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*. <https://doi.org/10.1080/23303131.2020.1767744>
- Corrigan, P. W., Diwan, S., Campion, J., & Rashid, F. (2002). Transformational leadership and the mental health team. *Administration and Policy in Mental Health*, 30(2), 97-108. <https://doi.org/10.1023/A:1022569617123>
- Ezell, M., Chernesky, R., & Healy, L. (2004). The learning climate for administration students. *Administration in Social Work*, 28(1), 57-76. https://doi.org/10.1300/J147v28n01_05
- Ferguson, H. (2014). Envisioning social work by putting the life back into it: learning about what social workers do and how they do it (well). Dalam Joint Social Work Education and Research Conference: Social Work Making Connections, London, 23-25 July 2014. London: JSWEC.
- Forrester, D. (2016). What, when, why and how: zombie social work and the need for a new narrative. Dalam Solomon, E. (Ed.). *Re-thinking Children's Services Fit for the Future?* London: Catch22 and NCB.
- Gibson, M. (2017). Social worker or social administrator? Findings from a qualitative case study of a child protection social work team. *Child & Family Social Work*, 22, 1187-1196. <https://doi.org/10.1111/cfs.12335/>
- Goldkind, L. & Pardasani, M. (2013). Social workers as senior executive: does academic training dictate leadership style? *Advances in Social Work*, 14(2), 573-593. <https://doi.org/10.18060/2691>
- Gummer, B. (1987). Are administrators social workers? The politics of interprofessional rivalry. *Administration in Social Work*, 11(2), 19-31. https://doi.org/10.1300/J147v11n02_03
- Hasenfeld, Y. (2000). Organizational forms as moral practices: the case of welfare departments. *Social Service Review*, 74(3), 329-351. <https://doi.org/10.1086/516408>
- Hasenfeld, Y. (2015). What exactly is human services management? *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 39(1), 1-5. <https://doi.org/10.1080/23303131.2015.1007773>
<http://www.ignou.ac.in/upload/Bswe-003%20Block-2-UNIT-10-small%20size.pdf>
https://ssir.org/up_for_debate/pay_what_it_takes_philanthropy/ali_bugg_levine Diakes 9 Januari 2018
- Istana Belajar Anak Banten. (2017). *Rekam Jejak*. ISBANBAN. <https://www.isbanban.org/about/milestone> Diakes 20 September 2020
- Karger, H. J. (1986). The de-skilling of social workers: an examination of the industrial model of production and the delivery of human services. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 13(1), 155-129.
- Kidneight, J. C. (1950). The quest for competence in welfare administration. *Social Service Review*, 24(2), 173-180. <https://doi.org/10.1086/637836>
- Kumar, S. (2017). Social Welfare Administration as a Method for Social Work. In Thomas, Graious (Ed.), *Social Work Intervention with Communities and Institutions Vol. II* (pp. 197-213). New Delhi: Indira Gandhi National Open University.
- Lawler, J. & Bilson, A. (2010). *Social Work Management and Leadership: Managing Complexity with Creativity*. London: Routledge.
- Lohmann, R. A. & Lohmann, N. (2002). *Social Administration*. New York: Columbia University Press.
- Mosley, J. E. & Smith, S. (2018). Human service agencies and the question of impact: lessons for the practice. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 42(2), 113-122. <https://doi.org/10.1080/23303131.2018.1425953>
- Munro, E. (2011). *The Munro Review of Child Protection: Final Report-A Child-Centered System*. London: DfE.
- Nesoff, I. (2007). The importance of revitalizing management education for social workers. *Social Work*, 52(3), 283-285. <https://doi.org/10.1093/sw/52.3.283>
- Ofsted (2012). *Framework for the Inspection of Local Authority Arrangements for the Protection of Children*. London: Ofsted.
- Page, R. M. (2010). The changing face of social administration. *Social Policy and Administration*, 44(3), 326-342. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9515.2010.00716.X>
- Pak, C., Cheung, J. C., & Tsui, M. (2016). Looking for social work values and ethics in the textbooks of social services administration over the past 50 years (1965-2014). *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*. <https://doi.org/10.1080/23303131.2016.1231151>
- Parton, N. (2014). *The Politics of Child Protection*. London: Palgrave.

- Patti, R. J. (1984). Who leads the human services? The prospects for social work leadership in an age of political conservatism. *Administration in Social Work*, 8(1), 17-29.
- Patti, R. J. (2000). The landscape of social welfare management. In R. J. Patti (Ed.), *The Handbook of Social Welfare Management*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Patti, R. J. (2003). Reflections on the state of management in social work. *Administration in Social Work*, 27(2), 1-11.
- Perlmutter, F. D. (2006). Ensuring social work administration. *Administration in Social Work*, 30(2), 3-10. https://doi.org/10.1300/J147v30n02_02
- Robichau, R. W. & Wang, L. (2018). Marketization strategies and the influence of business on the management of child welfare agencies. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 42(2), 146-165. <https://doi.org/10.1080/23303131.2017.1422070>
- Skidmore, R. A. (1995). *Social work administration: Dynamic management and human relationships* (3rd Ed.). Allyn and Bacon.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Wilson, S. & Lau, B. (2011). Preparing tomorrow's leaders and administrators: evaluating a course in social work management. *Administration in Social Work*, 35, 324-342. <https://doi.org/10.1080/03643107.2011.575347>
- Wuenschel, P. C. (2006). The diminishing role of social work administrators in social service agencies: issues for consideration. *Administration in Social Work*, 30(4), 5-18. http://dx.doi.org/10.1300/J147v30n04_02
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (12th Ed.). Cengage Learning.
- Zwanenberg, Z.V. & Consulting, Z. (2010). In Zwanenberg, Z. V. (Ed.), *Leadership in Social Care*. London: Jessica Kingsley Publisher.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Fatwa Nurul Hakim¹ 

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia BRIN
Kawasan Yogyakarta Gedong Kuning, Kotagede Yogyakarta

* Korespondensi: hakiimfatwa@gmail.com ; Telp (+62) 82134205810

Diterima: 23 Mei 2018; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi pendamping sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Eksistensi pendamping sosial dapat dilihat dari peran yang dilakukan pada LKSA tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Subyek penelitian adalah pendamping sosial anak terlantar di LKSA, dianalisis secara deskriptif interpretative tentang peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak/panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial menjalankan peran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah tercapai, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan fisik, kebutuhan pelayanan psikologis, kebutuhan pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak terlantar. Karya nyata pendamping sosial juga didorong oleh motivasi yang tinggi untuk menjalankan amal sholeh yang diperintahkan agama. Rekomendasi penelitian, diharapkan Kementerian Sosial selaku yang mengatur regulasi memberikan perhatian terhadap LKSA dengan meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimtek, serta perlu meninjau ulang besaran insentif yang diterima pendamping LKSA dilihat dari cakupan wilayah dampingan dan jumlah KPM yang didampingi serta lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pendampingan supaya dapat memenuhi hak – hak anak

Kata Kunci: Eksistensi, Pendamping Sosial, LKSA, Anak Terlantar

Abstract: *This study aims to determine the existence of social companion at Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). The existence of social companions can be seen from the role performed on the LKSA. Research method using approach This research type is descriptive interpretative, with technique of collecting interview data. The subject of this research is the social support of abandoned children in LKSA, analyzed descriptively interpretative about the role of social companion of abandoned child in social welfare program of child and social welfare institution of child / parlance. The result of research indicates that social assistant performs role as effort to improve quality of life and social welfare for abandoned child has been achieved this is indicated by the fulfillment of physical service needs, psychological service needs, social service needs and education service needs for abandoned children. The real work of social companions is also driven by high motivation to run a religious charity. The recommendation of this study by the Ministry of Social Affairs is to pay attention to LKSAs by increasing the capacity of assistants through technical guidance activities, and the need to review the amount of incentives received by LKSA facilitators from the coverage of assisted areas and the number of KPM assisted.*

Keyword: Existence, Social Assistant, LKSA

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bagi suatu bangsa, anak sebagai generasi penerus perlu dibina dan dilindungi agar nantinya menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keadaan anak pada saat sekarang merupakan pijakan yang mempengaruhi kondisi kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Hak dan kebutuhan anak harus diperhatikan, masa anak adalah masa perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Masa anak adalah masa berkembangnya aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan fisik, kematangan intelektual, dan spiritual yang berhubungan dengan masalah dan perkembangan social (Syamsu, 2012). Pada masa anak juga dikembangkan keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, membangun sikap yang sehat sesuai dengan kondisi fisik serta belajar menyesuaikan diri dan mengembangkan peran sosialnya, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak semua anak mendapat berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara baik karena anak menjadi korban penelantaran. Penelantaran anak dapat dilihat adanya anak yang kurang gizi dan anak putus sekolah karena keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Kondisi anak terlantar di Indonesia berdasarkan Pusat Data dan Informasi tahun 2018 Kementerian Sosial RI sebanyak 1.877.780 jiwa. Kota Padang memiliki kasus penelantaran anak yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tahun 2015 jumlah anak terlantar 1.480 anak. Penanganan dan pelayanan masalah kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, yang pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 untuk memelihara anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Kesempatan pemeliharaan dan usaha mengembangkan tersebut hanya bisa dilaksanakan dan diperoleh bilamana kesejahteraan sosial anak terjamin. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11 tahun 1979, pasal 1 ayat 1: tentang kesejahteraan sosial). Dalam pelayanan sosial terhadap anak maka pemerintah telah menetapkan program kesejahteraan sosial anak (PKSA).

Program kesejahteraan anak merupakan program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. PKSA berupaya membangun sistem pelayanan berbasis keluarga dan komunitas agar orangtua dapat mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan hak anak dan melakukan pengasuhan yang mandiri. Program kesejahteraan sosial anak adalah prakarsa yang terarah, terpadu, dan berjangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi kompensasi/subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi dan kreativitas diri, penguatan orang tua/keluarga, dan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak/ panti asuhan.

Pelayanan sosial merupakan bagian dari usaha kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menegaskan, bahwa usaha kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi anak terlantar. Di kota Padang terdapat 24 LKSA/Panti yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial anak terlantar. Keberadaan panti dapat dijadikan wahana bagi masyarakat yang mempunyai potensi secara materiil dan berkewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh karena ada hak bagi orang lain terutama keluarga miskin. Anak-anak yang tinggal di panti adalah mereka yang mengalami

keterlantaran karena kondisi miskin, salah satu atau kedua orangtua anak meninggal dunia, ataupun anak yang tidak ada kerabat yang bersedia menampung.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam proses tumbuh dan berkembang, anak harus dilindungi dan mendapatkan perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kenyataan karena beberapa sebab terdapat anak yang mengalami keterlantaran jasmani, rohani, dan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh perseorangan, dan masyarakat melalui LKSA, ataupun oleh pemerintah melalui program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan anak seperti Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dalam Intruksi Presiden tersebut, PKSA dicantumkan sebagai inisiatif prioritas nasional. Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. PKSA berupaya membangun sistem pelayanan berbasis keluarga dan komunitas agar orangtua atau keluarga dapat mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar anak dengan melakukan pengasuhan yang memadai. Untuk itu, program ini mengedepankan upaya memanfaatkan dan meningkatkan berbagai sumber pelindung (*protective factors*) dalam sistem ekologi kehidupan anak untuk mengatasi berbagai unsur risiko (*risk factors*) yang menghambatnya. Dari membantu keluarga secara langsung, memperkuat komunitas dan organisasi layanan anak lainnya, hingga berpartisipasi dalam pembuatan berbagai kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai upaya dilakukan. (Sunarto. 2009)

LKSA di Kota Padang telah melakukan pelayanan sosial terhadap anak terlantar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami keterlantaran. Kesejahteraan anak tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berupa terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi hak atas perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pengembangan kemampuan, pemeliharaan, dan perlindungan. Masyarakat mengimplementasikan perlindungan terhadap anak terlantar melalui LKSA/panti dengan berikan anak-anak terlantar melalui dukungan sosial merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial elemen masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar. Dalam pemberian kebutuhan pelayanan anak di LKSA dengan menggunakan metode pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial yang terlatih dan memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Pendamping sosial di LKSA melakukan pelayanan sosial terhadap anak terlantar dengan memberikan anak-anak yang kurang perawatan, mempromosikan dukungan keuangan, dan menawarkan dukungan psikososial. Pendamping sosial di LKSA yang telah memberikan pendampingan terhadap anak yang termasuk dalam kategori antara lain yaitu LKSA Darul Maarif Al Karimiyah, LKSA Putra Bangsa, LKSA Bundo Saiyo, dan LKSA Aisyiyah Koto Tangah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sainuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembinaan Akhlak Anak Studi Kasus di LKSA Muslihah Aisyiyah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yaitu peran LKSA Muslihah Aisyiyah Jeneponto dengan mengadakan pendidikan non formal yang mengajarkan pendidikan fiqih, khadits, akidah akhlak agar anak asuh dapat berakhlakul karimah dan sesuai dengan syariat Islam yang dituntun oleh Rasulullah (Sainudin, 2016).

Upaya untuk mengatasi anak terlantar telah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, maupun secara personal. Upaya yang dilakukan terhadap anak terlantar dilakukan dengan harapan anak dapat terpenuhi hak-haknya, seperti memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, memperoleh kasih sayang dan memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Mengingat anak terlantar membutuhkan pelayanan sosial guna menggapai kesejahteraan sosial, maka pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar antara lain ditempuh melalui pelayanan panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan non panti. Pelayanan sosial di LKSA membutuhkan pendamping sosial dengan melaksanakan peran sesuai dengan kebutuhan anak terlantar agar terentah dari keterlantarannya, oleh karena itu peran pendamping sosial bagi anak terlantar menjadi sangat

penting. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian tentang peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA perlu dilaksanakan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA, apa faktor pendorong pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA dan apa faktor penghambat pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA. Adapun tujuan penelitian adalah diketahui peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kementerian sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam memberikan pelayanan pendampingan sosial bagi anak terlantar di LKSA dalam program kesejahteraan sosial anak dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan juga untuk kepada lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pendampingan supaya dapat memenuhi hak – hak anak.

2. Metode

Metode yang digunakan kualitatif untuk memudahkan penggunaan analisis deskriptif interpretative yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang kuat terhadap fakta-fakta yang ditemukan (Nawawi, 1991: 63) yaitu peran pendamping sosial anak terlantar dalam PKSA di LKSA. Subyek penelitian adalah pendamping sosial anak terlantar di semua LKSA sejumlah 10 orang, dengan perincian di LKSA Putra Bangsa 2 orang, LKSA Darul Maarif Al Karimiyah 2 orang, LKSA Bundo Saiyo 3 orang dan LKSA Aisyiyah 3 orang.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berhubungan dengan pendampingan di LKSA. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Adapun lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di LKSA Putra Bangsa, LKSA Darul Maarif Al Karimiyah, LKSA Bundo Saiyo, dan LKSA Aisyiyah Kota Tengah di Kota Padang dengan pertimbangan LKSA tersebut telah melaksanakan pelayanan sosial dengan menugaskan pendamping sosial dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Program Kesejahteraan Sosial Anak

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerataan Pembangunan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi pemenuhan hak-hak dasar anak. Agar orang tua atau keluarga dapat melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak serta memberikan pengasuhan yang mandiri, PKSA bercita-cita untuk menciptakan sistem pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, program ini lebih memprioritaskan upaya mitigasi berbagai faktor risiko (*risk factor*) yang mengancam kesejahteraan anak serta memanfaatkan dan memperkuat berbagai sumber perlindungan (*protective factor*) yang ada. Dari membantu keluarga secara langsung, memperkuat komunitas dan organisasi layanan anak lainnya, hingga berpartisipasi dalam pembuatan berbagai kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai upaya dilakukan. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas, penguatan orangtua/ keluarga penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3.2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh pemerintah atau pempda, dan atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan dan

perlindungan anak. Idealnya anak tinggal di lingkungan keluarganya, namun karena beberapa sebab menjadikan orangtua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan kepada anaknya seperti orangtua miskin, salah satu atau kedua orangtua anak meninggal. Pengasuhan yang seharusnya diterima anak dari orangtua kandungnya dengan berbagai sebab yang menyertainya menjadikan anak harus menjalani pengasuhan di LKSA/panti. Di dalam LKSA/panti pengasuhan dan perlindungan terhadap anak mencakup pelayanan sosial dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pengurus dan petugas yang bertanggung jawab terhadap anak asuh. Anak-anak yang bisa mendapatkan pengasuhan dan pendampingan serta pendampingan sosial adalah anak-anak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk dalam kategori terlantar.

Pengasuhan adalah perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitive, penuh persesuaian, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (menurut Garbarino dan Benn, dalam Chatarina, 2008 : 21). Pengasuhan melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak. Kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional, efektif maupun instrumental. Tujuan pengasuhan adalah sosialisasi yaitu mengajar anak-anak tentang bagaimana berintegrasi dengan masyarakat.

Adapun perlindungan menurut J Marbun (2007 : 27) adalah keseluruhan upaya dan kegiatan, program, dan kegiatan yang dikenal untuk membantu orang, termasuk pencegahan dan mengatasi masalah yang dialami seseorang atau kelompok. Perlindungan pokok meliputi sandang, pangan, dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Dalam memberikan perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan berfikir positif dan memperhatikan keberlangsungan untuk kesejahteraan yang mendapat perlindungan. Dalam memberikan perlindungan dengan menjunjung tinggi dan mengimplementasikan etika pekerjaan sosial. Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun berbagai keterbatasan kemampuan pemerintah maka pemerintah memberikan kesempatan kepada LKSA untuk bekerja sama memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar.

UU No. 9 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial secara tegas mengatakan bahwa semua warga negara tanpa kecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial, hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara. Program pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar membutuhkan pendamping sosial yang dapat melaksanakan pendampingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar untuk diarahkan sesuai dengan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak dikatakan pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan wajar menurut Sumiarni dan Chandera Halim (2000:16) adalah: a. Pertumbuhan dan perkembangan rohani yang ditandai dengan ketaqwaan dan kepercayaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi masa depan. Anak bebas ketergantungan dalam bentuk apapun. Timbul minat untuk mengubah tingkah laku yang lebih menguntungkan dalam perkembangan dimasa datang. Belajar anak secara kontinyu dan terhindar dari putus sekolah. Peningkatan intelegensi dan kerajinan anak. b. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang ditandai dengan terpenuhi kebutuhan makan dan bergizi. Berat badan anak sesuai dengan perkembangan umur. Terpenuhi kesehatan anak. Anak menjadi energik, kreatif dan dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adanya tempat tinggal yang layak. Terpenuhnya sandang dalam arti bersih, sederhana dan jumlah memadai. c. Pertumbuhan dan perkembangan sosial yang ditandai dengan anak dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Perkembangan kepribadian anak berjalan secara wajar. Anak dapat berorientasi mengenai keteladanan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk dijadikan contoh.

Tumbuh rasa tanggung jawab pada diri anak. Anak dapat bergaul dengan teman sebaya. Anak dapat berperan dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial atau pembangunan nasional di dalam masyarakat, dan anak mempunyai jiwa wiraswasta. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar bagi anak terlantar di LKSA menjadi tanggung jawab LKSA yang dilakukan oleh pengurus, pengelola dan pendamping sosial. Kedudukan dan peran pendamping sosial menjadi

penting, keterampilan dan kemampuan hidup yang dipelajari anak asuh melebihi pengalaman sehari-hari yang diberikan oleh pendamping sosial dengan harapan anak mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang lebih baik.

Lembaga Kegiatan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak. LKSA /panti yang memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak terlantar dengan menyelenggarakan kesejahteraan bagi sosial anak. Pelayanan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKSA melibatkan pelaku baik secara individu, kelompok, dan masyarakat. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKSA adalah termasuk dalam kategori relawan sosial adalah mereka yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun tidak berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan (Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Selanjutnya dalam pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. LKSA/panti sebagai lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial berkewajiban mendaftarkan perizinan operasional kepada instansi sosial sesuai wilayahnya. LKSA/panti merupakan wujud nyata dari empati, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial dari elemen masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar. Apalagi anak terlantar yang sudah tidak ada lagi keluarga/ kerabat yang bisa menampung dengan demikian maka keberadaan LKSA merupakan bentuk dukungan bagi anak yang terlantar sehingga memperoleh pengasuhan dan perlindungan sosial serta mendapatkan pengganti orangtua yang diberikan oleh pendamping sosial di LKSA/panti. LKSA/panti dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dilakukan oleh pengasuh yang bertindak sebagai pendamping sosial bagi anak asuh. Pendamping sosial melakukan pendampingan terhadap anak asuh agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, rohani dan sosialnya layaknya anak dalam asuhan keluarga yang utuh.

3.3. LKSA Darul Maarif Al Karimiyah

LKSA/ Panti Asuhan Darul Ma'arif Al-Karimiyah beralamat di Jalan Gajah Mada No.41B Padang, kelurahan Olo, kecamatan Nanggolo, Kota Padang, nomor telepon (0751) 7052288. Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah didirikan oleh Hj Saudah pada tahun 1990. Panti ini memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori terlantar yaitu anak yatim, anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin. Luas tanah LKSA 3000 m², luas bangunan 296 m² dengan sarana yang dimiliki berupa asrama anak asuh, sekretariat/kantor, ruang keterampilan, mushola, ruang makan, halaman, lapangan olahraga dan sarana transportasi berupa satu unit sepeda motor, sarana penerangan listrik 2.600 watt dan sarana air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan sumur bor. LKSA Darul Maarif Al-Karimiyah berdiri tahun 1990, sumber dana berasal dari donatur tidak tetap, dari masyarakat, Kementerian Sosial RI dan donatur tetap untuk pembiayaan operasional panti. Pada akhir Juni 2015 anak asuh Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah berjumlah 43 orang semuanya laki-laki dan kesemuanya masih bersekolah. Jumlah pengurus 8 orang berpendidikan sekolah dasar dua orang, berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas empat orang dan perguruan tinggi dua orang. Kepala/ pimpinan panti dijabat oleh bapak Hasan Basri, S.Ag, kedelapan pengurus setiap harinya memberikan bimbingan mental spiritual secara teratur. Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah memberikan pelayanan dan pendidikan berdasarkan agama islam dan anak-anak secara teratur menjalankan perintah agama dengan ketaatan serta kesadaran pribadi masing-masing anak.

Anak asuh dibina agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara utuh karena pengasuh memosisikan dirinya sebagai pengganti orang tua, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengelola *bahwa kita disini harus bisa berperan sebaga orang tua anak asuh, kita harus belajar memahami karakter anak, dan hal-hal yang diinginkan oleh anak tersebut.* Disamping dibekali pendidikan agama Islam, anak asuh

juga disekolahkan di lembaga pendidikan formal sebagai bekal hidup pada masa mendatang. Kegiatan harian anak asuh setiap harinya dimulai bangun pagi sebelum masuk waktu sholat subuh. Anak asuh bersiap-siap melakukan sholat tahajud yang kemudian dilanjutkan sholat subuh, mengaji membaca Al Quran. Kebersihan kamar tidur menjadi tanggung jawab anak asuh dan kamar tidur dijaga tetap rapi dan bersih, demikian juga kamar mandi dan lingkungan panti. Pagi hari melakukan makan pagi (sarapan) dan kemudian pergi ke sekolah masing-masing. Sepulang sekolah melaksanakan kewajiban sholat, makan siang, istirahat ataupun menyelesaikan tugas sekolah. Antara sholat Maghrib dan sholat Isya diisi pelajaran agama Islam dan mengaji Al Quran, pembekalan keimanan. Sehabis sholat Isya makan malam dilanjutkan belajar dan menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh sekolah sampai selesai kemudian istirahat tidur. Kegiatan yang dilakukan oleh anak asuh mendapatkan pendamping oleh pendamping sosial. Pendamping sosial di LKSA Darul Maarif Al-Karimiyah memberikan kehangatan pelayanan anak secara fisik, psikologis, sosial dan pendidikan sekolah formal dan pendidikan agama sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

3.4. LKSA Aisyiyah Koto Tangah

LKSA/Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Koto Tangah beralamat di jalan Adi Negoro No.37 A Muara Penjalinan, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah kota ketua Panti Dra. Hj.Yulintidar Syafei. LKSA berdiri tahun 1943 dengan Akte Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan legalitas dari Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. Luas Tanah 1.969 m², luas bangunan 685 m², status kepemilikan milik Persyarikatan, daya tampung 85 orang anak asuh, anak asuh dalam panti 50 orang dan anak asuh luar panti 35 orang, pendidikan anak asuh SD 14 orang, SLTP 26 orang, SLTA 10 orang, 35 anak luar panti mengenyam pendidikan dari SD sampai dengan SLTA, jumlah pengurus 6 orang, pendidikan pengurus SMA 3 orang, S1 3 orang.

Sejarah LKSA Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah dirintis pendirinya sejak tahun 1943 ketika itu A.R Sutan Mansyur, Buya Sutan Mangkuto dan Marzuki Yatim dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah datang mendirikan cabang Muhammadiyah Koto Tangah. Pengurus Aisyiyah Hj.Rajalin, Tiarap, Iya Janggi, Tinala, Rafiat dan One Latifah mendirikan sebuah panti yang terbuat dari rumah kayu beratap rumbai pada sebidang tanah wakaf kaum Hj.Rajilin. Pendirian ini dilatar belakangi dan didorong oleh banyaknya anak-anak terlantar penyandang status sosial seperti yatim, piatu, yatim piatu maupun anak terlantar dari keluarga kurang mampu/miskin.

LKSA Aisyiyah Koto Tangah mempunyai visi: Membina, mengasuh dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, terampil dan beramal. Adapun misi yang diemban Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan; Memberikan kesempatan dan pelayanan pendidikan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, duafa dengan binaan didalam panti dan non panti; Menimbulkan kreatifitas dalam berkarya untuk mewujudkan kemandirian; Menyiapkan kader Aisyiyah yang mampu menjadi pemimpin yang akan datang. LKSA aisyiyah mempunyai program pengasuhan dan penyantunan yang dilaksanakan dengan tujuan : Menanamkan jiwa keislaman dan tertib amalan anak, minimal menamatkan pendidikan setingkat SMA, menguasai salah satu keterampilan sebagai bekal hidup mandiri dan kreatif setelah keluar dari panti, dan menjadi kader 'Aisyiyah yang mampu memelopori amalan 'Aisyiyah Muhammadiyah, indikator pencapaian tujuan yaitu teguh sholat berjamaah di panti, meningkatkannya kreatifitas dan kecerdasan anak, terpenuhinya gizi, kesehatan jasmani dan rohani, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap keberadaan panti, meningkatnya rasa memiliki alumni panti terhadap keberadaan panti, meningkatnya sarana dan prasarana panti, meningkatnya pengelolaan manajemen panti.

Strategi pengasuhan dan perlindungan bagi anak terlantar di LKSA aisyiyah Koto Tangah yaitu mengusahakan sistem pendidikan formal dan keterampilan hidup : Anak asuh dimasukkan pada lembaga pendidikan formal yang sesuai bakat dan minat anak; Pendidikan keterampilan menjahit, memasak, komputer dan wirausaha; Anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA diusahakan memasuki dunia usaha/kerja; Anak yang berprestasi diupayakan mengikuti pendidikan tinggi. Sistem pengasuhan dilakukan dengan memahami kondisi dan kebutuhan anak yang dilakukan oleh pendamping sosial/pengasuh yang bertindak sebagai pengganti orangtua bagi anak yang tinggal di

dalam LKSA/panti. Dan sistem pengasuhan luar panti yaitu anak asuh masih tinggal pada keluarga dan panti memberikan santunan setiap bulannya untuk biaya pendidikan, pengasuhan tetap dilakukan oleh orangtuanya.

Adapun sistem pembinaan mental spiritual bagi anak yang tinggal dipanti yaitu : pendidikan baca Al Quran dan didikan subuh, pengajian umum satu kali sebulan, kaderisasi (IRM), dan pendidikan olahraga. Pendamping sosial dalam memberikan pembinaan mental spiritual dengan menerapkan dinamika kelompok dengan menitikberatkan pada interaksi dari seluruh anak asuh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengelola bahwa "*pembinaan mental spiritual yang dilakukan oleh lembaga ini dengan belajar dan beribadah bersama kemudian membiasakan untuk saling mendoakan satu sama lain agar tercipta empati*". Hal ini memudahkan pendamping sosial untuk membentuk kedisiplinan melaksanakan kewajiban dan anak asuh diarahkan untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Pendamping sosial menekankan bahwa semua pendidikan dan amal perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing orang dihadapan Allah Swt.

LKSA Koto Tengah mempunyai sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan sosial bagi anak asuh fasilitas asrama terdiri dari kamar tidur anak asuh sebanyak 3 kamar, kamar tidur pengasuh sebanyak 3 kamar, kamar mandi anak asuh sebanyak 2 buah, kamar kecil sekaligus kamar mandi anak asuh 5 buah, air sumur bor, menggunakan 2 pompa air, fasilitas pendidikan mempunyai ruang belajar anak di lantai satu juga berfungsi sebagai ruang serba guna yang tersedia kursi meja belajar dan papan tulis *white board*, fasilitas ibadah, mushola sebagai tempat ibadah (sholat berjamaah), fasilitas kantor tersedia 2 (dua) unit komputer, 2 (dua) set kursi tamu dan 3 (tiga) buah almari tempat penyimpanan arsip, fasilitas dapur, ruang masak lengkap dengan peralatan dapur, ada gudang tempat penyimpanan bahan baku makanan yang akan dimasak, dua rak piring, kulkas, *magic jar*, piring, gelas, sendok dan lain-lain. Sebagai sarana informasi dan komunikasi untuk kepentingan LKSA dalam hal berhubungan dengan eksternal yaitu adanya sambungan telepon (0751) 481977. LKSA juga mempunyai fasilitas berupa dua (2) buah televisi berwarna 21 inchi, satu (1) buah VCD dan DVD yang dapat dinikmati oleh seluruh penghuni panti.

Kondisi kesehatan anak panti asuhan diperhatikan oleh pendamping sosial dan kesehatan anak asuh pada panti asuhan 'Aisyiyah Koto Tengah cukup baik, terjangkitnya suatu penyakit relatif rendah. Upaya untuk mengatasi/ mencegah gangguan kesehatan adalah menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Agar kondisi anak tetap terjaga kesehatannya, pendamping sosial mengupayakan agar anak mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi juga istirahat yang cukup. Untuk penyakit yang tergolong ringan atau yang dapat diatasi sendiri, panti menyediakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Apabila mengkhawatirkan segera dibawa ke Klinik Pratama 'Aisyiyah atau langsung ke dokter terdekat.

3.5. LKSA/Panti Asuhan Putra Bangsa

Latar belakang didirikan LKSA/ Panti Asuhan Putra Bangsa adalah berdasarkan perintah agama. Dalam kehidupan manusia problem anak yatim, miskin, terlantar, tidak habis sepanjang masa. Islam telah jauh-jauh mengingatkan kepada umatnya untuk menangani masalah ini seperti yang ditentukan dalam surat Al-Maun, yang artinya pakah engkau tahu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Permasalahan keterlantaran anak menjadikan masyarakat turut memikirkan karena tidak mungkin dapat ditangani pemerintah saja, maka pemuka masyarakat Kota Padang ingin berperan bersama pemerintah menangani masalah ini dengan mendirikan sebuah yayasan yaitu Budi Mulia dan yang khusus mengelola untuk anak yatim, miskin, terlantar dibawah satu unit Panti Asuhan Putra Bangsa.

Sejarah singkat LKSA Putra Bangsa dilatarbelakangi Usai agresi Belanda ke II tahun 1951 banyak anak-anak pejuang Kota Padang menjadi yatim, piatu terlantar karena ditinggal orang tua ditambah keadaan ekonomi sangat sulit setelah selesai perang keadaan tidak menentu. Pemerintah kota Padang di bawah pimpinan DR. Rasidin menganjurkan kepada kaum ibu-ibu untuk membentuk sebuah organisasi / yayasan guna menangani anak para pejuang yang orangtuanya telah syuhada dalam

mempertahankan kemerdekaan. LKSA Putra Bangsa mempunyai visi yaitu: Menampung dan menyelamatkan anak yatim, miskin dan keterlantaran agar dapat hidup dan berkembang secara wajar menuju hidup mandiri. Adapun misi yang di emban yaitu: Mewujudkan anak asuh yang beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia bekerja dengan keterampilan untuk hidup mandiri; Membina, mendidik anak meliputi fisik, mental sosial, agama, dan keterampilan; Mengangkat harkat dan martabat anak yatim, miskin terlantar dan menumbuhkembangkan fungsi sosial. Dalam memberikan pendampingan dilakukan oleh pendamping sosial yang berperan sebagai pengganti orangtua / keluarga anak yatim, piatu, miskin, terlantar untuk memberdayakan sebagai insan yang berpotensi dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

LKSA Putra Bangsa beralamat di Jl. DR. Sutomo No. 23B (asrama putra) no telp 0751-21393, Jl. A.R.Hakim No 69 Padang (asrama putri) no telp 0751-22092, fax 0751-24997, kode Pos. 25123. Lokasi antara LKSA untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan berbeda tempat. Untuk mendapatkan pelayanan sosial LKSA Putra Bangsa dengan persyaratan tersebut ditentukan, adapun syarat-syarat penerimaan anak asuh: usia sekolah dasar, surat pindah sekolah, mengisi formulir, pas foto 3 x 4, surat pernyataan berbadan sehat dan tidak cacat dengan surat keterangan yang ditandatangani dari Puskesmas, Surat keterangan dari pemerintah setempat lurah/kades dari kecamatan dan bersedia mentaati tata tertib yang ada. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pendamping sosial akan merekomendasikan bahwa anak tersebut bisa diterima dan mendapatkan pelayanan sosial di LKSA Putra Bangsa. Tahapan pembinaan anak asuh yang dilakukan oleh pendamping sosial ialah penyelesaian administrasi, penerimaan, pengasuhan, bimbingan, pembekalan, terminalisasi, penyaluran, monitoring. Dalam pengasuhan dan perlindungan di LKSA Putra Bangsa maka pendamping sosial berperan sebagai pengganti orangtua. Anak disekolahkan di sekolah sistem pembelajaran formal, adapun di LKSA anak mendapatkan pengasuhan oleh pendamping sosial.

LKSA Putra Bangsa yang bernaung di Yayasan Budi Mulia dalam memberikan pendidikan formal maka oleh pendamping sosial di sekolahkan di SD dan SMP Yayasan Budi Mulia. Anak asuh dalam jenjang Sekolah Dasar dimasukkan di SD Islam Budi Mulia. SD Islam Budi Mulia mempunyai visi: Pelayanan pendidikan untuk mewujudkan insane beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia serta cinta tanah air. Adapun misi yang di emban; Membimbing peserta didik agar berkepribadian berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan proses pembelajaran berwawasan ilmiah dan imaniah, mendorong kreatifitas dan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, menciptakan suasana kondusif agar warga sekolah mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

Tujuan berdirinya SD Islam Budi Mulia adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar yang islami dalam rangka mempersiapkan generasi muda beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia. Sistem pembelajaran yang diterapkan di SD Islam Budi Mulia adalah belajar dari pagi sampai sore (*full day school*) selama empat hari kerja (Senin s/d Kamis), hari jumat dan sabtu murid pulang siang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Pendidikan Nasional dan kurikulum yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, sehingga proses pendidikan akan kegiatan mengajar bernuansa islami, untuk kelanjutan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar maka anak asuh langsung melanjutkan ke tingkat SMP yaitu SMP Terpadu Budi Mulia. SMP Islam terpadu Budi Mulia mempunyai visi dan misi yaitu misi: Mewujudkan siswa insane beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudaya lingkungan yang islami, adapun misi yang di emban adalah agar siswa berkeyakinan yang kuat kepada rukun iman, membiasakan diri beribadah, sholat wajib diawal waktu dan terampil melaksanakan ibadah lainnya, berakhlak mulia kepada khalik dan makhluk Allah, seimbang antar ilmu dunia dan ilmu akhirat, membiasakan setiap materi pelajaran didasari dengan ayat Al Quran, mampu membahas Indonesia, Inggris dan Arab dengan baik, berusaha mendorong siswa cinta / rajin membaca buku bermanfaat, mampu mebumikan salam sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan berdirinya SMP Islam Terpadu Budi Mulia yaitu menerapkan ajaran islam untuk mendidik anak agar terbiasa melakukan sholat wajib, menghindari kekerasan antar pelajar, untuk mempersiapkan generasi muda beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan berbudaya lingkungan

yang islami. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Pendidikan Nasional dan kurikulum yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, sehingga proses pendidikan akan kegiatan mengajar bernuansa islami.

3.6. *LKSA/Panti Asuhan Bundo Saiyo*

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bundo Saiyo beralamat di Simpang SMA 13 Tanjung Aur RT 03/RW 04 Kelurahan Balai Gadong, kecamatan Koto Tengah Kota Padang didirikan tanggal 1 Desember 2006 Tlp (0751)-9444238. Landasan pendiriannya adalah keyakinan bahwa anak dititipkan kepada Allah SWT dan harus dibesarkan menjadi orang dewasa yang berakhlak mulia yang mencintai Allah dan Rasul-Nya sehingga dapat berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, agama, tanah air, dan negaranya sebagai anggota yang produktif. masyarakat. Selain yang disebutkan di atas, anak yatim, dhuafa, dan anak-anak yang teraniaya secara teratur berkeliaran di jalan-jalan mencari uang untuk membeli sesuap nasi. Beberapa berakhir sebagai pengemis dan lainnya sebagai musisi jalanan. Betapa mirisnya melihat semua ini, menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab masyarakat dalam situasi ini, sebagaimana tertuang dalam Bab 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., disebutkan dalam pasal 72 yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa (pasal 73).

Berdasarkan hal tersebut maka LKSA Panti Asuhan Bundo Saiyo didirikan atas rasa kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan menjaga anak-anak tersebut di atas sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Tujuan LKSA Bundo Saiyo dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan anak asuh adalah untuk menghasilkan manusia yang bertaqwa, berilmu, dan terampil dengan kecakapan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memiliki akhlak yang baik berdasarkan Al-Quran dan Al- hadits. Adapun tugas yang telah diselesaikan: Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang; Memberikan perlindungan dari kekerasan dan prasangka agar anak Indonesia dapat mewujudkan taraf hidup yang tinggi; Meningkatkan implementasi pengetahuan.

LKSA Bundo Saiyo dalam memberikan pengasuhan dilakukan oleh pendamping sosial bagi anak asuh yang tinggal di dalam panti. Pendamping sosial selalu memperhatikan perkembangan anak bagaimana kegiatan belajar anak asuh dan apabila ada tugas yang berkaitan dengan biaya maka anak asuh mengkomunikasikan kepada pendamping sosial. Demikian juga mengenai kegiatan di LKSA dinamika kelompok yang berkaitan dengan pembelajaran juga didampingi. Pendamping sosial mendorong anak asuh untuk aktif dan disiplin mengikuti kegiatan kelompok dan anak asuh ditekankan untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Anak asuh didorong untuk saling menolong dalam berbagai hal saling memperhatikan dan saling menyayangi yang dilandasi semangat kekeluargaan. Dan untuk pengasuhan anak diluar panti tetap dilakukan oleh orangtua/keluarganya hanya pihak panti memberikan bantuan/subsidi berupa uang untuk membantu biaya sekolah anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa LKSA merupakan institusi yang dibutuhkan oleh anak yang menyandang keterlantaran. Keberadaan LKSA telah memberikan penanganan terhadap anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan dan terhindar dari keterlantaran. Keberhasilan LKSA salah satu faktor yang turut menentukan adalah keberadaan pendamping sosial yang bertindak sebagai pengganti orangtua. Pendamping sosial menjalankan peran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah tercapai hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan fisik, kebutuhan pelayanan psikologis, kebutuhan pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak terlantar. Karya nyata pendamping sosial juga didorong oleh motivasi yang tinggi untuk menjalankan amal sholeh yang diperintahkan agama. Hal ini ditunjukkan adanya masa pengabdian yang dijalani dalam menjalankan sebagai pendamping sosial di LKSA usia pendamping sosial yang meskipun sudah memasuki usia lanjut (di atas 60 tahun) tetapi masih semangat memberikan pelayanan terhadap anak terlantar di LKSA.

5. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial untuk memberikan perhatian terhadap LKSA dengan meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimtek, serta perlu meninjau ulang besaran insentif yang diterima pendamping LKSA dilihat dari cakupan wilayah dampingan dan jumlah KPM yang didampingi. Untuk lembaga swasta yang konsen terhadap perlindungan anak bahwa perlu penguatan terhadap penguatan SDM dalam rangka untuk memenuhi hak-hak anak, dan untuk penerima manfaat lebih peka terhadap situasi dan kondisi terhadap ancaman penelantaran anak dan perlu diyakini bahwa tempat yang paling nyaman bagi anak adalah dekat dengan orang tua.

Daftar Pustaka

- Achlis, (1983). *Model-model Pendekatan Pekerjaan Sosial*, Bandung: STKS
- Arikunto Soeharsimi. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta Bina Aksara.
- Chatarina Rusmiyati, (2008). *Kemandirian Anak dalam Panti Asuhan*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Departemen Sosial RI, (1986). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar Melalui Panti Penyantunan Anak* Jakarta.
- Dorang Luhpuri, dkk. (2001). *Pekerja Sosial Medik dalam Setting Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
- Edi Suharto dkk, (2011). *Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Edi Suharto, (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: LPS- STKS.
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Edi Suharto, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsepsi dan Strategi Bahan Bacaan Pelatihan dalam Meningkatkan Kemampuan Para Pendamping Sosial Keluarga Miskin* (Tidak diterbitkan)
- Isbandi Rukminto Adi, (2005), *Intervensi Komunitas Pembangunan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press
- Isbandi Rukminto Adi, (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta: FISIP UI Press
- James Midgley. (1995). *Pembangunan Sosial : Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan*. Jakarta: Ditperta, Depag RI.
- Jim Ife and Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kementerian Sosial RI. (2010). *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2013), *Draft Permensos tentang Standar Nasional*, Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Kementerian Sosial. (2011), *Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial*, Jakarta: Bidang Integrasi Sisiak Sekjen Kementerian Sosial RI
- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor KE8/03/M.PAN/2004 tentang *Pelayanan Pengembangan Komunitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kementerian Aparatur Negara
- Muhidin Syarif. (1997). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Kopma STKS.
- Sainuddin, *Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan akhlak anak* (Magelang, Jayapress 2016)
- Soetarso. (1993). *Praktek Pekerjaan Sosial Edisi I*. Bandung: STKS.
- Sumarjo, (2008). *Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Pendamping Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan*, Bogor: LPPM IPB
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Wahyudin Sumpeno, (2005). *Kiat-kiat Memberdayakan Masyarakat Solo*: Kerjasama Yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief Service (CRS), Jakarta.
- Yusuf, Syamsu. 2012. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

***Structural Equation Modeling* untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual terhadap Kesehatan Mental Mahasiswi di Kota Surabaya**

Ireni Lusyanti Gili ¹  Moh Subhan Fajarulloh ¹  Maulivia Idham Choliq ² 

Moch. Iqbal Nasurulloh Al-Amin ¹  Alfisyahrina Hapsery ^{1*} 

¹ Jurusan Statistika, FST, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

² Jurusan Farmasi, FSK, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi: alfisyahrina@unipasby.ac.id ; Tel: (+62) +812-3107-343

Diterima: 1 Oktober 2022; 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan asusila yang melanggar hukum dan juga norma sosial yang terjadi di masyarakat. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat pelecehan seksual yang tergolong cukup tinggi di dunia. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan memberikan sumbangsih yang cukup tinggi dalam tingkat pelecehan di Indonesia. Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat pelecehan tertinggi memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kasus pelecehan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan instrumen penelitian adalah kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelecehan yang kerap kali terjadi pada mahasiswi adalah pelecehan verbal secara langsung dengan mayoritas pelaku pelecehan merupakan orang yang telah lama dikenal oleh korban. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan diantaranya adalah bentuk pelecehan seksual, gaya berpakaian korban dan kelainan seksual pelaku. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi kondisi psikologi mahasiswi sehingga menyebabkan kesehatan mental mahasiswi terganggu. Diperlukan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui penyuluhan sosial.

Kata kunci: pelecehan seksual, kesehatan mental, potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Abstract: *Sexual harassment is a form of immoral acts that violate the law and also social norms that occur in society. Indonesia is currently one of the countries with a fairly high rate of sexual harassment in the world. Sexual harassment that occurs in the educational environment contributes quite high to the level of harassment in Indonesia. East Java as the province with the highest level of harassment provides motivation for researchers to research cases of sexual harassment, especially in the university environment in the city of Surabaya. This study used non probability sampling with the research instrument being a questionnaire. Data analysis in this study used the Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) method. The results showed that the form of harassment that often occurs in female students is direct verbal abuse with the majority of harassers being people who have long been known by the victim. The factors that influence harassment include the form of sexual harassment, the victim's dress style and the perpetrator's sexual disorder. These three factors affect the psychological condition of female students, causing students' mental health to be disturbed. The role of potential and sources of social welfare is needed to prevent sexual harassment through social counseling.*

Keywords: *sexual harassment, mental health, potential and sources of social welfare*

1. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan asusila yang melanggar hukum dan juga norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan (Collier, 1998). WHO pada tahun 2021 menyebutkan bahwa yang menjadi pelaku paling umum kekerasan terhadap perempuan adalah suami atau pasangan dengan rasio 1 : 4. Selain itu sekitar 6% perempuan di seluruh dunia mengatakan pernah diserang oleh orang asing yang bukan suami ataupun pasangan mereka. Menurut data *World Population* negara yang memiliki jumlah kasus pelecehan seksual tertinggi di dunia adalah Afrika Selatan dengan sekitar 66.196 insiden pemerkosaan yang terjadi per 100.000 penduduk atau kurang lebih berkisar 66,0% insiden (Ramadhan, 2022).

Pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima (Collier, 1998) . Sedangkan ahli lain berpendapat pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Winarsunu, 2008). Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Pelecehan seksual ini bisa membawa dampak terhadap berbagai aspek terutama bagi kondisi kesehatan mental korban pelecehan (Shopiani et al., 2021). Menurut *American Psychological Association* (APA) kesehatan mental : *“as the presence of successful adjustment or the absence psychopatology”* dan *“as state in which there is an absence of dysfunction in psychological, emotional, behavioral, and social spheres.”* Artinya kesehatan mental adalah sebagai wujud adanya penyesuaian diri yang berhasil atau tidak adanya psikopatologi dan sebagai keadaan dimana seseorang digambarkan tidak memiliki gangguan pada bidang psikologis, emosional, perilaku dan sosial (Fakhriyani, 2019).

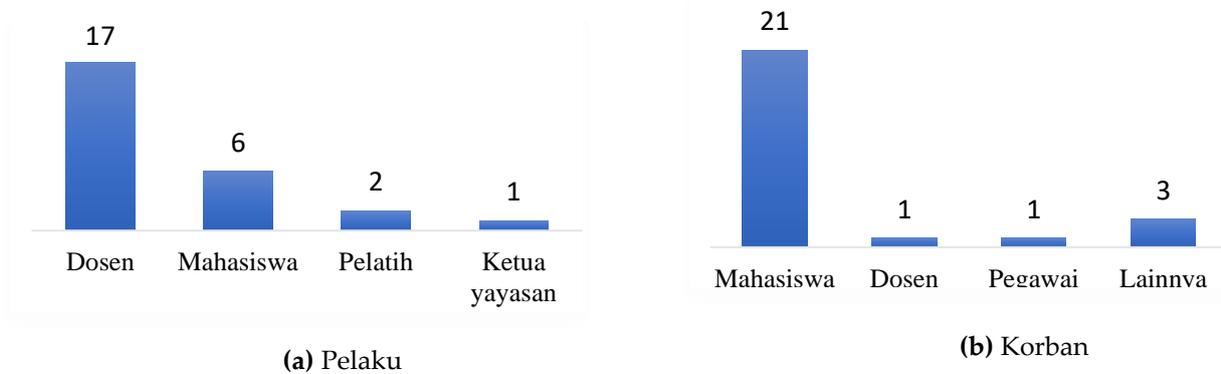
Hasil studi dari perusahaan riset *Value Champion Singapura* pada tahun 2019 menyebutkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara berbahaya untuk perempuan se-Asia Pasifik (DW, 2019). Hal ini sejalan dengan kondisi terkini yakni maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia yang terjadi pada tahun 2021. Kasus-kasus ini terjadi bahkan di tempat yang dianggap sebagai tempat yang aman yang tidak memungkinkan pelaku untuk menjalankan aksinya tersebut seperti sekolah, perguruan tinggi hingga tempat ibadah. Korban dari pelecehan seksual ini juga bervariasi dimulai dari anak dibawah umur hingga lansia. Berdasarkan data terbaru kasus pemerkosaan dan pencabulan meningkat 31,0% dalam lima tahun terakhir, kasus pemerkosaan dengan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak memiliki kasus pemerkosaan yaitu mencapai 99 desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Diantara banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, pelecehan seksual di lingkungan pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi menjadi kasus yang cukup banyak menyita perhatian. Hal ini ditandai dengan semakin seringnya muncul kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa yang terjadi pada akhir tahun 2021. Kemungkinan hal tersebut dipicu oleh pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi, sehingga menyebabkan mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual berani bersuara. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2015-2020 dari total 51 kasus kekerasan seksual dan diskriminasi, 26 diantaranya terjadi di lingkungan kampus/perguruan tinggi. Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual tertinggi dilakukan oleh dosen sedangkan paling rendah yaitu oleh ketua yayasan. Mahasiswa menjadi korban yang banyak menerima

*Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin,
Alfisyahrina Hapsery*

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswa Di Surabaya

tindakan pelecehan seksual dan paling sedikit dialami oleh dosen dan pegawai (Komisi Nasional Perempuan, 2020).



Gambar 1. Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual

Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2020

Bentuk pelecehan seksual tidak hanya berkaitan dengan fisik saja (Susantyo, 2016), melainkan segala sesuatu yang mengandung unsur seksualitas di dalamnya yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan terganggu. Menurut Unesco Pelecehan seksual membawa dampak yang buruk bagi korban yaitu meliputi dampak fisik, dampak psikologis dan dampak sosial (Fridha & Haryanti, 2020). Dampak psikologi yang terjadi akibat kasus pelecehan seksual dapat mempengaruhi kondisi mental dari korban yang dalam hal ini adalah mahasiswi. Menurut Notoesoedirjo dan Latipun (2005), terdapat beberapa cara dalam mendefinisikan mental yang sehat diantaranya adalah tidak mengalami gangguan mental, tidak jatuh sakit akibat stressor, sesuai dengan kapasitas dan selaras dengan lingkungannya, serta tumbuh dan berkembang secara positif (Bachtiar, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual dan pengaruh pelecehan seksual terhadap kesehatan mental korban.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah penentuan sampel atas dasar kebetulan responden bertemu dengan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Surabaya dengan melakukan kunjungan langsung kesana. Penelitian diawali dengan melakukan *screening* terhadap mahasiswi sehingga yang diperoleh sebagai sampel adalah mahasiswi yang pernah mengalami segala bentuk tindakan pelecehan seksual. Kemudian dari hasil tersebut akan dilanjutkan dengan memberi sejumlah pertanyaan kepada responden.

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswi di Surabaya dan didapatkan sebanyak 80 mahasiswi sebagai sampelnya. Adapun faktor-faktor yang diduga peneliti mempengaruhi tindakan pelecehan seksual yang berdampak pada kesehatan mental korban yang dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

	Variabel	Skala Pengukuran
Y1	Kondisi Psikologis Korban	Ordinal
Y2	Kesehatan Mental Korban	Nominal
X1	Bentuk Pelecehan Seksual	Ordinal

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

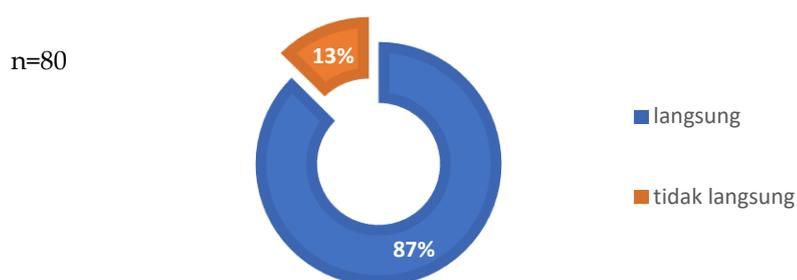
Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswi Di Surabaya

	Variabel	Skala Pengukuran
X2	Gaya Berpakaian Korban	Ordinal
X3	Kelainan Seksual Pelaku	Ordinal
X4	Lingkungan Pelaku	Ordinal
X5	Kepribadian Pelaku	Ordinal
X6	Prilaku Korban	Ordinal

Waktu penelitian dimulai dari kajian literatur untuk proposal penelitian hingga penyusunan laporan akhir penelitian dan jurnal penelitian terhitung dari Maret 2022 sampai dengan Desember 2022. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Model* (SEM). SEM adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dan indikatornya, variabel yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung (Hair et al., 2011; Kastanja, 2014). SEM digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki suatu model (Ullman & Bentler, 2012).

3. Hasil

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban. Pelecehan seksual kian marak terjadi dari waktu ke waktu, namun sebagian besar orang tidak menyadari bahwa dia menjadi salah satu korban pelecehan karena tidak mengenali ciri-ciri dari tindakan pelecehan seksual. Banyak anggapan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan pemerkosaan dan pencabulan, tetapi pada dasarnya pelecehan seksual tidak hanya itu saja bahkan ucapan bernada seksual juga termasuk dalam pelecehan. Komnas Perempuan menyatakan pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan baik melalui kontak fisik atau kontak non-fisik mengenai bagian tubuh seseorang atau seksualitasnya. Tindakan seperti siulan, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, memainkan mata, memberikan pesan atau chat pornografi, sentuhan pada bagian tubuh, isyarat atau gerakan berkonotasi seksual yang menyebabkan penerima tindakan merasa tidak nyaman, direndahkan, dipertunjukkan dan tersinggung merupakan bentuk dari pelecehan seksual.



Gambar 2. Pelecehan Seksual secara Langsung dan Tidak Langsung

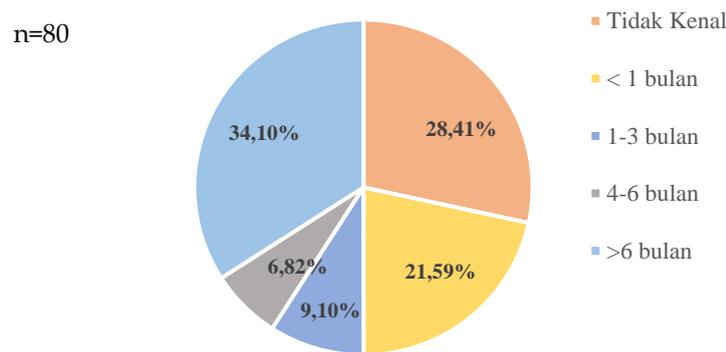
Berdasarkan Gambar 2. responden dari penelitian ini 87% diantaranya mengalami tindakan pelecehan seksual secara langsung yang diperjelas dengan pengakuan korban bahwa tindakan pelecehan tersebut banyak terjadi ketika sedang melakukan kegiatan kumpul bersama. Lebih banyak bentuk pelecehan yang diterima korban adalah pelecehan verbal namun tidak sedikit diantaranya sampai mengalami pelecehan fisik seperti disentuh, dirangkul, dipegang di area sensitif dan dicium tanpa persetujuan dari korban. Bahkan 10% dari korban menyatakan bahwa merasa diuntit dan mendapatkan penyerangan fisik seperti dipaksa hingga dipukuli. Sedangkan untuk 13%

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswa Di Surabaya

yang menerima pelecehan secara tidak langsung diantaranya yaitu berupa kiriman pesan bernuansa seksual, kiriman konten-konten pornografi dan pemaksaan untuk memberikan gambar atau video seksual korban. Hasil penelitian ini seiring dengan hasil survey Litbang Kompas yang menyatakan bahwa pelecehan tidak langsung di era industry 5.0 banyak terjadi melalui media sosial seperti Instagram dengan persentase 23%, 14% dari Whatsapp, 10% Snapchat, 9% dari Twitter dan Tiktok sebanyak 6% (Sinulingga, 2021)

Pelaku dari pelecehan seksual berdasarkan hasil penelitian kebanyakan berasal dari lingkungan korban atau orang terdekat korban. Ini bisa terjadi karena intensitas waktu untuk bertemu yang tinggi sehingga pelaku mendapatkan akses yang sangat luas untuk melakukan motifnya. Hal tersebut mengkonfirmasi hasil penelitian (Noviana, 2015; Probosiwi & Bahransyaf, 2015) bahwa pelaku tindak kekerasan seksual berasal dari orang terdekat. Pelaku sering kali menyalahgunakan kekuasaan dan otoritas untuk menyakinkan korban bahwa tindakan pelecehan yang dilakukannya adalah bentuk ungkapan rasa sayang dan sisi romatisme dari pelaku tersebut. Maka tak heran banyak korban yang tidak merasa dilecehkan bahkan mereka merasa bahwa dirinya sangat dicintai dan menganggap tindakan tersebut adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, dengan demikian mereka akan terbiasa dengan perlakuan yang diberikan pelaku. Hal tersebut disebabkan pengetahuan mengenai pelecehan seksual dan pengalaman pelecehan seksual masih sangat terbatas (Rusyidi et al., 2019). Lama waktu korban yang dalam hal ini mahasiswi mengenal pelaku pelecehan seksual ditunjukkan pada Gambar 3.

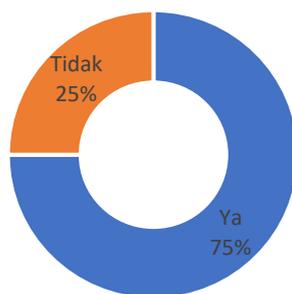


Gambar 3. Lama Waktu Korban Mengetahui Pelaku

Berdasarkan gambar 3 persentase tertinggi waktu korban dalam mengetahui pelaku adalah lebih dari enam bulan yaitu sebesar 34,10%, ini menandakan bahwa pelaku pelecehan memang berasal dari lingkungan yang sama dengan korban baik di lingkungan keluarga, kampus maupun masyarakat. Sebagian besar dari korban mengakui bahwa pelaku dari tindak pelecehan merupakan teman dan bentuk pelecehan yang sering diterima adalah guruan atau candaan yang mengaitkan dengan bentuk fisik sehingga korban sendiri merasa terganggu. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswi berupa menyapa melalui sms video call, dengan menggunakan kata sayang dan tidak jarang dilakukan pada malam hari (Nikmatullah, 2020). Beberapa juga mengatakan bahwa pelaku adalah pacar korban dan sering melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dengan dalih ungkapan rasa sayang dan cemburu. Selanjutnya persentase pelaku tertinggi kedua adalah orang tidak dikenal dengan persentase sebesar 28,41%. Korban menyatakan bahwa mereka kerap menerima kiriman pesan baik berupa chat, foto, maupun video yang memuat konten pornografi dari orang tidak dikenal atau bahkan anonim. Isi dari chat biasanya diawali dengan kalimat memuji, lalu kemudian pelaku biasanya akan meminta foto korban. Dalam hal ini foto yang diminta pelaku masih dalam konteks

wajar seperti foto *selfie* ataupun foto korban lainnya. Namun seiring berjalannya waktu pelaku mulai berani untuk meminta hingga memaksa korban untuk mengirimkan foto seksual dengan ancaman akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan korban. Bentuk tindakan lainnya dari pelecehan seksual yaitu apabila korban sedang berada di jalan yang sepi, pelaku yang merupakan orang asing akan menunjukkan alat kelaminnya kepada korban dan menikmati korban yang terlihat ketakutan.

Akibat dari segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual tentu saja membawa dampak negatif bagi korban.



n=80

Gambar 4 Persentase Pelecehan Seksual Mempengaruhi Mental Mahasiswi

Berdasarkan Gambar 4. menunjukkan mahasiswi atau korban mengakui bahwa pelecehan yang dialaminya berpengaruh terhadap kesehatan mental. Gejala yang ditimbulkan berupa kecemasan yang berlebihan, perasaan takut untuk bergabung di lingkungan masyarakat, memilih untuk menyendiri bahkan ada yang sampai melukai diri sendiri atau *self-harm* (Hikmawati, 2017). Beberapa dari mahasiswi tersebut mengaku pernah mengunjungi psikiater karena merasa panik berlebih dan tidak aman untuk menjalani kehidupan sehari – hari. Diantaranya juga ada yang sampai kehilangan motivasi hidup yang mana berarti gangguan kesehatan mental yang dideritanya sudah sangat berat dan perlu ditindak lanjuti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Bachtiar, 2022).

Hal yang dilakukan oleh mayoritas dari mahasiswi yang menjadi korban pelecehan adalah cenderung untuk memendam sendiri dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Ini dipicu oleh rasa takut yang muncul setelah kejadian dan ancaman yang diterima oleh korban apabila melaporkan peristiwa tersebut. Namun tidak sedikit juga yang memilih untuk menceritakan kepada orang yang dipercayai misalnya orang tua, teman ataupun pacar korban. Selain dampaknya terhadap kesehatan mental, pelecehan seksual juga menyebabkan beberapa cacat fisik pada korban seperti luka dan memar yang tidak jarang meninggalkan bekas di tubuh.

4. Pembahasan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pelecehan seksual yang di alami oleh mahasiswi dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental korban metode yang digunakan dalam melakukan analisis adalah *Structural Equation Modeling (SEM)* (Kastanja, 2014). SEM merupakan salah satu metode dalam analisis statistik multivariat. Dalam melakukan olah data dibangun model pengukuran dan model structural sehingga membuat SEM lebih rumit dibandingkan analisis regresi ataupun analisis jalur. Terdapat tiga proses dalam analisis menggunakan SEM diantaranya yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen (*confirmatory factor analysis*), pengujian model hubungan antara variabel (*path*

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin,
Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswi Di Surabaya

analysis), dan mendapatkan model yang cocok untuk predeksi (analisis model struktural dan analisis regresi). Pemodelan yang lengkap pada dasarnya terdiri dari model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*causal model*) (Widiyasaari, 2017). Hasil dari model pengukuran adalah penilaian terkait validitas dan validitas diskriman, sedangkan model struktural menghasilkan pemodelan dari hubungan faktor-faktor berdasarkan hipotesis yang dibuat sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling- Partial Least Square* (SEM-PLS). SEM-PLS atau SEM *non parametric* merupakan metode alternatif yang berbasis varians dan tidak membutuhkan asumsi. Dalam melakukan analisis semua tipe skala data baik rasio, ordinal, interval maupun nominal dapat digunakan dalam analisis ini. Kelebihan metode SEM – PLS adalah dapat memodelkan data dalam jumlah besar hingga data yang berukuran kecil (Robi et al., 2017). SEM – PLS pada penelitian ini digunakan untuk memprediksi atau memperoleh informasi pengaruh variabel laten eksogen yaitu pelecehan seksual terhadap variabel laten endogen yaitu kesehatan mental korban. SEM-PLS ini merupakan metode untuk variabel yang belum pasti terukur yang dalam analisisnya terdiri atas dua evaluasi yaitu evaluasi *outer model* dan evaluasi *inner model*.

4.1. Evaluasi Outer Model

Evaluasi outer model dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas suatu model. Maka dari itu evaluasi outer model terdiri atas dua tahap yaitu uji validitas untuk mengetahui kevalidan data yang kemudian dilanjutkan dengan mengukur konsistensi dari data yang diperoleh.

4.1.1 Uji Validitas

Untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian yang dalam hal ini kuisioner dapat mewakili pengukuran variabel dapat dilakukan pengujian dengan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator variabel valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan dua pengukuran yaitu, *convergent validity* dan *discriminant validity*.

Pada evaluasi outer model pengukuran *convergent validity* dilihat dari nilai *loading* antara variabel laten ke indikator. Nilai *outer model* dikatakan terpenuhi jika nilainya lebih besar dari 0,7. Jika dilihat dari Tabel 4.1 terdapat indikator yang dihapus dari suatu variabel dikarenakan memiliki nilai *loading* yang kurang dari 0,7.

Tabel 2. Outer Loadings

Indikator	Sebelum	Sesudah
Kiriman pesan konten pornografi (X1.2) dalam variabel Bentuk pelecehan (X1)	0,773	0,717
Sentuhan secara fisik (X1.3) dalam variabel Bentuk pelecehan seksual (X1)	0,790	0,825
Kekerasan seksual (X1.4) dalam variabel Bentuk pelecehan seksual (X1)	0,809	0,881
Gaya berpakaian korban menyebabkan rentan terjadinya kasus pelecehan (X2.1) dalam variabel Gaya berpakaian korban (X2)	0,848	0,882
Pelecehan sering terjadi pada mahasiswi modis (X2.2) dalam variabel Gaya berpakaian korban (X2)	0,863	0,891

Indikator	Sebelum	Sesudah
Resiko pelecehan tinggi pada mahasiswi berpakaian terbuka (X2.3) dalam variabel Gaya berpakaian korban (X2)	0,915	0,913
Pakaian terbuka mengundang gairah lawan jenis (X2.4) dalam variabel Gaya berpakaian korban (X2)	0,917	0,923
Pakaian tertutup menjamin tidak terjadi pelecehan (X2.5) dalam variabel Gaya berpakaian korban (X2)	0,522	
Pelaku adalah <i>hypersex</i> (X6.1) dalam variabel Kelainan seksual pelaku (X6)	0,895	0,895
Pelaku punya fetish aneh (X6.2) dalam variabel Kelainan seksual pelaku (X6)	0,763	0,763
Pelaku puas setelah melecehkan korban (X6.3) dalam variabel Kelainan seksual pelaku (X6)	0,894	0,894
Pelaku menikmati ketakutan korban (X6.4) dalam variabel Kelainan seksual pelaku (X6)	0,888	0,888
Kondisi Psikologis Korban (Y1)	1,000	1,000
Kesehatan Mental Korban (Y2)	1,000	1,000
Mendapat komentar seksual (X1.1) dalam variabel Bentuk pelecehan seksual (X1)	0,665	

Ketika nilai *loading factor* setelah dilakukan eliminasi menunjukkan nilai lebih dari 0,7 untuk semua indikator. Nilai *loading* merupakan nilai korelasi, yaitu menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator yang mengukur variabel laten tersebut. Apabila nilai *loading* lebih dari 0,7 menunjukkan indikator tersebut dapat diartikan berkontribusi untuk mengukur variabel laten. Sebaliknya ketika nilai *loading* kurang dari 0,7 maka indikator tersebut dianggap kurang mampu mengukur variabel laten. Hal ini ditunjukkan pada indikator X2.5 yaitu pakaian yang tertutup menjamin tidak terjadinya kasus pelecehan seksual. Artinya indikator X2.5 tidak cukup kuat mengukur variabel gaya berpakaian dapat mempengaruhi pelecehan seksual terhadap kesehatan mental korban sehingga indikator tersebut dibuang dari model. Beberapa berpendapat bahwa pakaian yang tertutup tidak menjamin seseorang tidak dilecehkan (Kusuma et al., 2021). Adanya perbedaan persepsi yang seimbang dari mahasiswi menyebabkan indikator tersebut tidak signifikan. Indikator kedua yang dieliminasi adalah indikator X1.1 yaitu jika seseorang mendapat komentar, gurauan, hinaan yang bernada seksual baik secara langsung maupun lewat sosial media termasuk dalam pelecehan seksual. Artinya beberapa orang berpendapat bahwa bentuk pelecehan seksual melalui media sosial memiliki tanggapan yang bervariasi sehingga indikator tersebut tidak signifikan. Sebagian dari mereka menganggap bahwa hinaan, gurauan dan komentar di dunia maya bukanlah bentuk pelecehan seksual karena dilakukan secara tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswi akan menganggap bentuk pelecehan terjadi melalui komunikasi langsung dan tindakan.

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin,
Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswi Di Surabaya

Indikator dari hasil eliminasi kemudian dilakukan pengukuran untuk mengetahui variansi dari data dengan melihat nilai *Average variance Extracted* (AVE). AVE digunakan sebagai syarat tercapainya validitas diskriminan. Nilai AVE pada Tabel 3. pada variabel laten menunjukkan nilai lebih dari 0,5 sehingga dikatakan memenuhi.

Tabel 3 Nilai Validitas dan Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Bentuk pelecehan seksual (X1)	0,744	0,796	0,851	0,657
Gaya berpakaian korban (X2)	0,924	0,930	0,946	0,815
Kelainan seksual pelaku (X6)	0,883	0,895	0,920	0,743

Berdasarkan Tabel 3 diatas, nilai AVE untuk variabel Bentuk pelecehan seksual sebesar $0,657 > 0,5$, untuk variabel Gaya berpakaian korban sebesar $0,815 > 0,5$, dan untuk variabel Kelainan Seksual Pelaku sebesar $0,743$ dimana nilai tersebut lebih besar dari $0,5$. Dengan demikian semua indikator dapat mengukur variabel bentuk pelecehan seksual, gaya berpakaian korban dan kelainan seksual pelaku.

Sedangkan untuk mengukur *discriminant validity* atau validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dan membandingkan akar AVE dengan korelasi atau bisa juga dengan membandingkan antar indikator dengan indikator lainnya. Suatu model memiliki validitas diskriminan yang cukup jika nilai akar AVE setiap indikator mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar indikator di dalam model.

Tabel 4. *Cross loadings* indikator pelecehan seksual

Indikator	Bentuk pelecehan seksual	Gaya berpakaian korban	Kelainan seksual pelaku	Kondisi psikologis korban	Kesehatan mental korban
Kiriman pesan konten pornografi (X1.2)	0,717	0,136	0,380	0,149	0,352
Sentuhan secara fisik (X1.3)	0,825	-0,060	0,087	0,278	0,496
Kekerasan seksual (X1.4)	0,881	-0,048	0,295	0,518	0,397
Gaya berpakaian korban menyebabkan rentan terjadinya kasus (X2.1)	-0,105	0,882	0,319	0,154	0,400
Pelecehan sering terjadi pada mahasiswi modis (X2.2)	0,075	0,891	0,434	0,289	0,426
Risiko pelecehan tinggi pada mahasiswi berpakaian terbuka (X2.3)	-0,018	0,913	0,384	0,192	0,482

Indikator	Bentuk pelecehan seksual	Gaya berpakaian korban	Kelainan seksual pelaku	Kondisi psikologis korban	Kesehatan mental korban
Pakaian terbuka mengundang gairah lawan jenis (X2.4)	-0,000	0,923	0,419	0,125	0,425
Pelaku adalah <i>hypersex</i> (X6.1)	0,307	0,412	0,895	0,133	0,419
Pelaku punya fetish aneh (X6.2)	0,276	0,141	0,763	0,207	0,246
Pelaku puas setelah melecehkan korban (X6.3)	0,240	0,448	0,894	0,298	0,431
Pelaku menikmati ketakutan korban (X6.4)	0,210	0,466	0,888	0,170	0,389
Kondisi psikologis korban (Y1)	0,423	0,215	0,240	1,000	0,609
Kesehatan mental korba (Y2)	0,485	0,482	0,462	0,609	1,000

Nilai *loading factor* pada indikator yang membentuk suatu variabel laten harus lebih tinggi dibanding nilai indikator yang membentuk pada variabel lain. Pada Tabel 5. indikator jika seseorang mendapat komentar, gurauan, hinaan yang bernada seksual baik secara langsung maupun lewat sosial media termasuk dalam pelecehan seksual (X1.2) terhadap bentuk pelecehan seksual (X1) memiliki nilai *loading factor* sebesar 0,717 dengan demikian nilai tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai *loading factor* pada baris yang sama untuk variabel laten gaya berpakaian korban (X2), kelainan seksual pelaku (X6), kondisi psikologis korban (Y1) dan kesehatan mental korban (Y2). Disamping itu, apabila kita memperhatikan variabel laten endogen mengalami hal yang sama yaitu indikator kesehatan mental korban, memiliki nilai yang besar terhadap variabel laten yang diukur yaitu sebesar 1,000 jika dibandingkan dengan variabel laten yang lain.

Tabel 5. Perbandingan nilai AVE dengan korelasi

	Bentuk pelecehan seksual	Gaya berpakaian korban	Kelainan seksual pelaku	Kondisi psikologis korban	Kesehatan mental korban
Bentuk pelecehan seksual (X1)	0,811				
Gaya berpakaian korban (X2)	-0,010	0,903			
Kelainan seksual pelaku (X6)	0,298	0,433	0,862		
Kondisi psikologis korban (Y1)	0,423	0,215	0,240	1,000	
Kesehatan mental korban (Y2)	0,485	0,482	0,462	0,609	1,000

Pada Tabel 5. menunjukkan pengukuran validitas diskriminasi dengan membandingkan akar AVE pada setiap indikator dan korelasinya. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai akar AVE untuk variabel bentuk pelecehan seksual (X1) sebesar 0,881 memiliki nilai yang lebih tinggi

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswa Di Surabaya

dibandingkan nilai korelasi dengan variabel lain misalnya korelasi dengan gaya berpakaian korban (X2) yaitu sebesar -0,010. Nilai akar AVE dapat dilihat dalam tabel yaitu berada di diagonal tabel sedangkan untuk korelasinya berada di kolom dan baris tabel. Sehingga nilai akar AVE untuk gaya berpakaian korban (X2) adalah 0,903 , kelainan seksual pelaku (X6) yaitu 0,862 , kondisi psikologis korban (Y1) yaitu 1,000 dan kesehatan mental korban (Y2) yaitu 1,000.

4.1.2 Uji Reliabilitas.

Untuk mengetahui keakuratan hasil dari konsistensi mahasiswi dalam menjawab pertanyaan seluruh indikator dalam variabel laten maka dilakukan pengujian reliabilitas. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan konsisten dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan menggunakan composite reliability dan melihat nilai cronbach's alpha. Indikator suatu variabel laten dikatakan reliabel jika memiliki composite reliability lebih dari 0,6. Berdasarkan Tabel 3. nilai composite reliability untuk variabel bentuk pelecehan seksual adalah 0,796 , gaya berpakaian korban adalah 0,930 dan kelainan seksual pelaku adalah 0,896. Bisa terlihat bahwa ketiga variabel laten tersebut memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,6 sehingga bisa dikatakan indikator keseluruhan variabel bersifat reliabel.

Selain itu untuk mengetahui kerielabelan suatu varabel dapat menggunakan nilai Cronbach's alpha. Syarat bahwa indikator dikatakan reliabel adalah Cronbach's alpha memiliki nilai lebih dari 0,7. Tabel 3. menunjukkan nilai Cronbach's alpha masing-masing variabel adalah 0,744 untuk variabel bentuk pelecehan seksual, 0,924 untuk variabel gaya berpakaian korban dan 0,883 untuk variabel kelainan seksual pelaku. Nilai tersebut menandakan bahwa indikator pembentuk variabel – variabel tersebut konsisten karena memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7.

4.2. Evaluasi Inner Model

Evaluasi ini bertujuan membentuk model struktural untuk melihat hubungan sebab-akibat antar variabel laten dalam penelitian. Untuk melihat kebaikan model yang terbentuk dapat melalui R-Square, nilai Q-Square, Goodness off fit, dan pengujian hipotesis. Untuk mengetahui apakah model dikatakan baik maka dapat dilihat melalui nilai *R-square*.

Nilai R square digunakan untuk menilai kebaikan model antara variabel laten eksogen dengan variabel endogennya secara individu. Dalam studi untuk mengetahui pengaruh pelecehan seksual terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental mahasiswi nilai R- square dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 6. Model tructural

	R-square	R-square adjusted
Kondisi psikologis korban (Y1)	0.185	0.156
Kesehatan mental korban (Y2)	0.609	0.590

Pada Tabel 6. dapat disimpulkan bahwa kebaikan model dipengaruhi oleh pelecehan seksual terhadap kondisi psikologi korban yaitu mahasiswi masih tergolong rendah karena memiliki nilai R-square sebesar 0,228 atau 22,80%. Sedangkan kebaikan model untuk kesehatan mental korban akibat pengaruh dari pelecehan seksual dapat dikatakan baik yang ditandai dengan nilai R-square yaitu 0,600 atau 60,90% yang mana sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya adalah penilaian kebaikan model secara keseluruhan antara variabel laten dilakukan dengan nilai Q-square yang merupakan nilai kebaikan model gabungan dari variabel laten endogen.

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswi Di Surabaya

$$Q - square = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_1^2) = 0,68133$$

(1)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Q-square di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel laten diantaranya bentuk pelecehan seksual, gaya berpakaian korban dan kelainan seksual pelaku memberikan pengaruh yang kuat terhadap kondisi psikologis korban dan kesehatan mental korban yaitu mahasiswi di Surabaya. Nilai Q-square yaitu 0,68133 atau 68,13% menandakan variabel laten eksogen secara kuat berpengaruh terhadap variabel laten endogen.

Untuk mengukur kebaikan model pada keseluruhan model struktural yang terbentuk dimulai dari indikator ke variabel laten dan antar variabel laten dapat menggunakan penilaian *Goodness of Fit*. Penilaian *goodness of fit* dari model diatas adalah sebagai berikut :

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

(2)

$$GoF = \sqrt{0,758 \times 0,397} = 0,581$$

Hasil penilaian GoF mendapatkan nilai 0,581 yang mana termasuk dalam GoF yang tinggi. Nilai 0,581 tersebut memiliki arti bahwa model struktur terbentuk dalam penelitian ini dapat menjelaskan data empiris atau data lapangan.

Pengujian hipotesis (path) dalam penelitian ini menggunakan *resampling bootstrap* dan diperoleh pengaruh langsung variabel laten terhadap model seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 7.

Tabel 7 Direct Model

	Original Sample (O)	Mean Sample (M)	stdev	t	p -value
Bentuk pelecehan seksual (X1) terhadap Kondisi psikologis korban (Y1)	0,344	0,340	0,125	2,762	0,006
Bentuk pelecehan seksual (X1) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,318	0,316	0,084	3,800	0,000
Gaya berpakaian korban (X2) terhadap Kondisi psikologi korban (Y1)	0,216	0,212	0,153	1,410	0,159
Gaya berpakaian korban (X2) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,311	0,316	0,092	3,373	0,001
Kelainan seksual pelaku (X6) terhadap Kondisi psikologis korban (Y1)	0,005	0,016	0,131	0,037	0,971
Kelainan seksual pelaku (X6) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,105	0,109	0,097	1,083	0,279

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswi Di Surabaya

	Original Sample (O)	Mean Sample (M)	stdev	t	p -value
Kondisi psikologis korban (Y1) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,385	0,369	0,085	4,541	0,000

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui :

1. Bentuk pelecehan seksual berpengaruh terhadap kondisi psikologis mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 2,762 dan p value sebesar 0,006.
2. Bentuk pelecehan seksual berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 3,800 dan p value sebesar 0,000.
3. Gaya berpakaian korban tidak berpengaruh terhadap kondisi psikologis mahasiswi berpengaruh diketahui dari nilai statistik uji sebesar 1,410 dan p value sebesar 0,159.
4. Gaya berpakaian korban berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 3,373 dan p value sebesar 0,001.
5. Kelainan seksual pelaku tidak berpengaruh terhadap kondisi psikologis mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 0,037 dan p value sebesar 0,0971.
6. Kelainan seksual pelaku tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswi diketahui nilai statistik uji sebesar 1,083 dan p value sebesar 0,279.
7. Kondisi psikologis mahasiswi berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 4,541 dan p value sebesar 0,000.

Sehingga model yang dapat terbentuk adalah :

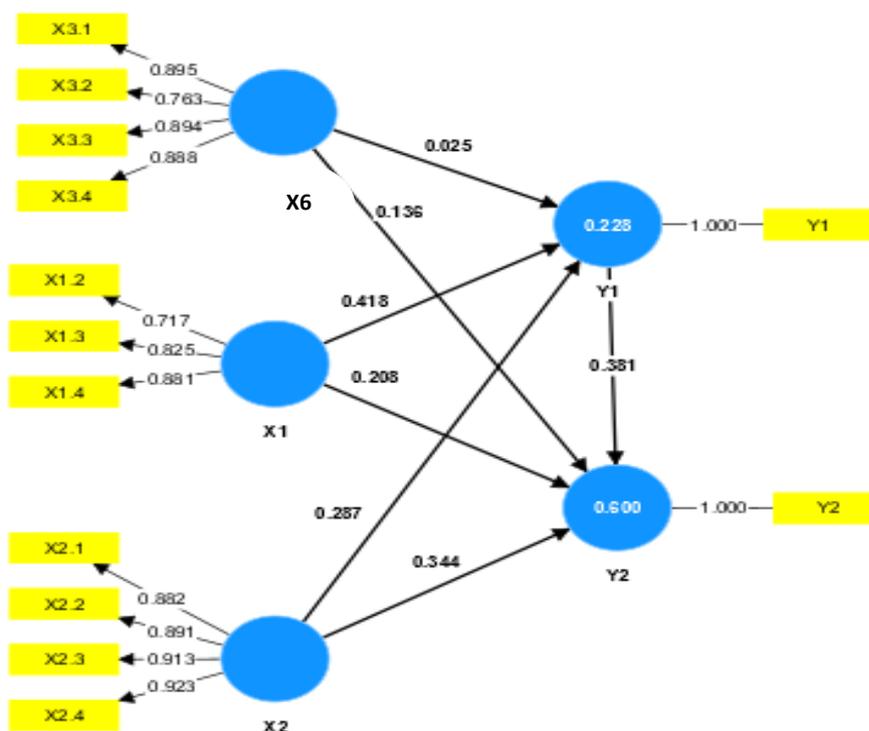
$$\begin{aligned}
 \text{Kondisi psikologis mahasiswi} &= 0,344 X_1 \\
 \text{Kesehatan mental mahasiswi} &= 0,318 X_1 + 0,311 X_2 + 0,385 Y_1 \\
 &(2)
 \end{aligned}$$

Selain model langsung, terdapat pula model tidak langsung dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh tabel 7.

Tabel 7. Indirect Model

	Original Sample (O)	Mean Sample (M)	stdev	t	p -value
Bentuk pelecehan seksual (X1) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,132	0,127	0,059	2,236	0,025
Gaya berpakaian korban (X2) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,083	0,075	0,055	1,499	0,134
Kelainan seksual pelaku (X6) terhadap Kesehatan mental korban (Y2)	0,002	0,008	0,049	0,038	0,970

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui : Bentuk pelecehan seksual berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswi diketahui dari nilai statistik uji sebesar 2,236 dan p value sebesar 0,025.



Gambar 5. Model Struktural

Sehingga model struktural yang dapat terbentuk berdasarkan hasil pengujian terlihat pada Gambar 5 yang menunjukkan model struktural pengaruh pelecehan seksual terhadap kesehatan mental korban dengan variabel laten yang mempengaruhi yaitu bentuk pelecehan seksual (X1), gaya berpakaian korban (X2) dan kelainan seksual pelaku (X6).

Setelah mengetahui model struktural pengaruh pelecehan seksual terhadap kesehatan mental korban maka dapat dirumuskan upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelecehan seksual sehingga tidak mengganggu kesehatan mental mahasiswa. Upaya pencegahan tersebut dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Habibullah, 2017) yang selama ini jarang melakukan kegiatan di kampus. Pelibatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam upaya pencegahan pelecehan seksual dapat bersifat relawan sosial (Habibullah, 2021) yang berasal dari civitas kampus itu sendiri. Salah satu kegiatan untuk pencegahan pelecehan seksual dapat dilakukan melalui penyuluhan sosial. (Sugiyanto et al., 2018)

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Pengaruh kasus pelecehan terhadap kesehatan mental mahasiswa disebabkan oleh tiga faktor diantaranya adalah bentuk pelecehan seksual, gaya berpakaian mahasiswa dan kelainan seksual pelaku. Bentuk pelecehan yang berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental mahasiswa, gaya berpakaian mahasiswa ternyata juga berpengaruh terhadap tindakan pelecehan seksual sehingga berpengaruh pula terhadap kesehatan mental mahasiswa tersebut serta kelainan seksual pelaku dari tindak pelecehan seksual berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Selain itu, kondisi psikologi mahasiswa yang terganggu akibat dari pelecehan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan mental mahasiswa yang menjadi korban.

Ireni Lusiyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswa Di Surabaya

Model struktural yang terbentuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y1 = 0,344 X1$$

$$Y2 = 0,318 X1 + 0,311 X2 + 0,385 Y1$$

Yang mana model diatas dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh pelecehan seksual terhadap kondisi psikologis mahasiswi serta kesehatan mental mahasiswi korban pelecehan seksual.

6. Saran

Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual diperlukan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selama ini kurang menyentuh kegiatan di kampus. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial tersebut bersifat relawan sosial dan kegiatan penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah terjadi pelecehan seksual. Upaya ini bisa dilakukan dengan peninjauan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pelecehan seksual. Pihak kampus agar lebih memberi perhatian khusus kepada kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus seperti pembentukan Satgas yang bertugas untuk mengawasi kasus tersebut. Serta untuk pihak Komnas Perempuan dapat memberikan edukasi kepada mahasiswi terkait seperti apakah pelecehan seksual agar mahasiswi menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar sehingga meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Menambahkan variabel-variabel baru yang diduga dapat mempengaruhi pelecehan seksual terhadap kesehatan mental korban.
2. Menambahkan indikator-indikator pada variabel laten terutama untuk variabel endogen dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil dan model yang lebih baik.
3. Menambahkan jumlah responden untuk mendapatkan data yang lebih variasi.

Ucapan terima kasih: Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penelitian hingga penyusunan laporan penelitian ini : 1) Seluruh mahasiswi yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, 2) Alfisyahrina Hapsery S.Si., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian, 3). Habibullah, S.Sos,M.Kesos Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah memberikan pembimbingan dalam penulisan jurnal ilmiah 4) Segala pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang membantu penelitian ini baik secara moral dan moril serta membantu dalam proses pengambilan data penelitian.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Y. A. (2022). *Bimbingan Konseling Terhadap Kesehatan Mental Korban Pelecehan Seksual Pada Kalangan Remaja Di WCC Mawar Balqis Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 BKI.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kriminal 2021*.
- Collier, R. (1998). Pelecehan seksual: Hubungan dominasi mayoritas dan minoritas. *Yogyakarta: Tiara Wacana*.
- DW. (2019). *Indonesia Negara yang Tidak Aman bagi Perempuan?* DW. <https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351>
- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan Mental* (Vol. 124). Duta Media Publishing.
- Fridha, M., & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education sebagai pencegahan terhadap kekerasan seksual pada siswa-siswi SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 4(1), 53–60.
- Habibullah, H. (2017). Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. *Sosiokonsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v6i2.713>

- Habibullah, H. (2021). Dimensi Keterlibatan Relawan Sosial Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 1–12.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Hikmawati. (2017). *Analisis Faktor Adaptasi Sosial Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Mahasiswa Baru Pendaftar Di PSIK Universitas Muhammadiyah Malang*. University of Muhammadiyah Malang.
- Kastanja, L. I. (2014). *Structural Equation Modeling Spasial Berbasis Varian (SEM-PLS Spasial) untuk Pemodelan Status Risiko Kerawanan Pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Komisi Nasional Perempuan. (2020). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. <https://komnasperempuan.go.id/>, 1–3. [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN \(27 Oktober 2020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_KEKERASAN_SEKSUAL_DI_LINGKUNGAN_PENDIDIKAN_(27_Oktober_2020).pdf)
- Kusuma, A. P. U., Nasution, A., & Nasution, A. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Di SMA Muhammadiyah Kota Bogor. *Promotor*, 4(3), 192–198.
- Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. *QAWWAM*, 14(2), 37–53.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Proboiswi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>
- Ramadhan, A. (2022). *Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>
- Robi, M., Kusnandar, D., & Sulistianingsih, E. (2017). Penerapan Structural Equation Modeling (SEM) Untuk Analisis Kompetensi Alumni. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 6(02).
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas*, 11(1), 940–955.
- Sinulingga, M. (2021). *Pelecehan Seksual Online Sering Terjadi di Media Sosial*. Adv.Kompas.Id. <https://adv.kompas.id/baca/pelecehan-seksual-online-sering-terjadi-di-media-sosial/>
- Sugiyanto, S., Suradi, S., Sitepu, A., Mujiyadi, B., Nainggolan, T., Susantyo, B., Irmayani, I., & Habibullah, H. (2018). Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI*.
- Susantyo, B. (2016). Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. *Sosio Konsepsia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.381>
- Ullman, J. B., & Bentler, P. M. (2012). Structural equation modeling. *Handbook of Psychology, Second Edition*, 2.
- Widiyasaari, R. (2017). Penggunaan Metode Structural Equation Modeling untuk Analisis Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa FIP UMJ. *Jurnal Pendidikan Matematikadan Matematika*, 3(2).
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi keselamatan kerja*. UMMPress.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Ireni Lusyanti Gili, Moh Subhan Fajarulloh, Maulivia Idham Choliq, Moch Iqbal Nasurulloah Al-Amin, Alfisyahrina Hapsery

Structural Equation Modeling Untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Kesehatan Mahasiswa Di Surabaya

Board Game: Cara Pembelajaran yang Menyenangkan bagi Orang Dewasa

Wustari L. Mangundjaya ^{1*}  Seta A. Wicaksana ²  Callista Hapsari Almira Inez Erysa ³ 

¹ Faculty of Psychology, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Faculty of Psychology, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

³ Faculty of Psychology, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

* Korespondensi: wustari.larasati@dsn.ubharajaya.ac.id ; Tel: (+62) 811-871-903

Diterima: 1 November 2022; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Pengembangan SDM memerlukan adanya perubahan pendekatan sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini setiap individu harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini serta berkompetisi dengan sehat. Pada era revolusi Industri 4.0 kompetensi merupakan hal yang esensial, sehingga setiap individu harus mempelajari kompetensi baru. Meskipun demikian, proses pembelajaran merupakan proses yang kompleks, tidak dapat demikian saja dilakukan. Dalam hal ini, *boardgame* dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu individu, khususnya orang dewasa dalam mempelajari kompetensi baru maupun meningkatkan keterampilan yang sudah dimilikinya. Studi ini menggunakan 120 partisipan yang terdiri dari 60 partisipan karyawan dan 60 partisipan mahasiswa. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas *boardgame* sebagai salah satu alat/metode pelatihan bagi orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *boardgame* adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk orang dewasa mempelajari hal-hal baru dengan menyenangkan, dan memperoleh hasil pembelajaran yang efektif.

Kata kunci: *boardgame*, pelatihan, proses belajar orang dewasa,

Abstract: Human development needs are shifting as the effect of Industry Revolution 4.0. People need to gain more competencies to be accelerating with the current condition and compete in this era. In Industry 4.0, competencies are essential, so people must acquire and learn new competencies. However, learning is not a one-way round; it is a complex process that needs to emerge within themselves. In this sense, board games can be utilized to help people learn new competencies and enhance their capacity. This study consists of 120 participants, 60 participants from employees, and 60 participants from college students. The results showed that board games could be utilized as a learning method that is fun, challenging, and engaging for participants. Board games are great tools to use as they follow the andragogy assumptions, positively impacting learning. This study aims to give scientific studies on the use of board games in human development settings and board games, helping people seize their opportunities in Industry 4.0. This paper will discuss the effectiveness of board games as an educational tool in people's development.

Keywords: Boardgame, Training, Adult Learning,

1. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh penggunaan berbagai *internet of things* (IoT), *cyber-physical items* (CPS), *information and communication technology* (ICT), dan *enterprise architecture* (EA) (Lu, 2017; Qin, Liu, & Grosvenor, 2016; Zhou, Liu, & Zhou, 2016). Hal ini semua menciptakan suatu ekosistem dimana teknologi berada dimana saja melalui berbagai interaksi, dan integrasi antara manusia, mesin dan internet dalam rangka menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas (Liao dkk, 2017; Lu, 2017; Vaidya, Ambad, & Bhosle, 2018). Perspektif baru tersebut menghasilkan perubahan pada berbagai aspek dari kehidupan, baik sosial, ekonomikal, dan situasi politik (Lasi dkk, 2014). Hal ini juga berdampak pada perubahan tuntutan dari aktivitas manusia dan tugas-tugas yang dikerjakannya (Gorecky dkk, 2014). Akibatnya, manusia perlu melakukan perubahan dan beradaptasi untuk dapat mengaplikasikan potensi dari dampak Revolusi Industri 4.0 tersebut (Schmidt dkk., 2015).

Dengan perkembangan teknologi yang cepat tersebut, maka mesin tidak lagi dapat dioperasikan oleh karyawan dengan keterampilan yang telah dimilikinya selama ini, karena keterampilan tersebut sudah usang dan tidak dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang ada. Hal ini mengakibatkan adanya pengangguran teknologikal. Hal ini juga mengakibatkan perlunya melakukan perubahan di organisasi baik dalam hal uraian jabatan, kebutuhan persyaratan pekerjaan baik dalam hal pendidikan, keterampilan, sikap kerja maupun dalam hal pengembangan karyawan (Benesova & Tupa, 2017; Bonekamp & Sure, 2015; Hecklau dkk, 2016; Roblek, Meško, & Krapez, 2016; Shamim dkk, 2016). Dengan perkataan lain, peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan penguatan keterampilan (*reskilling*) diperlukan.

Setiap individu harus dapat merubah dirinya menjadi pembelajar sepanjang jaman, serta selalu berusaha mengembangkan keterampilan baru untuk dapat memenuhi tuntutan yang ada (Zhou, Liu & Zhou, 2016). Dalam hal ini, 4 (empat) domain kompetensi yaitu: kompetensi sosial, kompetensi metodologikal, kompetensi personal dan kompetensi teknikal menjadi satu dengan adanya Industri 4.0 (Hecklau dkk., 2016). Salah satu kompetensi yang juga penting pada era ini adalah kapabilitas melakukan inovasi (Lasi dkk, 2014), berkoordinasi, kreativitas, kemampuan analitikal, fleksibilitas, keterampilan membangun jejaring, keterampilan berkomunikasi (Hecklau dkk, 2016), berpikir strategi (Ras dkk., 2017), pengambilan keputusan strategis dan keterampilan pemecahan masalah yang fleksibel (Gorecky dkk., 2014).

Sementara itu, untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada setiap individu juga perlu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan sikap kerja baru melalui program pembelajaran dan pengembangan (Henschke, 2016). Dalam hal ini, orang dewasa tidak seperti anak-anak dimana tidak lagi belajar dengan cara disuapi oleh gurunya. Proses belajar orang dewasa atau biasa disebut dengan andragogi, di representasikan dengan cara belajar mandiri, memotivasi diri sendiri, dan memiliki karakteristik pemecahan masalah (Bryan, Musgrove & Powers, 2017; Knowles, 2013; Rothwell, 2008). Dengan menggunakan prinsip andragogi tersebut, hal ini akan memberikan manfaat kepada proses belajar orang dewasa karena orang dewasa pada umumnya belajar melalui pengalamannya sendiri dan hal ini mampu menjembatani aspek kognitif, afektif dan perilaku (Hagen & Park, 2016; Mackerache, 2004). Beberapa tehnik yang digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa antara lain adalah bermain peran (*role-play*), diskusi kelompok, dan pembelajaran berdasarkan penyelesaian masalah (*problem-based learning*) (Forrest III & Peterson, 2006). Meskipun demikian, tidak semua metode pembelajaran orang dewasa tersebut dapat membantu kepemilikan pengetahuan dan keterampilan baru, karena metode belajar dan kondisi yang ada tidak dapat memfasilitasinya dengan baik (Koster, 2014; Rothwell, 2008). Hal ini memunculkan adanya kebutuhan untuk memperoleh metode lain yang menarik dan menyenangkan yang dapat membantu orang dewasa dalam meningkatkan kompetensinya (Fullerton, 2015).

Praktek dilapangan maupun riset terdahulu membuktikan bahwa dengan pendekatan metode pembelajaran yang konvensional, banyak partisipan pelatihan yang kehilangan motivasi dan minatnya untuk belajar (Zichermann & Cunningham, 2011). Selain itu, para pendidik, pelatih dan fasilitator pada era modern seperti saat ini juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada untuk meyakinkan bahwa metode pembelajarannya adalah sudah sesuai dengan tuntutan saat ini. (Mee Mee

dkk., 2022). Disisi lain, untuk dapat menjadi pembelajar yang sukses, maka pembelajar harus dapat mandiri dan mampu memonitor kemajuan proses pembelajarannya (Kingsley & Grabner-Hagen, 2015).

Untuk mengatasi masalah ini, permainan papan (*boardgame*) dapat menjadi salah satu alternatif untuk digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa (Taspinar, Schmidt & Schuhbauer, 2016). Dengan menggunakan *boardgame*, diharapkan kebutuhan alat pembelajaran yang menyenangkan serta melibatkan partisipan dapat terpenuhi, yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi peserta untuk mengikuti proses pembelajaran secara antusias, dan akhirnya akan dapat memperoleh hasil pembelajaran yang efektif. Hal ini disebabkan karena bila berdasarkan prinsip andragogi, maka *boardgame* dapat membuat partisipan terbenam dalam proses pembelajaran tersebut dan memberikan perasaan pengendalian diri, motivasi diri dan aktivitas penyelesaian masalah.

Boardgame adalah suatu instrumen yang terbuat bisa secara fisik maupun digital yang pada umumnya menggunakan papan, kartu, dadu, dan token lainnya dalam memainkannya (Rogerson, Gibbs, & Smith, 2015). Dalam hal ini, fasilitator/instruktur dapat menciptakan *boardgame* yang baru atau membeli *boardgame* yang ada di tempat penjualan berbagai permainan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Boardgame sendiri sudah ditemukan lebih dari satu dekade untuk proses pengembangan diri. Meskipun demikian, *boardgame* pada saat ini masih kurang populer dan masih jarang digunakan sebagai alat pembelajaran, dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan bermain. Hal ini disebabkan karena banyak yang belum memahami manfaat dari *boardgame* (Treher, 2011). Berbagai manfaat dari penggunaan *boardgame* pada proses pembelajaran orang dewasa adalah peningkatan alih belajar (*transfer of learning*) pengetahuan dan meningkatkan komunikasi diantara partisipan (Treher, 2011). Manfaat lain dari *boardgame* juga menunjang kebutuhan pengembangan individu dalam beradaptasi pada Revolusi Industri 4.0. Tujuan dari penelitian dan makalah ini adalah untuk membahas mengenai *boardgame* sebagai salah satu cara/metode yang dapat digunakan pada proses belajar orang dewasa.

Permainan adalah alat yang dipakai oleh pendidik, pelatih maupun fasilitator untuk meningkatkan hasil pembelajaran diberbagai area (Mee Mee, 2021). Penggunaan permainan didalam ruang atau kelas termasuk didalamnya meningkatkan ketepatan dan kecepatan penghitungan akan dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, keinginan untuk membantu dan adaptabilitas (Barr, 2017). Selain itu, permainan dapat pula meningkatkan motivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik (Kuo & Chuang, 2016) yang dapat menghasilkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan baru yang harus dikuasai oleh seseorang. Lebih lanjut, Kuo dan Chuang (2016) menyatakan bahwa melalui berbagai permainan pembelajar akan dapat melakukan improvisasi yang akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan teknis untuk kepentingan dirinya. Kapp (2012), mendefinisikan gamifikasi (*gamification*) sebagai permainan yang berdasarkan atas pemikiran, mekanik, dan memiliki estetika untuk dapat membuat seseorang tertarik dan termotivasi, serta mempromosikan pembelajaran dan menyelesaikan masalah (Kapp, 2012). Definisi ini melibatkan berbagai komponen penting dari andragogi. Pertama, gamifikasi adalah mempromosikan pembelajaran. Kedua, gamifikasi adalah permainan yang dinamis yang terfokus pada berbagai elemen yang memungkinkan adanya interaksi sosial antar pemain. Ketiga, gamifikasi akan dapat membangun motivasi dan keterikatan (Alsawaier, 2018). Keempat, definisi tersebut menekankan pada keterampilan berpikir kritis (Kapp, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *boardgame* merupakan salah satu metode gamifikasi yang sesuai dengan aktivitas pengembangan individu. Karakteristik dari *boardgame* adalah menyenangkan, menantang, dinamis dan memungkinkan adanya interaksi sosial serta kerjasama sesama peserta. Selain itu pula, gamifikasi dapat memunculkan motivasi dan keterikatan pada program atau aktivitas pelatihan (Alsawaier, 2018). Hal ini semua merupakan keuntungan dari *boardgame*. Dengan perkataan lain, teknik gamifikasi secara positif memiliki dampak terhadap program pembelajaran.

Individu memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru melalui proses pembelajaran dan pengembangan (Henschke, 2016). Sementara itu, proses belajar orang dewasa yang biasa disebut dengan andragogi selalu dihubungkan dengan motivasi diri, pengarahan diri dan penyelesaian masalah, yang tidak lagi dibimbing oleh para guru (Knowles, 2013; Rothwell, 2008). Hal ini membuat

Wustari L. Mangundjaya, Seta A. Wicaksana, dan Callista Hapsari Almira Inez Ersya
Board Game: Cara Pembelajaran Yang Menyenangkan Bagi Orang Dewasa

penggunaan prinsip andragogi akan dapat menguntungkan proses belajar orang dewasa, dimana orang dewasa bisa membawa pengalamannya dalam proses pembelajaran, yang dapat membantunya dalam menangkap berbagai konsep baik kognitif, afektif dan perilaku (Hagen & Park, 2016; Mackerache, 2004). Meskipun demikian metode yang sering digunakan untuk proses pembelajaran orang dewasa saat ini kurang dapat membantu individu menangkap konsep baru, karena metode yang digunakan tidak dapat memfasilitasi proses tersebut (Forrest III & Peterson, 2006; Rothwell, 2008). Kondisi tersebut memunculkan adanya kebutuhan untuk menggunakan metode baru yang menyenangkan untuk membantu orang dewasa meningkatkan kapabilitasnya (Fullerton, 2015).

Terdapat beberapa manfaat dari gamifikasi sebagai berikut (Mangundjaya & Wicaksana, 2022; Treher, 2011): 1) Pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Dengan bermain menggunakan *boardgame* pembelajar dapat mengalami perasaan gembira dan senang yang diikuti oleh antusiasme yang tinggi selama permainan sehingga dapat menciptakan keterikatan yang tinggi, yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan; 2) Merupakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Gamifikasi menciptakan lingkungan pembelajaran secara informal, sehingga dapat membantu pembelajar mempraktekkan situasi kehidupan nyata; 3) Umpan balik segera. Gamifikasi memberikan umpan balik secara cepat sehingga pembelajar mengetahui apa yang harus dirubah dalam dirinya, apa yang telah dipelajarinya dan apa yang seharusnya dipelajarinya. 4) Merangsang munculnya perubahan perilaku. Gamifikasi dapat mengarahkan perubahan perilaku secara signifikan, khususnya bila dikombinasikan dengan prinsip ilmiah, misalnya dikombinasikan dengan prinsip pengulangan secara teratur atau dengan adanya waktu jeda tertentu. 5) Gamifikasi dapat diterapkan di hampir semua jenis kebutuhan pembelajaran. Gamifikasi memungkinkan individu memenuhi semua kebutuhan pembelajarannya, antara lain *soft skills*, komunikasi, perencanaan bisnis, kerjasama, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pelayanan prima, kreativitas dan inovasi serta berbagai kebutuhan lainnya. 6) Gamifikasi dapat menjadi alat keterikatan. Dengan mengikuti permainan bersama-sama, maka para partisipan akan menjadi lebih terikat dan akrab satu dengan yang lain; 7) Gamifikasi dapat memunculkan berbagai ide-ide baru. Dalam hal ini, permainan dapat merangsang munculnya berbagai ide pada waktu menyelesaikan masalah dalam permainan tersebut. Hal ini kemudian dapat diterapkan pada waktu karyawan menjalankan proyek tertentu atau pada waktu menyelesaikan permasalahan di unit kerjanya masing-masing. 8) *Boardgame* dapat meningkatkan *transfer* pengetahuan dan keterampilan maupun meningkatkan komunikasi diantara para partisipan. Selain itu, menurut Newman, Hansen, dan Gutierrez (2016), penggunaan *boardgame* dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan berbagai aspek pengembangan pribadi misalnya kemampuan spasial, serta rasa percaya diri dan sikap asertif (Mangundjaya & Witjaksana, 2022). *Boardgame* juga dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran secara umum (Siwela, 2020), mengembangkan kompetensi emosional pada anak SD (Dell'Angela, dkk, 2020), dan meningkatkan perilaku pro-sosial pada diri individu (Selvarajan, 2020).

Sementara itu, terdapat beberapa keterbatasan yang melekat pada *boardgame* yaitu: a) *boardgame* tidak selalu dapat diterima, baik dilingkungan akademis maupun korporasi, meskipun sebenarnya *boardgame* sudah ada sejak lebih dari satu dekade, tetapi belum populer. Hal ini disebabkan karena manfaat yang belum diketahui secara detil, juga permainan tersebut relatif mahal dan penyelenggaraanya sedikit rumit dibandingkan dengan permainan yang konvensional; b) masih kurang diketahui target pengguna dari *boardgame* karena belum menyadari manfaatnya untuk siapa, sehingga saat ini lebih cenderung dijadikan sebagai alat permainan untuk bersenang-senang saja; c) *boardgame* menuntut adanya komunikasi yang intensif serta adanya demonstrasi, karena pada umumnya instruksi *boardgame* cukup kompleks (Treher, 2011), sehingga pada waktu menggunakannya memerlukan komunikasi yang jelas bahkan demonstrasi sebelum permainan dimulai; dan d) pada kasus-kasus tertentu memerlukan kehadiran fasilitator di setiap kelompok yang akan membantu dalam memfasilitasi permainan di kelompok.

2. Metode

Metode *boardgame* menarik untuk berbagai kalangan, maka peneliti melakukan riset berdasarkan pendekatan *Action Research* pada 2 kelompok yang berbeda, yaitu karyawan dan mahasiswa. Karyawan disini adalah mereka yang bekerja pada grup *Multi National Company*, yang mengikuti pelatihan *Management Development Program*. Pelatihan dilakukan 2 (kali) dimana setiap kalinya berjumlah 30 orang, sehingga jumlah keseluruhan untuk partisipan dari karyawan adalah 60 orang. Penentuan partisipan dilakukan oleh perusahaan (Manajemen SDM), dengan cara *purposive sampling*, yaitu karyawan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a) memiliki latar belakang minimum Sarjana, sudah bekerja di organisasi minimum 2 tahun, saat ini posisinya minimal sebagai *Supervisor* (Penyelia), dan berusia sekitar 25 -30 tahun. Dalam hal ini *boardgame* di gunakan pada pelatihan tersebut, partisipan mengerjakannya dalam kelompok yang terdiri atas 6 orang dalam 1 kelompok. Setelah mereka memainkan *boardgame* mereka diminta untuk mengisi kuesioner mengenai *boardgame*. Sementara itu, untuk partisipan mahasiswa, partisipannya adalah mahasiswa pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang saat itu berada pada Semester 7, dengan rentang usia 21-25 tahun. Permainan *boardgame* diberikan pada hari Sabtu, yang terdiri dari 2 *batch*, masing-masing terdiri dari 30 orang mahasiswa, sehingga jumlahnya 60 orang mahasiswa. Sejumlah mahasiswa tersebut kemudian dibagi kedalam 5 kelompok untuk memainkan *boardgame*. Setelah selesai memainkan *boardgame*, setiap partisipan diberikan kuesioner untuk mengetahui pendapat mereka tentang *boardgame* yang baru saja dimainkan.

Partisipan pada penelitian ini berjumlah 120 orang yang terdiri dari karyawan sebanyak 60 orang (dalam dua kali pelatihan) dan mahasiswa sebanyak 60 orang dalam dua kali permainan. Penentuan partisipan dilakukan dengan cara *convenience sampling* bagi para mahasiswa, dan *purposive sampling* sesuai dengan penunjukkan partisipan pelatihan dari organisasi di tempat partisipan bekerja. Profil partisipan yang berasal dari karyawan pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan S1, mayoritas berada pada posisi *Supervisor* (Penyelia) dan berusia sekitar 25 – 30 tahun, sedangkan partisipan dari Perguruan Tinggi adalah mahasiswa pada semester 7, dengan rentang usia 21-25 tahun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *boardgame* yang dibuat oleh tim sendiri, yang tujuan dari *boardgame* tersebut adalah untuk membangun kerjasama, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, perencanaan strategis, berpikir analitikal dan kesadaran geografis. Dalam pembuatan *boardgame*, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim peneliti, sebagai berikut: 1) Tahap pertama, memperkenalkan anggota tim mengenai *boardgame*, dengan tujuan semua anggota tim memahami karakteristik *boardgame*; 2) Tahap kedua, menentukan tujuan dan jenis dari *boardgame* yang akan dibuat beserta konsep teori yang mendasarinya; 3) Tahap ketiga mencari model *boardgame* yang akan dijadikan *template* untuk diamati, ditiru dan dimodifikasi. Dalam hal ini konsep yang digunakan adalah konsep *edutainment* (*education and entertainment*). 4) Tahap keempat adalah melakukan uji coba (*try-out*), yaitu melakukan uji coba permainan, mengumpulkan masukan dan menganalisis masukan hasil uji coba tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa partisipan menyukai permainan *boardgame*, yang menurut mereka menyenangkan dan sangat terlibat. Sementara itu, dirasakan bahwa instruksi *boardgame* sedikit rumit untuk dicerna. Berdasarkan hasil tersebut, tim peneliti melakukan revisi instruksi.; 5) Tahap kelima, melakukan revisi *boardgame*, yaitu berdasarkan hasil analisis uji coba kemudian melakukan revisi, baik dari aspek instruksi umum, keterangan masing-masing dari kartu, gambar dan jenis kartu, serta chip, dan papan yang digunakan serta hal-hal lain yang perlu ditingkatkan; 6) Melengkapi perlengkapan *boardgame*, yaitu membuat kartu-kartu, menyediakan pin, dadu, *chip*, kotak dan papan *boardgame* yang menarik. 7) Menghitung biaya yang dikeluarkan. Perhitungan biaya diperlukan untuk dapat mempertimbangkan apakah lebih baik membeli *boardgame* yang sudah jadi atau membuat sendiri. Selain itu, bila peneliti kemudian ingin mengembangkan *boardgame* menjadi salah satu kegiatan kewirausahaan, maka perhitungan biaya harus dilakukan secara tepat dan akurat.

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang merupakan evaluasi setelah para partisipan memainkan *boardgame*. Dalam hal ini, setelah permainan selesai, para partisipan diminta untuk mengisi lembar pertanyaan mengenai *boardgame*. Pertanyaan tersebut disampaikan melalui kuesioner yang berisikan 11 pertanyaan berstruktur terdiri dari 9 buah pertanyaan dengan 3 (tiga) skala Likert yaitu tidak, ya dan netral serta 2 (dua) pertanyaan terbuka. Sembilan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Apakah Anda mempersiapkan permainan dengan membawa dan membaca catatan dari fasilitator? 2) Setelah mengikuti permainan ini apakah Anda dapat

memperdalam pengetahuan Anda tentang *boardgame*? 3) Apakah permainan *boardgame* meningkatkan motivasi Anda untuk mengikuti pelatihan/topik pembelajaran? 4) Apakah Anda ingin memainkan *boardgame* lagi? 5) Apakah aturan permainannya jelas? 6) Apakah Anda memiliki masalah dalam memahami instruksi permainan?, 7) Apakah menyenangkan bermain *boardgame*? 8) Apakah Anda punya cukup waktu untuk menyelesaikan permainan? dan 9) Apakah Anda membutuhkan fasilitator untuk membantu Anda memahami permainan? Sementara itu, pertanyaan yang terbuka adalah sebagai berikut: 10) Apa yang Anda sangat sukai dari permainan *boardgame*? 11) Apa umpan balik mengenai permainan *boardgame* ini secara umum? Selain melalui kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara mendalam pada beberapa partisipan untuk mengetahui secara lebih detil mengenai hasil yang diperoleh. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dan melakukan kajian secara mendalam.

3. Hasil

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan hasil penelitian serta tanggapan partisipan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1. Respon Partisipan

No	Pertanyaan	Jawaban – karyawan			Jawaban - Mahasiswa		
		Tidak	Netral	Ya	Tidak	Netral	Ya
1	Apakah Anda mempersiapkan permainan dengan membaca catatan dari fasilitator?	-	-	60 (100%)	10 (16,67%)	10 (16,67%)	40 (66,67%)
2	Setelah mengikuti permainan ini apakah Anda dapat memperdalam pengetahuan tentang <i>boardgame</i> ?	-	5 (8,33%)	55 (91,67%)	-	10 (16,67%)	50 (83,33%)
3	Apakah permainan <i>boardgame</i> meningkatkan motivasi Anda untuk mengikuti pelatihan/topik pembelajaran?	-	-	60 (100%)	-	-	60 (100%)
4	Apakah Anda ingin bermain <i>boardgame</i> lagi?	-	-	60 (100%)	-	-	60 (100%)
5	Apakah aturan permainannya jelas?	10 (16,67%)	-	50 (83,33%)	10 (16,67%)	10 (16,67%)	40 (66,67%)
6	Apakah Anda memiliki masalah dalam memahami instruksi permainan?	10 (16,67%)	-	50 (83,33%)	10 (16,67%)	10 (16,67%)	40 (66,67%)
7	Apakah menyenangkan bermain <i>boardgame</i> ?	-	-	60 (100%)	-	-	60 (100%)
8	Apakah Anda punya cukup waktu untuk menyelesaikan permainan?	50 (83,33%)	5 (8,33%)	5 (8,33%)	40 (66,67)	-	20 (33,33%)
9	Apakah Anda membutuhkan fasilitator untuk membantu Anda memahami permainan?	5 (8,33%)	-	55 (91,67%)	15 (25%)	-	45 (75%)

Terlihat bahwa sebagian besar partisipan; baik karyawan (83,33%) dan mahasiswa (66,67%) merasa mendapatkan lebih banyak pengetahuan melalui *boardgame*. Mereka semua (100%) setuju bahwa *boardgame* dalam pelatihan meningkatkan motivasi mereka pada topik yang dibahas. Hal ini

Wustari L. Mangundjaya, Seta A. Wicaksana, dan Callista Hapsari Almira Inez Ersya
Board Game: Cara Pembelajaran Yang Menyenangkan Bagi Orang Dewasa

mendukung pernyataan bahwa *boardgame* dapat meningkatkan pembelajar dalam mengikuti pelatihan. Hal ini sejalan dengan penelitian Taspinar, Schmidt & Schuhbauer, (2016), penggunaan *boardgame* dalam pelatihan membuat para peserta pelatihan lebih dapat menikmati pembelajaran dengan menyenangkan dan meningkatkan motivasi dalam belajar.

Secara umum partisipan menyukai pelatihan menggunakan *boardgame*. Para partisipan juga ingin menggunakan *boardgame* sebagai alat dalam proses belajar mereka (100%). Partisipan juga merasa bahwa *boardgame* membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipan menyukai *boardgame* dan bila dimungkinkan akan menggunakan dalam proses pembelajaran, karena menyenangkan. Fullerton (2015) dengan belajar dengan menyenangkan akan meningkatkan kompetensinya.

Sementara itu, dalam proses pembelajaran terlihat bahwa partisipan masih membutuhkan fasilitator untuk menjelaskan permainan, karena 16,67% peserta (karyawan dan mahasiswa) menyebutkan bahwa aturan permainan tidak cukup jelas, dan 8,33% (karyawan) dan 33,33% (mahasiswa) menyebutkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan permainan. Dengan perkataan lain, hal ini menguatkan pendapat bahwa instruksi pada permainan *boardgame* lebih rumit dibandingkan dengan permainan konvensional, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam mencerna instruksi permainan sebelum memulai permainan itu sendiri. Mee Mee dkk.(2022) dibutuhkannya fasilitator yang dapat membantu dan memfasilitasi dalam pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan *boardgame*, agar peserta dapat mengikuti dan melakukan aktifitas menggunakan *boardgame* dengan lebih baik.

Instruksi *boardgame* dirasakan lebih rumit daripada metode pelatihan konvensional. Hal ini membuat partisipan pada umumnya masih membutuhkan lebih banyak waktu dan bantuan dari fasilitator untuk mencerna instruksi secara lebih menyeluruh. Dalam hal ini, fasilitator dengan komunikasi yang jelas dan rinci diperlukan pada waktu memberikan instruksi. Kingsley dan Grabner-Hagen (2015), pelatih dan fasilitator dapat membantu peserta pelatihan dengan melakukan proses pendampingan, sehingga kemajuan dalam proses pembelajarannya dapat terpantau secara berkelanjutan. Membuat peserta pelatihan dapat belajar dengan baik dari waktu ke waktunya.

Hasil untuk pertanyaan terbuka nomor 10, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menyukai permainan yang menantang. Mereka juga menyukai *boardgame* yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa *boardgame* meningkatkan pemikiran kritis mereka dan mengembangkan keterampilan kerja tim mereka. Para partisipan sangat menikmati *boardgame*, dan melalui *boardgame* partisipan dapat menguasai topik pelatihan secara lebih cepat dan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa *boardgame* memiliki manfaat untuk mengembangkan keterampilan individu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bryan, Musgrove dan Powers (2017), pembelajaran orang dewasa yang sarat dengan pendekatan kognitif dan pemecahan masalah akan sangat sesuai dengan karakter *boardgame* sebagai media pembelajaran, sehingga penggunaan *boardgame* selain disenangi dan memberikan motivasi dalam belajar juga mampu mendorong berpikir kritis dan pengambilan keputusan.

Hasil pertanyaan nomor 11 tentang informasi *boardgame*, yang meminta partisipan memberikan tanggapannya tentang pengalaman bermain *boardgame*. Tanggapan dari 120 peserta tentang pengalaman bermain *boardgame* adalah sebagai berikut: a) Seru (66,67%), b) Menyenangkan (65%), c) mudah dimainkan (35%), d) sangat menghibur (22,22%), e) menantang (7,41%), dan f) sangat menyukainya (3,70%). Hasil ini menunjukkan bahwa *boardgame* adalah permainan yang menarik, dan menyenangkan. Hagen dan Park (2016), dengan meningkatnya keterlibatan peserta belajar dalam interaksi dengan pembelajarannya, disertai dengan perasaan senang, seru dan memiliki banyak tantangan, serta menghibur akan membuat peserta pelatihan mendapatkan pengalaman positif dalam proses belajar, sehingga dapat menguatkan dalam hasil ketercapaian belajarnya.

Partisipan juga menyebutkan bahwa *boardgame* memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: a) mengembangkan kerja sama tim (56,19%), b) menetapkan strategi yang baik (35,37%), c) mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik (26,24%), d) koordinasi (21,12). %), e) pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (15,5%), f) interaksi dinamis dengan pemain lain (5,8%), dan g) memungkinkan berpikir kreatif (1,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan permainan *boardgame*

Wustari L. Mangundjaya, Seta A.Wicaksana, dan Callista Hapsari Almira Inez Ersya
Board Game: Cara Pembelajaran Yang Menyenangkan Bagi Orang Dewasa

yang dibuat oleh tim peneliti sudah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh partisipan. Koster (2014) menyatakan bahwa adanya kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, salah satunya ditemukan dengan media *boardgame*.

4. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *boardgame* dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pembelajaran orang dewasa. Penggunaan *boardgame* dalam program pembelajaran dapat memberikan tantangan dan kesempatan kepada peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah yang mengikuti prinsip andragogi, yaitu melibatkan aspek pengalaman pribadi. Oleh karena itu, melalui *boardgame* akan lebih mudah bagi orang dewasa untuk mempelajari hal-hal baru, sesuai dengan prinsip belajar belajar orang dewasa dan pembelajaran eksperiensial (Knowles, 2013; Mackerache, 2004).

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan dampak positif *boardgame* dalam pembelajaran, antara lain penggunaan *boardgame* untuk meningkatkan pemikiran komputasional (Tsarava & Moeller, 2019) dan kerja tim (Foltz dkk., 2019; Treher, 2011). Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Hamari dkk. (2014), yang menunjukkan bahwa gamifikasi akan mengembangkan motivasi, yang menghasilkan perilaku positif yang menjadi tujuan dari pelatihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *boardgame* memiliki beberapa karakteristik yang dapat mengukur beberapa hal sebagai berikut: kerja sama, strategi, koordinasi komunikasi, pengambilan keputusan pemecahan masalah, penguatan hubungan, ketepatan, konsentrasi pengendalian emosi, dan kreativitas. Hal ini juga memungkinkan untuk mendorong pertukaran ide antara peserta dan memahami pendapat seseorang. Selain itu, *boardgame* memiliki beberapa karakteristik antara lain: mengasyikkan, menyenangkan, dan menantang, yang memungkinkan untuk dapat merangsang pemikiran kreatif (Treher, 2011). Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya dari Fjællingsdal dan Klöckner (2020) serta Foltz dkk (2019), yang mengungkapkan bahwa *boardgame* akan menciptakan interaksi dinamis dengan pemain lain yang mengarah pada kerja tim yang lebih baik.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa penggunaan *Boardgame* sebagai metode pelatihan masih terbatas baik jenis, topik maupun tujuannya, hal ini dapat menjadi peluang kewirausahaan bagi para akademisi yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau psikologi untuk membuat *boardgame* yang dapat dijadikan salah satu sumber kegiatan kewirausahaan di kampus (*eduprenuer*) yang dapat melibatkan mahasiswa dan dosen (Mangundjaya & Wicaksana, 2022)

Selama satu dekade terakhir, *boardgame* telah mendapatkan perhatian yang meningkat dalam industri mainan. Meskipun demikian, *boardgame* banyak digunakan untuk bermain dan hiburan, selain itu juga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, maka permainan papan dapat dikembangkan baik untuk pendidikan maupun hiburan (*edutainment*). Sementara itu, gamifikasi dan *boardgame* juga memiliki beberapa batasan, antara lain adalah mengenai kerumitan instruksi sehingga masih diperlukan fasilitator untuk menerangkan secara detail.

5. Kesimpulan

Di era revolusi Industri 4.0, di mana setiap orang perlu memperoleh atau meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini, *boardgame* dapat memungkinkan orang untuk belajar. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai kontribusi metode dan alat gamifikasi atau *boardgame* terhadap keberhasilan program pembelajaran dan pengembangan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa *boardgame* dapat digunakan pada proses belajar orang dewasa, baik mereka yang masih duduk dibangku kuliah (mahasiswa) juga pada karyawan yang telah bekerja sekian tahun dengan posisi penyelia di perusahaan. Hal ini antara lain disebabkan karena permainan dengan *boardgame* adalah menarik, tidak membosankan, dapat memotivasi diri serta mampu mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan antara lain kerjasama, berkomunikasi, kreativitas, pemecahan masalah maupun berbagai keterampilan lainnya. Kondisi inilah yang antara lain menjadi alasan mengapa pendekatan gamifikasi semakin meluas penggunaannya.

Sementara itu, meskipun sebenarnya *boardgame* sudah ada sejak satu dekade yang lalu tetapi penggunaannya masih terbatas, dan lebih banyak digunakan untuk permainan dengan tujuan bersenang-bersenang dikalangan generasi milenial dan generasi Z. Untuk itu sosialisasi *boardgame* sebagai salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan bagi orang dewasa perlu dilakukan.

6. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: Pertama: penelitian ini dilakukan pada partisipan yang berasal dari 1 (satu) *holding grup* perusahaan dan mahasiswa dari 1 (satu) Perguruan tinggi saja. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada partisipan yang lebih besar, yang berasal dari berbagai jenis perusahaan maupun dari berbagai jenis perguruan tinggi. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan analisis deskripsi sederhana yang berasal dari evaluasi partisipan yang telah mengikuti permainan *boardgame*. Penelitian lanjutan dengan menggunakan analisis yang berbeda diperlukan. Ketiga, penelitian ini hanya berdasarkan pada evaluasi partisipan berdasarkan 1 (satu) jenis *boardgame* saja. Dengan ini direkomendasikan penelitian lanjutan dengan menggunakan berbagai jenis *boardgame*. Keempat, data yang diperoleh adalah data dari partisipan yang tidak terlalu banyak untuk tiap kelompok partisipan (pekerja dan mahasiswa). Untuk itu, penelitian lanjutan dengan partisipan yang lebih banyak, yang tidak terbatas pada mereka yang baru saja memainkan *boardgame* diperlukan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *boardgame* dapat menjadi alternatif metode atau cara dalam menjalankan suatu proses pembelajaran pada orang dewasa, sehingga berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi penggunaan *boardgame* dalam proses pembelajaran perlu dilakukan.

Ucapan terimakasih: Peneliti mengucapkan terima kasih pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui program PUIPIK, dengan no kontrak NKB-1101/UN2.R.3.1/HKPO5.00/2019, yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih pada seluruh anggota tim *Boardgame* dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah ikut merancang dalam pembuatan *Boardgame* ini.

Daftar Pustaka

- Alsawaier, R.S (2018). The effect of gamification on motivation and engagement. *The International Journal of Information and Learning Technology*, vol. 35, no. 1, pp. 56-79, 2018, <https://doi.org/10.1108/IJILT-02-2017-0009>
- Barr, M (2017). Video games can develop graduate skills in higher education students: A randomised trial, *Computers and Education*, vol. 113, pp. 86–97, 2017, doi: 10.1016/j.compedu.
- Benesova, A., dan Tupa, J. (2017). Requirements for education and qualification of people in Industry 4.0. *Procedia Manuf.*, 11, June, 2195-2202.
- Bonekamp, L., dan Sure, M. (2015). Consequences of Industry 4.0 on human labour and work organisation, *J. Bus. Media Psychol.*, 6(1), 33-40.
- Bryan, V. C., Musgrove, A. T., dan Powers, J. R. (2017). Handbook of research on human development in the digital age. 2017. *Hershey, PA*: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2838-8
- Dell'Angela, L., Zaharia, A., Lobel, A., Vico Begara, O., Sander, D., dan Samson, A. C. (2020). Board Games on Emotional Competences for School-Age Children. *Games for Health Journal*, 9 (3), 1-10. doi:10.1089/g4h.2019.0050
- Fjællingsdal, K. S dan Klöckner, C.A (2020). Green Across the Board: Board Games as Tools for Dialogue and Simplified Environmental Communication. *Simulation & Gaming*, 2020, Vol. 51(5) 632–652, doi: 10.1177/1046878120925133 journals.sagepub.com/home/sag
- Foltz, A., Williams, C., Gerson, S. A., Reynolds, D. J., Pogoda, S., Begum, T., dan Walton, S.P. (2019). Game developers' approaches to communicating climate change. *Frontiers in Communication*, 4, Article 28. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00028>
- Forrest III, S. P., dan Peterson, T. O. (2006). It 's called andragogy. *Manag. Learn.*, 5(1), 113-122. <http://dx.doi.org/10.5465/AMLE.2006.20388390>
- Fullerton, T. (2015). *Game design workshop: A playcentric approach to creating innovative games*, 3rd ed.. Oakville: Apple Academic Press.
- Gorecky, D., Schmitt, M., Loskyll, M., dan Zühlke, D. (2014). Human-machine-interaction in the industry 4.0 era.

- Proc. - 2014 12th IEEE Int. Conf. Ind. Informatics, INDIN 2014, 289–294.
- Hagen, M. dan Park, S. (2016). We knew it all along! Using cognitive science to explain how andragogy works. *Eur. J. Train. Dev.*, 40(3), 1-39.
- Hamari, J., Koivisto, J., dan Sarse, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference of System Sciences (HICCS)*, 2014, 3025-3034.
- Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., dan Kohl, H. (2016). Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. *Procedia CIRP*, 54, 1-6.
- Henschke, J. A. (2016). A history of andragogy and its documents as they pertain to adult basic and literacy education, *PAACE J. Lifelong Learn.*, 25, 1-28.
- Kapp, K. M. (2012). Games, gamification, and the quest for learner engagement. *Training and Development*, 66(6), 64-68.
- Kingsley dan Grabner-Hagen (2015). Gamification, *Journal of Adolescent & Adult Literacy* 59(1) DOI:10.1002/jaal.426
- Knowles, M. (2013). *Designs for adult learning*. New York: Springer.
- Koster, R. (2014). *Theory of fun for game design*. Oakville: Apple Academic Press.
- Kuo, M.S dan T. Y. Chuang, T.Y (2016) How gamification motivates visits and engagement for online academic dissemination - An empirical study, *Computers in Human Behavior*, vol. 55, pp. 16–27, 2016, doi: 10.1016/j.chb.2015.08.025.
- Lasi, H., Kemper, H. G., Fette, P., Feld, T., dan Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Bus. Inf. Syst. Eng.*, 4, 239-242. <https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4>
- Liao, Y., Deschamps, F., Loures, E. de F. R., dan Ramos, L. F. P. (2017). Past, present and future of Industry 4.0: A systematic literature review and research agenda proposal. *Int. J. Prod. Res.*, 55(12), 3609–3629.
- Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. *J. Ind. Inf. Integr.*, 6, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005>
- Mackerahe, D (2004). *Making sense of adult learning*. London: Paperbackshop.
- Mangundjaya, W. L dan Wicaksana, S.A (2022). Edupreneur: Developing Boardgame As a product of University Entrepreneurial Activities, *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, Volume 05, Number 02, March 2022. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i2.1758>
- Mee Mee, R.W, Rao,S.Y, Pek, S.L, L.,Gghani, K.A.,Von, W.Y, Ismail, M.R, dan Shahdan, T.S, (2022). Gamifying education for classroom engagement in primary schools, *International Journal of Evaluation and Research in Education*, Vol 11, No 3 September, pp 1360-167, doi: 10.11591/ijere.v11i3.21918
- Mee Mee, R.W dkk. (2021), A conceptual model of analogue gamification to enhance learners' motivation and attitude, *International Journal of Language Education*, vol. 5, no. 2, pp. 40–50, 2021, doi: 10.26858/ijole.v5i2.18229.
- Newman, S. D., Hansen, M. T., dan Gutierrez, A. (2016). An fMRI Study of the Impact of Block Building and Board Games on Spatial Ability. *Frontiers in Psychology*, 7, 1-9. doi:10.3389/fpsyg.2016.01278
- Qin, J., Liu, Y., dan Grosvenor, R. (2016). A Categorical Framework of manufacturing for Industry 4.0 and beyond. *Procedia CIRP*, 52, 173-178.
- Ras, E., Wild, F., Stahl, C., dan Baudet, A. (2017). Bridging the skills gap of workers in Industry 4.0 by human performance augmentation tools: Challenges and roadmap. *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, Part F128530, 428-432. <https://doi.org/10.1145/3056540.3076192>
- Roblek, V., Meško, M., dan Krapez, A. (2016). A complex view of Industry 4.0. *SAGE Open*, 6(2). <https://doi.org/10.1177/2158244016653987>
- Rogerson, M. J., Gibbs, M., dan Smith, W. (2015). Digitising boardgames: Issues and tensions. DiGRA 2015 - Proc. 2015 DiGRA Int. Conf. Divers. Play, no. Woods 2012.
- Rothwell, W. J. (2008). *Adult Learning Basics*. Massachusetts: ASTD Press.
- Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R. C., Reichstein, C., Neumaaier, P., dan Jozinovic, P. (2015). Industry 4.0 - Potentials for creating smart products: Empirical research results. *Bus. Inf. Process.*, 208, 16-27. DOI: 10.1007/978-3-319-19027-3_2
- Selvarajan, S. (2020). The Short-Term Effect Of Playing Co- Operative And Competitive Card-/Board Games On Pro-Social Behavior. *Master Thesis. Aalto University School of Business*.
- Shamim, S., Cang, S., Yu, H., dan Li, Y, (2016). Management approaches for Industry 4.0: A human resource management perspective. 2016 *IEEE Congr. Evol. Comput.* CEC 2016, 5309–5316.
- Siwela, M., (2020). Making serious learning easy and fun at OHFT: Educational board games. *Library and Information Research*, 43 (127), 1-13. <https://doi.org/10.29173/lirg812>
- Taspinar, B., Schmidt, W., & Schuhbauer, H. (2016). Gamification in education: A board game approach to knowledge acquisition. *Procedia Comput. Sci.*, 99, October, 101-116.
- Treher, E. N. (2011). Learning with board games. Play for performance, Tools for Learning and Retention, Board Games *TLKWhitePaper*, May 16, 201. Pdf.

- Tsarava, K., & Moeller, K. (2019). *Games and Learning Alliance*, 11385. Springer International Publishing.
- Vaidya, S., Ambad, P., dan Bhosle, S. (2018). Industry 4.0: A glimpse. *Procedia Manuf.*, 20, 233-238.
- Zhou, K., Liu, T., dan Zhou, L. (2016). The digitization that includes the internet and mobile technologies with its high-speed connectivity has helped change established business models. 2015 12th *Int. Conf. Fuzzy Syst. Knowl. Discov.* FSKD 2015, 2147-2152.
- Zichermann, G., dan Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media Inc.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak

Antonius Supriyanto^{1*}  Lina Miftahul Jannah¹ 

¹ Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: ant_supriyanto@yahoo.com ; Tel: (+62)-822-9939-0020

Diterima: 15 November 2022; Disetujui: 10 Desember 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral terintegrasi di seluruh provinsi hingga desa di seluruh Indonesia. Implementasi kebijakan konvergensi sangat tergantung kemampuan dan kapasitas pemerintah serta kondisi sosial, ekonomi, geografis dan masyarakatnya. Pemerintah kabupaten lebak berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 12,9% selama 3 tahun upaya konvergensi. Penelitian ini berusaha mengetahui tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi penurunan stunting kabupaten lebak tahun 2022 untuk mengetahui keberhasilan program penurunan stunting itu terjadi karena integrasi kebijakan yang telah dibangun pemerintah kabupaten secara tepat atautkah keberhasilan kerjasama dan koordinasi peran dominan instansi tertentu dengan keberhasilan unsur pendukung lainnya. Pengukuran tingkat integrasi menggunakan pendekatan Candel dan Biesbroek (2016) melalui analisis 4 variabel dimensi integrasi kebijakan yaitu *Policy Frame*, *Subsystem Involvement*, *Policy Goals* dan *Policy Instrument*. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan kuisioner tertulis informan dari 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak. Hasil penelitian adalah keberhasilan program penurunan stunting belum didukung dengan tingkat integrasi kebijakan yang tinggi. Upaya konvergensi penurunan stunting belum memenuhi kriteria disebut tingkat integrasi tinggi. Diperlukan penguatan di beberapa instrument kebijakan untuk merealisasikan integrasi kebijakan yang tinggi.

Kata kunci: Integrasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Stunting, Kabupaten Lebak

Abstract: Presidential Regulation number 71 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting mandates convergence efforts to accelerate integrated cross-sectoral stunting reduction in all provinces to villages throughout Indonesia. The implementation of convergence policies is highly dependent on the ability and capacity of the government as well as the social, economic, geographical and community conditions. The Lebak district government succeeded in reducing the prevalence of stunting by 12.9% during 3 years of convergence efforts. This study seeks to determine the level of integration of policies for convergence efforts to reduce stunting in the Lebak district in 2022 to find out the success of the stunting reduction program has occurred due to the proper integration of policies that have been developed by the district government or the success of cooperation and coordination of the dominant role of certain agencies with the success of other supporting elements. Measurement of the level of integration uses the Candel and Biesbroek (2016) approach through an analysis of 4 variable dimensions of policy integration, namely *Policy Frame*, *Subsystem Involvement*, *Policy Goals* and *Policy Instrument*. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interviews and written questionnaires from informants from 9 of Organisasi Perangkat Daerah (OPD) of Lebak Regency. The result of the research is that the success of the stunting reduction program has not been supported by a high level of policy integration. Convergence efforts to reduce stunting do not meet the criteria of being called a high level of integration. Strengthening is needed in several policy instruments to realize high policy integration.

Keywords: Policy Integration, Public Policy, Stunting, Lebak Regency

1. Pendahuluan

Permasalahan kesehatan stunting telah didorong menjadi program prioritas nasional pemerintah Indonesia sejak 2017. Stunting menurut WHO adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (WHO, 2014). Kementerian Kesehatan menegaskan stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Permasalahan stunting bukan semata-mata masalah kesehatan saja, faktor penyebab stunting sangat kompleks sehingga diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui pendekatan multisektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting (Rahmadhita, K. 2020). Pendekatan sosial juga penting untuk menurunkan stunting (Muhtar at al., 2022). Perpres RI No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi payung hukum upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024 (Bappenas, 2020). Konsep upaya konvergensi pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara kolektif terhadap kelompok sasaran prioritas di desa dalam upaya pencegahan stunting pada anak-anak. Konvergensi menuntut adanya integrasi penyelenggaraan intervensi spesifik dan sensitif dengan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah. Aspek yang dikongruensinya meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Kabupaten Lebak memiliki tingkat prevalensi tertinggi ke dua di Provinsi Banten. Berdasarkan Data SSGBI stunting kabupaten lebak mengalami penurunan prevalensi stunting secara signifikan yaitu tahun 2018 sebesar 40,2%, tahun 2019 sebesar 32,96% dan tahun 2021 sebesar 27,3%. Tingkat prevalensi stunting kabupaten lebak diatas rata-rata nasional yaitu 24,4% dan prevalensi provinsi banten 24,5%. Berdasarkan data e-PPGBM tahun 2019 sebesar 11,83%, tahun 2020 sebesar 9,26% dan tahun 2021 sebesar 6,31% (Dinas Kesehatan Lebak, 2021). Salah satu faktor pendukung tingginya kasus stunting antara lain Kondisi Geografis wilayah Kabupaten lebak yang sangat luas 3.305,07 km² dengan jumlah penduduk 1.407.857 jiwa. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dan 345 desa/kelurahan. Angka harapan hidup 67,33. Tingkat IPM sebesar 64,03% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,29%. Tahun 2019 dan 2020 lebak mengalami peningkatan tingkat kemiskinan karena dampak pandemi covid 19 yaitu di angka 8,30% di tahun 2019 dan 9,24% di 2020 (BPS Lebak, 2022). Kabupaten Lebak memiliki kondisi geografis dengan karakteristik wilayah yang luas berupa dataran rendah di bagian utara, pegunungan di bagian selatan sehingga berdasarkan temuan ombudsman di beberapa daerah marjinal, masyarakat kesulitan mengakses Pelayanan Publik Dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang memadai (Ombudsman, 2020). Keterbatasan akses layanan dasar ini dihadapkan dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, infrastruktur pendukung serta kondisi geografis yang sulit memberikan tantangan bagi upaya konvergensi percepatan penurunan stunting

Penelitian menganalisis tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral terintegrasi di Kabupaten Lebak berdasarkan pendekatan konsep integrasi kebijakan Jeroen J. L. Candel, R. Biesbroek, 2016. Tidak seluruh instansi pendukung upaya konvergensi merupakan institusi dengan fokus tujuan kesehatan, keluarga dan upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu upaya konvergensi ini tidak sekedar menggabungkan berbagai institusi dengan latar belakang yang berbeda untuk melaksanakan pencapaian tujuan yang sama. Terdapat beberapa proses, tahapan, kondisi antar kebijakan dan syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan integrasi kebijakan.

Bisnis Proses *Crosscutting* pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Lebak merupakan gambaran ideal upaya konvergensi percepatan stunting terintegrasi di Kabupaten lebak. *Crosscutting Stunting* menggambarkan peran stakeholder yang terkait upaya konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.



Gambar 1. Bisnis Proses *Croscutting* Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Lebak, Babelitbangda, 2022

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral terintegrasi di Kabupaten Lebak. Integrasi kebijakan diupayakan untuk mencegah pertukaran negatif antar institusi, memastikan koherensi dan konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting. Integrasi kebijakan mengacu pada proses pembelajaran tidak hanya berlangsung dalam satu atau lebih subsistem, tetapi lintas subsistem (Jones dan Jenkins-Smith 2009). Tingginya tingkat integrasi untuk memastikan keberhasilan program merupakan dampak dari integrasi kebijakan yang telah dibangun pemerintah kabupaten secara tepat ataukah sebatas keberhasilan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten lebak

Integrasi kebijakan adalah sebuah proses yang perlu “dikelola atau diarahkan”. Dalam integrasi perlu identifikasi seperangkat instrumen yang akan digunakan dan mengintegrasikannya ke dalam integrasi kebijakan. Instrumen kebijakan harus koheren dalam desainnya dan implementasi kebijakan ini membutuhkan instrumen yang menyamakan persamaan pemahaman dari integrasi kebijakan (Cejudo, et.al., 2021). Lafferty dan Hovden menyatakan Integrasi kebijakan memasukkan persyaratan adanya pengakuan khusus terhadap tujuan sebagai prinsip panduan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Lafferty, et.al., 2003).

Candel dan Brisbroek menyatakan integrasi kebijakan tidak sekedar perubahan variabel tingkat kebijakan, Integrasi memerlukan penyesuaian tertentu dari kondisi kontekstual kelembagaan, seperti yurisdiksi subsistem dan sistem keyakinan kebijakan yang dominan” (Candel, et.al, 2016). Kooiman (2003) menyatakan Integrasi kebijakan dipahami konsep yang berbeda dari kolaborasi dan kerja sama. Integrasi memiliki perbedaan dua konsep kolaborasi dan kerjasama, kolaborasi berarti 'melakukan sesuatu bersama-sama dalam suatu organisasi, dan khususnya antar-organisasi' sedangkan Tahap yang lebih formal disebut kerjasama didalamnya terdapat bekerja sama melibatkan kepentingan Bersama didukung melalui lembaga-lembaga yang kurang lebih formal, sering kali dipertahankan melalui perjanjian yang memaksakan diri sedangkan Integrasi kebijakan dapat memerlukan peningkatan kolaborasi atau kerja sama antara badan-badan di bidang kebijakan yang berbeda, tetapi tidak harus (Kooiman, J. 2003). Candel dan Brisbroek menyatakan integrasi kebijakan melampaui perubahan 'sekedar' dalam variabel tingkat kebijakan, dalam hal ini juga memerlukan penyesuaian tertentu dari kondisi kontekstual kelembagaan, seperti yurisdiksi subsistem dan sistem keyakinan kebijakan yang dominan (2016: 217)

State of Art penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang mengkaji tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Program Konvergensi Penurunan Stunting merupakan program nasional yang diterapkan diseluruh daerah dengan format integrasi kebijakan. Perbedaan kapasitas dan kemampuan masing-masing daerah mengupayakan konvergensi proses integrasi kebijakan menjadi tantangan bagi seluruh implementator program untuk mewujudkan komitmen integrasi kebijakan lintas sektoral. Tingkat integrasi juga menandakan ukuran hubungan keterkaitan antar program diatas kerjasama dan koordinasi antar program lintas sektoral.

2. Metode

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskripsi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan kuisioner tertulis kepada 9 (sembilan) OPD yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten lebak berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 050/Kep.347-Bapelitbangda/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Lebak yaitu Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Analisis penelitian menggunakan pendekatan konsep integrasi kebijakan Jeroen J. L. Candel, R. Biesbroek, 2016 yang memuat 4 dimensi untuk mengukur tingkat integrasi kebijakan yaitu Kerangka Kebijakan, Keterlibatan Subsistem, Tujuan Kebijakan dan Instrument Kebijakan. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Lebak dengan waktu penelitian selama 3 bulan yaitu bulan September -November 2022

3. Hasil

3.1. Gambaran perkembangan kondisi stunting Kabupaten Lebak tahun 2019-2022

Kabupaten Lebak merupakan kabupaten/kota prioritas stunting tahun 2019. Tingkat prevalensi stunting anak Kabupaten Lebak tahun 2021 berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia adalah sebesar 27,9%. Pelaksanaan upaya konvergensi percepatan stunting kabupaten lebak sudah memasuki tahun ke 4 dan mengalami keberhasilan penurunan prevalensi stunting yang baik sebesar 12,9% dari tahun 2019-2021. Komitmen pemerintah kabupaten lebak mengupayakan prevalensi stunting di bawah angka 14% di tahun 2024.

3.2. Upaya konvergensi percepatan penurunan stunting

Komitmen pemerintah kabupaten lebak terhadap upaya percepatan penurunan stunting dalam SK Bupati No. 050/Kep.347-Bapelitbangda/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Lebak. TPPS diarahkan mengupayakan dan mengkoordinasi program kegiatan, sumber daya program dan sumber pembiayaan terkait dukungan penurunan stunting hingga tingkat desa/kelurahan, koordinasi dan mengagendakan pertemuan daerah dengan seluruh stakeholder upaya konvergensi lintas sektoral meliputi perangkat daerah tingkat kabupaten hingga desa, stakeholder non pemerintah terkait dan berbagai segmen masyarakat yang memiliki peranan layanan masyarakat secara langsung. TPPS mengupayakan ketersediaan basis data stunting yang valid dan akurat serta melakukan publikasi sekaligus menggunakan basis data sebagai dasar perbaikan program. TPPS mengupayakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi terkait percepatan pencegahan stunting serta meningkatkan peran desa/kelurahan dalam melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak antara lain mengupayakan penyediaan alat ukur Antropometri secara merata di seluruh desa/kelurahan di tahun 2022-2023. Pemerintah Kabupaten menetapkan 10 desa lokasi khusus prioritas intervensi penanganan stunting tahun 2022. Koordinasi dan sinkronisasi data layanan dasar lintas program dan lintas sektor, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Orientasi Tim Pendamping Keluarga, Pengukuran dan Pemantauan Perkembangan anak bagi kader PKK, program penyediaan air bersih dan sanitasi, rembuk stunting,

riwayat kinerja tahunan, Penandatanganan MoU kerjasama pencegahan stunting dengan kementerian agama dan 28 KUA, Bimbingan Perkawinan terpadu dan program Pendampingan Keluarga oleh TPK. Kegiatan penanganan stunting oleh CRS dari FIF, PT Pokphand dan NGO MSF (Dokter Lintas Batas). Kegiatan oleh ormas/pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kampung keluarga berkualitas, pendampingan percepatan penurunan stunting dari konsorsium perguruan tinggi. Kegiatan TPPS dan TPK dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting, Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sekaligus program Dapur Sehat Anak Stunting (DASYAT) di Kampung Keluarga Berkualitas. Bentuk Inovasi yang sedang digalakkan TPPS antaralain program Jamban Gotong Royong Keluarga Sehat Produktif (JARO KASEP), Arisan Jamban Saniter Manfaat Terasa (ANJASMARA), Program Deteksi Atasi Anak Stunting (DATA PENTING), Program Lebak Sehat Tanpa Anemia pada Remaja Putri (LESTARI) dan Program Jaring Ibu Hamil Bersalin Selamat (JIMAT)

4. Pembahasan

Penelitian berusaha menganalisis tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral di Kabupaten Lebak menggunakan alat analisis *The Processual Policy Framework* Jeroen J. L. Candel, R. Biesbroek, 2016 dengan 4 (empat) dimensi variabel proses integrasi Memahami kebijakan terintegrasi menggunakan perspektif kapasitas tata kelola dianggap lebih diminati daripada 'kapasitas negara' atau 'kapasitas kebijakan', karena melampaui aturan penegakan. Otoritas implementasi, menjadi 'sarana untuk membangun, mempromosikan, mendukung dan melembagakan hubungan. antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses integrasi' (Howlett & Saguin, 2018). Kapasitas tersebut sebagian besar telah dikaitkan dengan koordinasi vertikal dan horizontal, pengambilan keputusan yang inklusif, dan konvergensi kebijakan sukarela berdasarkan panduan kebijakan lunak, benchmarking dan pembelajaran (Jordan & Schout, 2006)

4.1. Analisis aspek Policy Frame

Analisis Kerangka Kebijakan untuk melihat sejauh mana masalah kebijakan lintas sektor diakui dalam sebuah pemerintahan dan dianggap membutuhkan pendekatan tata kelola secara menyeluruh. Kerangka Kebijakan mensyaratkan definisi masalah dan pemahaman tata kelola yang dominan di antara tempat politik makro dan pembuat keputusan sistem tata kelola. (Peters 2005)

4.1.1. Jumlah Integrasi Kebijakan

Dalam konteks kerangka integrasi, salah satu faktor penghambat Integrasi adalah strategi integrasi tidak cukup menangkap kompleksitas isu bersama kebijakan lintas sektoral. Tidak tercukupinya masukan pemangku kepentingan dalam fase desain memungkinkan terjadinya kegagalan integrasi karena mengakibatkan kesenjangan pengetahuan atau kurangnya dukungan dalam fase implementasi (Drimie dan Ruysenaar 2010). Tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tidak ada dorongan untuk integrasi sedang tingkat integrasi tinggi jika dorongan intergrasi lintas sektoral sudah sangat kuat

Analisis aspek jumlah intergrasi dilihat dari perspektif tata kelola terhadap 4 aspek yaitu *Pertama*, informasi tingkat pemahaman oleh OPD terhadap kondisi stunting di kabupaten lebak tidak seluruh OPD memahami kondisi kasus stunting di kabupaten lebak. Tingkat pemahaman tidak merata, sebanyak 5 OPD memahami kondisi stunting secara spesifik dan sebagian 4 OPD hanya memahami sebagian kondisi stunting. Perbedaan tingkat pemahaman tergantung dari tingkat sosialisas yang diterima OPD. Rendahnya tingkat pemahaman berpengaruh dari kualitas integrasi yang dihasilkan.

Kedua, pemahaman konsep penyebab utama kasus stunting di kabupaten lebak yang tepat berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan tepat sasaran. Kesenjangan informasi dan pengetahuan terhadap objek kebijakan sangat berpengaruh pada tingkat integrasi kebijakan. Pemahaman 7 OPD mampu menggambarkan kondisi penyebab stunting di kabupaten mengindikasikan adanya kesadaran integrasi lintas integrasi melalui intervensi spesifik dan sensitif yang tepat

Ketiga, Tingkat Integrasi dibangun oleh pemahaman OPD terhadap respon awal upaya konvergensi yang dilaksanakan terkait stunting menjadi prioritas daerah meliputi, pemahaman OPD terhadap kebijakan yang diterbitkan untuk mendukung program penurunan stunting, pemahaman inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, pemahaman terkait pelaksana program utama serta pemahaman OPD terkait hubungan pelaksanaan program pusat di daerah. Terhadap ke empat aspek diatas terdapat keseragaman pemahaman dan mengetahui kebijakan, kegiatan dan proses di pemerintah kabupaten. Terkait pemahaman OPD terhadap alokasi anggaran stunting diperoleh informasi sebagian kecil OPD tidak memahami pengalokasian anggaran stunting di OPD baik terkait, APBD, APBN DAK stunting lintas sektoral

Keempat, intergrasi dibangun pemahaman OPD terdapat relevansi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional dengan pelaksanaan upaya konvergensi di daerah merupakan dasar upaya integrasi kebijakan sehingga OPD mampu memberikan dukungan integrasi upaya konvergensi lintas sektoral. Hasil wawancara diperoleh data terdapat relevansi program pemerintah pusat dengan daerah. Terkait relevansi target, mekanisme dan capaian dengan kondisi daerah disepakati oleh 6 OPD mengingat kebijakan merupakan instruksi pusat sedangkan 3 OPD menilai faktor kesiapan, kapasitas hingga adanya permasalahan di tingkat daerah yang masih harus dituntaskan.

Untuk program masih relevan karena di daerah memiliki OPD-OPD, namun memang secara teknis kadang terbentur terkait kebijakan anggaran contohnya kegiatan aksi perencanaan dilakukan bulan April itu sudah melewati masa Musrenbang sehingga seharusnya bisa dianggarkan menjadi tidak bisa dianggarkan karena agenda perencanaan stranas stunting setelah masa Musrenbang", (Bapelitbangda)

Kelima, Tingkat integrasi kebijakan lintas sektoral dibangun persepsi OPD terhadap aspek kepemimpinan TPPS sebagai koordinator upaya konvergensi diperoleh data sebagian besar unsur OPD memahami aspek kepemimpinan yang dibangun oleh Bapelitbangda dan TPPS. Pemahaman ini sangat tergantung dari kontribusi dan komitmen OPD mengikuti seluruh proses dan pertemuan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Terdapat gap informasi antar unsur OPD terkait pelaksanaan program-program konvergensi dimana beberapa OPD tidak mengetahui dan memahami beberapa program OPD lain. Intergrasi membutuhkan komitmen sekaligus konsistensi antar unsur sehingga tim mampu mempertahankan integrasi program.

Keenam, Berdasarkan hasil observasi dokumen SK Pokja TPPS Kabupaten Lebak tidak memberi dukungan terhadap beberapa aspek integrasi kebijakan. Pertama, SK tidak menjangkau seluruh OPD terutama beberapa OPD yang signifikan berperan dalam upaya konvergensi seperti Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Rumah Sakit Ajidarmo dan Dinas Dukcapil. Kedua, SK tidak mensertakan sasaran, target, jangka waktu capaian program serta bentuk jaringan integrasi lintas sektoral dalam kerangka konvergensi yang menggambarkan Bisnis Proses *Croscutting* pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Lebak Tidak adanya target sasaran dan capaian dalam kerangka intergrasi sangat memungkinkan lemahnya integrasi karena fokus capaian OPD terletak pada pencapaian target, sasaran dan capaian program masing-masing karena ketiadaan standar baku upaya konvergensi terkait mekanisme, sasaran dan target capaian yang jelas.

4.2. Analisis aspek Subsystem Involvement

Analisis aspek Keterlibatan Subsystem berusaha untuk mengidentifikasi aktor dan lembaga yang terlibat dalam tata kelola integrasi lintas sektoral serta mengukur tingkat Kepadatan interaksi antara subsystem ini. Aspek keterlibatan subsystem terbagi dalam menjadi

4.2.1. Subsystem yang terlibat

Penelitian berusaha mengidentifikasi kelompok aktor dan institusi yang relatif stabil yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tertentu (Koppenjan dan Klijn, 2004). Subsystem terlibat dalam tata kelola isu lintas sektoral dimana subsystem mengatasi masalah tertentu dalam proses kebijakan mereka yang melibatkan penetapan agenda, debat persiapan, desain kebijakan, atau komunikasi internal dan

Antonius Supriyanto dan Lina Miftahul Jannah

Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak

eksternal terlepas dari apakah subsistem secara substansial berkontribusi untuk mengatasi masalah atau tidak (Dupuis dan Biesbroek 2013). Pengukuran jumlah intergrasi rendah jika hanya ada satu subsistem yang terlibat dan jumlah integrasi tinggi jika seluruh subsistem telah mengembangkan gagasan tentang peran masing-masing dalam program tata kelola lintas sektoral. Analisis subsistem yang terlibat dapat diketahui dari 3 aspek yaitu

Pertama, TPPS Kabupaten merupakan *leading sector* program konvergensi tingkat kabupaten untuk mengkoordinir program konvergensi percepatan penurunan stunting. Pentingnya identifikasi pemahaman terhadap kelembagaan tim mutlak harus diketahui oleh seluruh unsur integrasi kebijakan yang terlibat. Hasil wawancara tidak seluruh OPD memahami pengetahuan tentang kelembagaan TPPS serta unsur kelembagaan yang dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral. Gap pemahaman dan informasi yang beragam sangat tergantung interaksi yang terbangun antara OPD dengan TPPS antara lain tingkat keaktifan OPD mengikuti pertemuan yang diselenggarakan TPPS, peran *Person In Charge* (PIC) masing-masing OPD sebagai representative kelembagaan OPD, keterkaitan program OPD dengan program penurunan stunting, dsb

Kedua, tingkat pemahaman unsur OPD terhadap TPPS tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa sangat bervariasi. Tidak seluruh OPD memahami secara lengkap kondisi aktual kelembagaan TPPS di tingkat kabupaten hingga desa. TPPS tingkat kecamatan dan desa dibentuk untuk memastikan layanan dan intervensi dapat menyentuh masyarakat secara tepat. Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya membentuk TPPS di 28 kecamatan dan 345 desa/kelurahan. Hasil wawancara diperoleh 4 OPD memahami proses dan dinamika perkembangan TPPS di kecamatan hingga desa, 3 OPD hanya mengetahui TPPS Kabupaten menetapkan seluruh kecamatan dan desa memiliki TPPS tapi tidak memahami aktualisasinya sedangkan 2 OPD tidak mampu menggambarkan kondisi TPPS tingkat kecamatan dan desa di kabupaten lebak

Ketiga, Gambaran pengetahuan OPD terhadap OPD yang memiliki peran signifikan dalam program konvergensi diperoleh persepsi seluruh OPD menyebutkan DP3AK2KB dan Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki peran strategis upaya konvergensi disusul Bapelitbangda, Kemenag dan PUPR. OPD lain yang disebut adalah Dinas Ketapang, DPMD, Disdik, Dinsos, Perguruan Tinggi, Dinas Pemukiman, Dinas Peternakan, Bulog, BPPBD, TNI/Polri, Kecamatan, Desa dan KUA. Tingkat pengetahuan sangat tergantung dari aspek hubungan program, kerjasama dan integrasi antar program. Dari beberapa unsur yang disebutkan memang tidak seluruhnya terlibat dalam konvergensi penurunan stunting namun pemahaman terhadap fungsi dan peran OPD lain dapat menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten dalam meningkatkan integrasi kebijakan lintas sektoralnya

4.2.2. Kepadatan Interaksi

Tidak seluruh subsistem terlibat pada tingkat yang sama, terdapat perbedaan antara subsistem dalam integrasi dan terdapat subsistem yang terlibat secara tidak langsung dalam tata kelola integrasi. Kepadatan ini terlihat dari seperangkat subsistem dominan, yaitu subsistem yang dicirikan oleh intensionalitas tinggi, yang sering terlibat dalam interaksi satu sama lain. Pengukuran tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tidak ada interaksi sedang tingkat integrasi tinggi jika interaksi yang sangat tinggi antar subsistem yang terlibat secara formal

Analisis kepadatan interaksi yang terlibat dapat diketahui dari 3 aspek yaitu *Pertama* Penilaian OPD terhadap seluruh OPD dalam TPPS sudah berperan aktif dan melaksanakan tugas sesuai SK Bupati tentang TPPS diperoleh informasi 4 OPD menyatakan OPD TPPS telah berperan aktif, 2 OPD menyatakan OPD belum sepenuhnya aktif dan 3 OPD menyatakan tidak bisa memberi penilaian keaktifan OPD lain dalam TPPS. Hasil observasi penelitian diperoleh informasi tidak seluruh OPD sudah berperan aktif dalam tim karena sangat tergantung dengan OPDnya semisal bidang monitoring evaluasi dan knowledge manajemen dengan koordinator pimpinan perguruan tinggi saat ini belum tampak kegiatan serta aktivitasnya walau secara fungsi tetap dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten Lebak.

Kedua, Penilaian pemahaman OPD terhadap kendala program konvergensi lintas OPD di tingkat kabupaten lebak terkait dengan sosialisasi, pola kerjasama, pembagian peran dan evaluasi capaian

diperoleh data 6 OPD mengetahui kendala program konvergensi dan 3 OPD tidak mengetahui kendala program konvergensi terkait sosialisasi program, pola kerjasama konvergensi, pembagian peran dan evaluasi capaian program. TPPS menyatakan sosialisasi dilakukan dengan mengundang jajaran pimpinan dan perwakilan lintas OPD, kerjasama bisa terkait pemanfaatan data, untuk pembagian peran belum sepenuhnya merata karena setiap OPD melaksanakan program sesuai mekanisme program serta evaluasi program berada di masing-masing OPD implementator program tersebut.

Ketiga, Integrasi kebijakan mutlak membutuhkan kerjasama sekaligus koordinasi yang matang diantara berbagai unsur yang membangun integrasi tersebut. Sebagai bentuk konvergensi, upaya penurunan stunting ini tidak terlepas dari isu ego sektoral beberapa institusi yang memiliki peran, program dan anggaran yang lebih dari OPD lainnya sehingga isu ego sektoral ini menjadi energi negatif bagi upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Hasil wawancara 6 OPD menyatakan tidak adanya ego sektoral dalam TPPS dan 3 OPD tidak secara tegas menyatakan ego sektoral namun lebih ke adanya OPD yang memiliki peran sentral mengakomodasi berbagai OPD dalam kerangka Konvergensi

4.3. Analisis aspek Policy Goals

Analisis aspek Tujuan Kebijakan berusaha untuk memahami kebijakan konvergensi stunting lintas sektoral diadopsi sebagai tujuan serta mengetahui tingkat koherensi tujuan selanjutnya

4.3.1. Rentang Kebijakan

Rentang Kebijakan baik di tingkat sistem maupun di dalam subsistem, di mana masalah lintas sektoral diadopsi sebagai tujuan. Tingkat integrasi yang lebih tinggi melibatkan kepadatan subsistem yang relative tinggi dan mencakup kebijakan yang lebih luas. Ukuran kedekatan dengan target sasaran dapat digunakan mengukur rentang kebijakan melalui menilai jumlah kebijakan yang berpotensi relevan dalam integrasi. Pengukuran Tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tujuan kebijakan hanya tertanam pada tujuan subsistem yang dominan sedang tingkat integrasi tinggi jika tujuan kebijakan tertanam dalam semua tujuan kebijakan yang berpotensi relevan

Analisis rentang kebijakan yang terlibat dapat diketahui dari 3 aspek yaitu *Pertama*, memahami rentang kebijakan program konvergensi dimulai dengan aspek pengetahuan OPD tentang jenis program intervensi spesifik dan sensitif serta mampu identifikasi bentuk kontribusi OPD lain dalam kerangka konvergensi. Hasil temuan pertanyaan pelaksana program intervensi spesifik lebih banyak diketahui dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan. Sedang pengetahuan pelaksana program intervensi sensitif tidak sepenuhnya dijawab dengan tepat. Begitu juga dengan pelaksana program pendukung tidak sepenuhnya dijawab dengan tepat oleh OPD.

Kedua, Sosialisasi program merupakan aspek penting dalam membangun pola integrasi kebijakan. Dengan adanya proses sosialisasi yang baik akan menemukan benang merah antar kebijakan masalah lintas sektoral dapat diadopsi sebagai tujuan dalam institusi masing-masing. Pemahaman awal terhadap berbagai kondisi konvergensi dan program intervensi yang lengkap menjadi syarat penguatan integrasi lintas sektoral dari level kabupaten hingga level desa. Dari aspek pemahaman sosialisasi program stunting telah merata di tingkat OPD hingga tingkat kecamatan hingga tingkat desa diperoleh hasil 4 OPD menyatakan sosialisasi program stunting merata dari level kabupaten hingga desa dan 5 OPD menyatakan sosialisasi program stunting masih belum merata disebabkan terdapat bermacam kendala antara lain kendala keterbatasan anggaran kegiatan pertemuan secara merata di seluruh kecamatan dan desa, perlu adanya pelatihan khusus bagi SDM namun terkendala anggaran serta kebijakan dari pemerintah pusat, dampak PPKM pandemi covid terhadap program sosialisasi hingga tingkat desa, kebijakan relokasi anggaran mendukung penanganan covid, dll.

Ketiga, Rentang kebijakan program konvergensi dengan integrasi yang tinggi ditandai dengan proses adopsi tujuan kebijakan integrasi program konvergensi tertanam di seluruh OPD pelaksana program. Kebijakan konvergensi mendukung intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi dilakukan melalui Penetapan 10 desa lokus prioritas stunting tahun 2022 dan diharapkan berbagai program dan intervensi dilaksanakan untuk mendukung pengentasan stunting di 10 lokasi prioritas.

Hampir sebagian besar OPD tidak memiliki tujuan organisasi spesifik mengkaitkan dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting. Kebijakan konvergensi ini juga tidak serta semerta seluruh OPD mengadopsi tujuan penanganan dan pencegahan stunting sebagai tujuan organisasi. Namun seluruh OPD mendukung penuh upaya penanganan dan pencegahan stunting melalui upaya konvergensi.

Disdik tidak memiliki tujuan terkait program stunting. Keterlibatan disdik dalam program percepatan penurunan stunting yaitu adanya tenaga pendidik PAUD yang mengikuti Program Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting sebanyak 20 orang 7-12 Juni 2022 program Direktorat Guru PAUD dan dikmas. Setelah TOT peserta PTK PAUD tersebut melakukan sosialisasi pencegahan stunting ke amsyarakat di 10 Lokus stunting, (Disdik)

4.3.2. Koherensi Kebijakan

Koherensi antara konsekuensial keragaman tujuan kebijakan. Koherensi dapat dicapai dan diukur dalam domain kebijakan (May et al. 2006). Koherensi melihat bagaimana tujuan berbagai domain dan subsistem terkait saling berhubungan. Koherensi yang kuat ada ketika subsistem menyelaraskan tujuan kebijakan mereka untuk bersama-sama mengatasi masalah lintas sektoral, yang dapat mereka lakukan dengan mengurangi eksternalitas, mencari sinergi, atau bahkan bekerja menuju 'strategi kebijakan terintegrasi' di seluruh sistem (Rayner dan Howlett2009). Pengukuran tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tidak ada koherensi antar subsistem sedang tingkat integrasi tinggi jika tujuan kebijakan bersama dalam subsistem yang merata

Analisis koherensi kebijakan yang terlibat dapat diketahui dari 3 aspek yaitu *Pertama*, koherensi konvergensi stunting erat kaitannya dengan pemahaman integrasi berbagai intervensi baik spesifik maupun sensitif. Terdapat pendapat 6 OPD menyatakan intervensi sensitive dan intervensi spesifik upaya konvergensi sudah terintegrasi baik melalui kerjasama antar institusi antara lain penyediaan data sasaran program, penggunaan SDM untuk sosialisasi stunting, dll namun terdapat 3 OPD menyatakan proses intervensi spesifik dan sensitive belum terintegrasi dengan baik dikarenakan berbagai kondisi program-program masing-masing OPD seperti keterbatasan anggaran, OPD tidak memiliki kewenangan merubah mekanisme dan ketentuan program, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, dll

Sudah terintegrasi namun belum optimal dan beberapa tidak berjalan sinergi contohnya program penanganan stunting yang bersumber dari APBN sering tidak sinkro dengan lokasi yang menjadi fokus prioritas stunting yang ditentukan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat berupa program yang di biyai APBN seringkali tidak bisa diubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk mendukung upaya pencegahan stunting di lokasi prioritas. Hal ini terjadi pada program pembangunan sanitasi air bersih dinas PUPR dan beberapa program kementerian lainnya, (Bapelitbangda)

Kedua, Koherensi upaya konvergen penurunan stunting sangat terkait pemanfaatan basis data yang terkait target sasaran stunting untuk melakukan berbagai intervensi secara terintegrasi. Data kasus stunting berdasarkan e-PPGBM dirilis Dinas Kesehatan untuk dijadikan basis data penanganan stunting, DP3AK2KB juga merilis data Keluarga Resiko Stunting tahun 2021 serta menjadikannya sebagai data sasaran berbagai program. Pemahaman berbagai OPD yang tidak memiliki data stunting dapat menjadikan data kasus stunting Diskes dan Keluarga Resiko Stunting sebagai basis data rujukan untuk program OPD sehingga menghasilkan integrasi kebijakan antar OPD. Namun upaya konvergensi tidak mutlak harus menggunakan basis data yang sama karena sifat program memiliki perbedaan sasaran, mekanisme dan perbedaan tujuan kebijakannya.

Dinsos melaksanakan program PKH dan BPNT basis data adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta tidak menjangkau target penurunan stunting antara lain data PUS dan WUS. Untuk PKH menjangkau ibu hamil, anak balita hingga usia 60 bulan, untuk remaja putri mendapat bantuan juga dan edukasi melalui orang tua melalui program P2K2 PKH. Jadi dinsos tidak

menggunakan data kasus stunting atau Keluarga Resiko Stunting tapi tetap menjangkau ibu hamil, anak balita dan remaja putri dan tidak spesifik hanya yang stunting saja” (Dinsos)

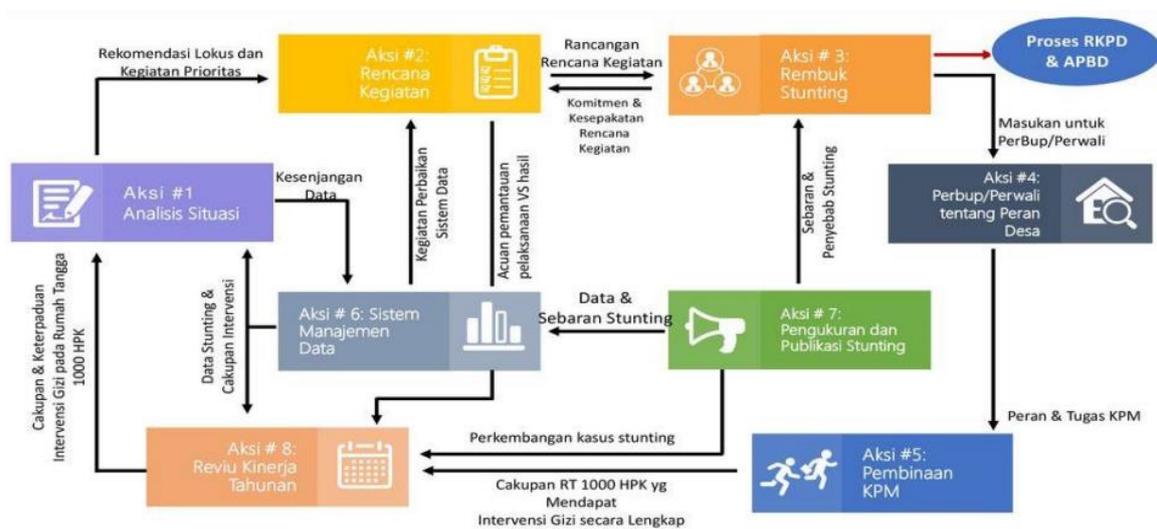
4.4. Analisis aspek Policy Instrument

Analisis aspek Instrument Kebijakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan lintas sektoral mengandung instrument baik secara substansial maupun procedural yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah lintas sektoral, Adanya instrumen prosedural pada level sistem untuk mengkoordinasikan upaya kebijakan dan menjaga konsistensi bauran instrumen secara keseluruhan serta mengukur tingkat Konsistensi instrumen campuran secara keseluruhan.

4.4.1. Penyebaran instrumen subsistem

Jumlah integrasi kebijakan yang lebih tinggi dicirikan oleh cakupan yang lebih luas dari subsistem yang terlibat dan kebijakan terkait di mana masalah diadopsi sebagai tujuan. Integrasi menyertakan instrumen pendukung dalam kebijakan subsistem untuk mengejar rangkaian kebijakan yang kurang lebih koheren. Adanya diversifikasi instrumen yang mengatasi masalah di seluruh kebijakan subsistem. Pengukuran tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika masalah hanya ditangani oleh sebagian subsistem sedang tingkat integrasi tinggi jika instrument tertanam dalam semua subsistem yang relevan dan memiliki kebijakan terkait. Instrumen subsistem yang dipahami dalam upaya konvergensi penurunan stunting adalah aktivitas 8 aksi konvergensi stunting kabupaten lebak dan penggunaan basis data stunting

Instrumen subsistem utama upaya konvergensi adalah aktivitas 8 Aksi Konvergensi Stunting merupakan inti dari upaya komvergensi percepatan penurunan stunting nasional. Seluruh segmen program konvergensi harus melalui ke delapan tahap ini untuk mewujudkan pencapaian tujuan penurunan stunting.



Gambar 2. Delapan Aksi Konvergensi Stunting, TNP2K 2020

Pemahaman terhadap 8 aksi dan sasaran antar aksi konvergensi diperoleh data tidak seluruh OPD memahami tahapan, pelaksana aksi dan rentan waktu pelaksanaan 8 aksi konvergensi secara tepat. Seluruh OPD menyatakan turut mengikuti kegiatan rembuk stunting. Namun terkait menghadiri pertemuan pembahasan upaya konvergensi atau pertemuan terkait 8 aksi konvergensi tidak seluruh OPD mengetahui tahapan serta agenda pertemuannya. Untuk agenda pertemuan launching program BAAS dan Jumat seribu seluruh OPD mengetahui dan menghadiri agenda tersebut. Dalam hal ini, TPPS aktif melibatkan seluruh unsur OPD dalam setiap tahapan namun terdapat faktor eksternal membuat kendala dalam proses komunikasi dan koordinasi. Beberapa OPD tidak aktif dan tidak berusaha update informasi karena memiliki peran yang tidak begitu besar dalam TPPS.

Instrumen subsistem kedua adalah basis data stunting yang menjadi dasar seluruh aspek pengambilan kebijakan publik berupa penyusunan program kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pengukuran tingkat integrasi dilihat dari : *Pertama*, perbedaan pemahaman penggunaan basis data program yang sama dalam program yang berbeda. Hasil wawancara pemahaman 4 OPD menyatakan upaya konvergensi kabupaten lebak telah menggunakan basis data yang sama, sedang pemahaman 3 OPD menyatakan upaya konvergensi tidak menggunakan basis data yang sama sedang 2 OPD menyatakan tidak mengetahui penggunaan data OPD yang terlibat dalam upaya konvergensi. Gap perbedaan ini menggambarkan adanya perbedaan memahami mekanisme sistem kerja upaya konvergensi terlepas ketentuan penggunaan basis data yang sama atau berbeda dalam upaya konvergensi.

Kedua, kebutuhan sosialisasi basis data yang tepat dan akurat menjadi salah satu instrument yang wajib diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh unsur konvergensi. TPPS harus mampu menyediakan basis data yang akurat sekaligus OPD senantiasa harus responsif terhadap upaya ini walaupun secara teknis OPD tidak memanfaatkan basis data tersebut karena pertimbangan tertentu. Terkait pemahaman data basis kasus stunting tersosialisasi di seluruh OPD hanya 6 OPD yang mengetahui data kasus stunting anak tersosialisasi ke seluruh OPD dan 3 OPD menyatakan tidak mengetahui informasi terkait data kasus stunting anak kabupaten lebak.

Dinkes telah melakukan sosialisasi data stunting *by name by address*, BKKBN juga telah merelease data Keluarga Resiko Stunting tahun 2021. Namun pemerintah daerah tidak bisa memaksakan OPD menggunakan basis yang sama, pelaksanaan program dengan sasaran dan target saya sama karena terdapat keterbatasan kemampuan anggaran OPD sekaligus peran dari pokja lebih kepada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting (DP3AK2KB)

Keempat adalah persepsi apakah penggunaan basis data program intervensi stunting yang berbeda apakah menyebabkan program berjalan sendiri direspon informan sebanyak 2 OPD menyatakan perbedaan data akan menyebabkan program berjalan sendiri, 4 OPD menyatakan perbedaan basis data tidak menyebabkan program berjalan sendiri-sendiri dan 3 OPD tidak mengetahui kondisi perbedaan basis data mengakibatkan program berjalan sendiri-sendiri

Saat ini tidak jadi permasalahan karena perbedaan data tergantung dari tujuan, sasaran dan capaian program di tiap masing-masing OPD. OPD di provinsi/kabupaten/kota juga menjalankan program kementerian pusat sehingga mekanisme program dan penganggaran OPD tidak dapat melakukan modifikasi atau perubahan tertentu", (Bapelitbangda)

4.4.2. Instrumen Prosedural di tingkat system

Peningkatan jumlah integrasi kebijakan ditandai dengan penyebaran instrument prosedural di tingkat sistem tata kelola untuk mengkoordinasikan upaya kebijakan subsistem dan untuk menegakkan dan menjaga konsistensi campuran instrumen secara keseluruhan (Jordan dan Lenschow2010). Pada tingkat integrasi tertinggi, instrumen prosedural organisasi akan berbentuk struktur yang merentang batas atau otoritas menyeluruh yang mengawasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan masalah secara keseluruhan (Jochim dan May2010; Lafferty dan Hovden2003). Pengukuran tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tidak ada instrument procedural yang relevan di tingkat system sedang tingkat integrasi tinggi jika berbagai instrument prosedural ditingkat sistem mampu mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau upaya subsistem.

Analisis Instrumen procedural upaya konvergensi berdasarkan kajian substansi SK Bupati no 050/Kep.347-Bapelitbangda/2022 sebagai payung hukum utama TPPS Kabupaten Lebak. Idealnya SK Pokja memuat seluruh kebutuhan dari pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan tertentu. Didalam SK terdapat kepastian struktur, tugas dan peran, pembagian wewenang, ketentuan teknis dan prosedur kegiatan tertentu. Pembuat kebijakan harus memastikan beban tugas yang diamanatkan kepada OPD harus sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan kapasitasnya. Hasil evaluasi SK TPPS diperoleh gambaran yaitu *Pertama*, terdapat tiga OPD (Bapelitbangda, Dinkes dan DP3AK2KB) memiliki posisi

utama sekaligus peran strategis mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas program dan kebijakan strategis program konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak, namun beberapa OPD dengan kontribusi penting terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting juga tidak disebutkan dan dilibatkan dalam keanggotaan TPPS. *Kedua*, SK belum mencantumkan Sasaran, Target dan pencapaian, penanggung jawab program serta lintas sektoral secara tegas. *Ketiga*, SK Tidak menggambarkan jaringan proses integrasi kebijakan lintas sektoral. Keempat, SK tidak mendorong penggunaan basis data terintegrasi dan mendorong fokus pelaksanaan program pada lokasi prioritas stunting

Instrument procedural dukungan anggaran terkait jumlah dan alokasi yang jelas menjadi faktor penting dalam integrasi kebijakan. Keterbatasan atau ketiadaan anggaran sering kali menjadi problematika implementasi kebijakan. Dalam perpres menyatakan pendanaan percepatan penurunan stunting menggunakan dana APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota dan APB Desa serta sumber pendanaan lain yang sah oleh karena itu perlu didukung aturan hukum yang jelas dan harus direalisasikan secara akuntabel.

4.4.3. *Konsistensi instrumen substantif dan prosedural*

Jumlah konsistensi integrasi tinggi dicirikan oleh konsistensi campuran instrument kebijakan yang lebih kuat, yaitu seperangkat instrumen yang telah dikembangkan oleh subsistem secara bertahap dalam mode ad hoc selama jangka waktu yang lebih lama. perpaduan instrumen yang tepat secara efektif mewujudkan tujuan integrasi tertentu (Adelle dan Russel 2013). Pengukuran tingkat integrasi kebijakan disebut rendah jika tidak ada konsistensi sedang tingkat integrasi tinggi jika campuran instrument lintas subsistem secara komprehensif dirancang untuk memenuhi serangkaian tujuan yang koheren..

Konsistensi instrument substantif dan prosedural upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Lebak belum memiliki pola yang baku karena program konvergensi penurunan stunting oleh TPPS baru diterapkan belum masuk jangka waktu 1 tahun. Namun pola kerja konvergensi sudah menjadi standar baku yang diterapkan Stranas Stunting di seluruh provinsi di Indonesia sehingga pengukuran tingkat konsistensi instrument dilihat dari tingkat pemahaman OPD terhadap sistem upaya konvergensi yang sudah terbangun selama ini. Pemahaman terhadap hubungan antara sentralitas leading sektor dinyatakan 3 OPD menyatakan program, kebijakan, anggaran dan capaian tersentral pada leading sektor, 4 OPD menyatakan program kebijakan anggaran dan capaian sudah tersebar di seluruh OPD sedang 2 OPD tidak mengetahui program, anggaran dan capaian tim TPPS. Kemudian terkait TPPS menginisiasi integrasi antar OPD diperoleh informasi 3 OPD TPPS merancang integrasi program antar berbagai OPD terkait dan menghubungkan program satu dengan program lainnya, 3 OPD menyatakan TPS belum mampu mengintegrasikan integrasi antar OPD serta 3 OPD tidak memahami kondisi integrasi kebijakan antar program.

Dari sisi inovasi pemerintah daerah diperoleh informasi beberapa program percepatan penurunan stunting di daerah merupakan program kementerian antara lain Dinkes (berbagai kegiatan intervensi spesifik), DP3AK2KB (BAAS, ILSIMIL, Dapur Sehat Anak Stunting (DASYAT), program Kampung Keluarga Berkualitas), Dinas Ketapang (Program Pekarangan Pangan Lestari), Dinas Sosial (PKH, BPNT), Dinas PUPR (sanitasi), Diskominfo (Publikasi dan Humas), DPMD (Peningkatan Kelembagaan Posyandu, Pembinaan KPM). Kondisi ini harus diperhatikan dalam proses integrasi kebijakan di daerah karena pelaksanaan integrasi kebijakan di daerah belum tentu linier dengan mekanisme program/kebijakan tingkat pusat.

Walaupun sudah ada aturan mengenai penggunaan dana desa untuk mendukung program stunting di daerah, Selama tahun 2022 penggunaan dana desa untuk mendukung program percepatan penurunan stunting kelihatannya sangat rendah. Pak wakil bupati menghimbau tahun 2023 dana desa wajib mendukung upaya percepatan penurunan stunting", (DP3AK2KB)

“Harapannya iya (dana desa mendukung konvergensi), namun tahun 2022 belum optimal. Untuk tahun 2022 ini diusahakan ada timbangan pengukuran anak tiap desa namun belum seluruhnya itu ada, (Bapelitbangda)

Pada akhir wawancara terhadap seluruh informan terdapat data berbagai kendala pelaksanaan upaya konvergensi penurunan stunting kabupaten lebak diperoleh jawaban disusun berdasarkan frekuensi tertinggi yang disampaikan oleh informan.



Gambar 3. Kendala pelaksanaan upaya konvergensi penurunan stunting tahun 2022

Kendala pertama adalah keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan OPD menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran. Tidak seluruh OPD juga mendapatkan alokasi anggaran stunting dari APBD sehingga OPD mengoptimalkan pelaksanaan program berasal dari anggaran APBN. *Kedua*, adalah belum optimalnya TPPS di tingkat kecamatan dan desa. Hampir seluruh OPD tidak bisa menyebutkan angka yang pasti berapa jumlah TPPS kecamatan/desa yang sudah aktif maupun yang belum aktif. *Ketiga*, Kapasitas dan kemampuan SDM pelaksana program konvergensi masih sangat beragam sehingga diperlukan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan bimtek namun terkendala anggaran serta kebijakan yang mendukung usulan tersebut. *Keempat*, adalah dukungan dana desa masih sangat rendah. Walaupun terdapat kebijakan Permendes PDPT no 13 tahun 2020 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 belum cukup efektif mendorong seluruh kabupaten bisa memanfaatkan dana desa mendukung prioritas program penurunan stunting. Sebagian besar OPD tidak mengetahui kontribusi dana desa dalam upaya konvergensi stunting tahun 2022. *Kelima*, komunikasi yang tidak jelas, hal ini diarahkan pada kendala program sosialisasi yang belum merata sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar lintas sektoral termasuk perbedaan pemahaman di tingkat desa/kelurahan dan di masyarakat. Perbedaan pandangan ini menyebabkan pelaksanaan upaya konvergensi menjadi tidak searah.

Terdapat beberapa masukan beberapa OPD terhadap kondisi integrasi kebijakan dalam TPPS kabupaten lebak untuk meningkatkan kualitas integrasi kebijakan lintas sektoral antar OPD antara lain *Pertama*, perlunya pemetaan program yang bisa diintegrasikan kepada kelompok sasaran secara lengkap. Strategi CRS perlu terlibat dalam program konvergensi, Disdik melalui revitalisasi UKS, perlu mengoptimalkan peran PKK dan diskominfo sosialisasi edukasi stunting ke masyarakat. *Kedua*, realisasi dan optimalisasi TPPS di tingkat kecamatan dan desa. Sehingga intervensi spesifik dan sensitiv lebih menysasar langsung ke masyarakat secara lengkap dan cepat. *Ketiga*, upaya konvergensi percepatan penurunan stunting tidak hanya sebatas menuntaskan masalah stunting saat ini saja namun bagaimana konvergensi ini mampu menciptakan generasi selanjutnya yang bebas stunting. *Keempat*, terkait data stunting, data sasaran tidak semua desa mengetahui *By Name By Address*. Desa tidak proaktif mendapatkan data sasaran keluarga resiko stunting sehingga perlu pemanfaatan Teknologi dan informasi komunikasi, perkuat basis data mudah diakses dan valid serta bisa melakukan penanganan on the spot. *Kelima*, penguatan aspek dasar hukum TPPS mendukung integrasi kebijakan konvergensi penurunan stunting

6. Saran

Pemerintah daerah harus memutuskan bentuk integrasi kebijakan yang ingin dibangun sampai sejauh mana. Integrasi Kebijakan akan memiliki dampak sangat signifikan untuk mengatasi masalah kompleks seperti masalah stunting, masalah lingkungan atau masalah pengentasan kemiskinan, namun mengupayakan ke integrasi kebijakan memiliki banyak tantangan terutama terkait anggaran, komitmen politik dan pimpinan, perubahan pada sistem organisasi serta tergantung kapasitas dan kapasitas sumber daya organisasi. Tinggi rendahnya tingkat integrasi kebijakan tidak menggambarkan baik buruknya kualitas masing-masing institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaannya. Penilaian tingkat integrasi dapat menggambarkan pola koordinasi dan komunikasi yang dibangun sistem dalam mencapai tujuan Bersama. Adanya kendala dan permasalahan yang ditemui menjadi input bagi perbaikan sistem integrasi kebijakan menjadi lebih baik lagi

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Lebak (2022, Febuari 25). Kabupaten Lebak dalam Angka 2022. <https://lebakkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/95754caf6bfde76e01c3640d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2022.html>
- Candel, Jeroen & Biesbroek, Robbert. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. *Policy Sciences*. 49. 211-231. 10.1007/s11077-016-9248-y
- Cejudo, Guillermo & Michel, Cynthia. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. *SAGE Open*. 11. 215824402110321. 10.1177/21582440211032161
- Drimie, Scott & Ruysenaar, Shaun. (2010). The Integrated Food Security Strategy of South Africa: An institutional analysis. *Agrekon*. 49. 316-337. 10.1080/03031853.2010.503377.
- Givoni, M. (2014). Addressing transport policy challenges through policy packaging. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. 60, p. 1-8.
- Howlett, Michael & Saguin, Kidjie. (2018). Policy Capacity for Policy Integration: Implications for the Sustainable Development Goals. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.3157448.
- Jones, Michael & Jenkins-Smith, Hank. (2009). Trans-Subsystem Dynamics: Policy Topography, Mass Opinion, and Policy Change. *Policy Studies Journal - POLICY STUD J*. 37. 37-58. 10.1111/j.1541-0072.2008.00294.x.
- Jordan A, Schout A (2006) *The Coordination of the European Union: Exploring the Capacities of Networked Governance*. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Klijn, Erik Hans & Koppenjan, Joop. (2016). *Governance Networks in the Public Sector*. 10.4324/9781315887098.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications Ltd, <https://www.doi.org/10.4135/9781446215012>
- Lafferty, William & Hovden, Eivind. (2003). Environmental policy integration: Towards an analytical framework. *Environmental Politics*. 12. 1-22. 10.1080/09644010412331308254
- Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 13–28. <https://doi.org/10.21107/SML.V5I2.15909>
- Ombudsman, 9 Juli 2020; <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan>
- Ombudsman. (2020, July 9). Ombudsman Banten Temukan Masyarakat Lebak Masih Kesulitan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan>
- Peters, B. G. (2005). Pittsburgh: Department of Political Science, University of Pittsburgh)
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rayner, Jeremy & Howlett, Michael. (2009). Conclusion: Governance arrangements and policy capacity for policy integration. *Policy and Society*. 28. 165-172. 10.1016/j.polsoc.2009.05.005.
- WHO (2014b) *Childhood stunting: Challenges and opportunities*. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting colloquium (WHO/NMH/NHD/GRS/ 14.1). World Health Organization: Geneva.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Antonius Supriyanto dan Lina Miftahul Jannah

Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB

Yumantoko ^{1*} 

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta. Indonesia

* **Korespondensi:** yumant@gmail.com; Telepon: +6281804054433

Diterima: 1 November 2022; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Program pemberdayaan masyarakat skema perhutanan sosial (PS) sudah lama berjalan. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mengancam sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. Namun program tersebut berjalan lambat dari target 12,7 juta hektar (dari 2014 hingga 2024), pada 2021 baru tercapai 4,5 juta hektar. Hal ini tidak lepas dari program itu sendiri kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses PS dengan melihat dari kacamata pemberdayaan itu sendiri. Studi membahas dari sisi informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan lembaga lokal. Penelitian ini mengambil kasus PS di kawasan Sesaot, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai informan penting secara purposive. Hasilnya menunjukkan bahwa fasilitator dan petani masih kurang memahami informasi PS. Partisipasi masyarakat belum terlihat karena campur tangan fasilitator masih besar. Akuntabilitas dalam program pemberdayaan dilakukan dengan melaporkan hasil kegiatan untuk pihak-pihak tertentu. Kapasitas organisasi lokal perlu ditingkatkan agar petani menjadi berdaya. Terjadi penambahan aset dan kemampuan individu dalam mengembangkan usaha kehutanan, namun tidak semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama.

Kata kunci: perhutanan sosial, pemberdayaan, masyarakat, kehutanan

Abstract: The Social Forestry Program has been running for a long time. This program aims to solve forestry problems threatening socio-economic and environmental aspects. However, the program is running slowly. From the planned implementation of 12.7 million hectares (from 2014 until 2024), only 4.5 million hectares have been reached in 2021. This achievement is because the program needs to accommodate the local community's needs. This study aims to analyze the Social Forestry process from the empowerment perspective. The discussion relates to information, participation, accountability, and local institutions from the empowerment process. The research location is in the Sesaot area, West Nusa Tenggara Province. The research method uses a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with a purposive. The results show that the facilitators and farmers still do not understand the social forestry information. The role of the facilitator is still dominant, and community participation needs to be increased. Accountability in the empowerment program is shown by reporting the results of activities for certain parties. The capacity of local organizations needs to be improved so that farmers become empowered. There is an increase in individual assets and abilities in the forestry business, but not all communities have the same opportunities.

Keywords: social forestry, empowerment, society, forestry

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki luas daratan 187 juta hektar dimana 125 juta hektar-nya merupakan kawasan hutan (MoEF, 2021). Dari luas hutan tersebut pemerintah menetapkan fungsi kawasan konservasi, lindung, dan produksi. Pemerintah membatasi masyarakat sekitar mengakses sumberdaya dan hal ini mengakibatkan tekanan pada hutan terus meningkat (Djamhuri, 2008). Pemerintah mengklaim pada tahun 2019 hingga 2020 kasus deforestasi di Indonesia berada di titik terendah dari tahun-tahun sebelumnya yakni hanya tinggal 115,5 ribu hektar (MoEF, 2021), walaupun demikian hal ini masih tergolong besar. Permasalahan kehutanan seperti deforestasi berdampak pada kemiskinan, konflik, hal ini mengancam keberlangsungan kehidupan lingkungan dan masyarakat disekitarnya (de Jong, 2012).

Permasalahan kehutanan di Indonesia diatasi salah satunya dengan program Perhutanan Sosial (PS) (MoEF, 2016). Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS dilatarbelakangi karena semakin terpinggirkannya masyarakat rentan akibat industrialisasi yang merusak lingkungan secara luas (Moeliono et al., 2017). Tujuan PS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS terdiri dari beberapa program seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil dengan memberdayakan masyarakat setempat dengan mengembangkan kapasitas dan pemberian akses untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan (PP No. 6 Tahun 2007). Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat lokal, mendukung mata pencaharian, dan konservasi (Fisher et al., 2018). PS sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (MoEF, 2016). Program tersebut merupakan wadah yang tepat bagi penduduk lokal untuk mendapat pembagian hak pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan (Fisher et al., 2019). Pemberian wewenang pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal sebagai bentuk tata kelola kehutanan lebih efisien, fleksibel, adil, akuntabel, dan partisipatif (Andersson et al., 2004).

Namun, PS yang selama ini sudah berjalan masih menyimpan tantangan dan permasalahan. Menurut Rakatama & Pandit (2020) tantangan tersebut yaitu *pertama* kelembagaan pengelolaannya cenderung birokratis dan berbiaya tinggi sehingga tidak efektif dalam menjalankan PS. *Kedua* dari sisi kebijakan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat lokal, kebijakan tumpang tindih dengan kebijakan lain dan tidak memperhatikan pengakuan dan partisipasi masyarakat. *Ketiga* munculnya konflik karena ketidakseimbangan dalam pembagian sumber daya di tingkat lokal. Pengelolaan PS cenderung bersifat formal yang berbeda dengan sistem pengelolaan yang sudah ada (Erbaugh, 2019). Selain itu PS birokratis kurang menunjukkan hasil karena pembagian manfaatnya untuk masyarakat lokal tidak terlihat secara merata (Fisher et al., 2019). Saat ini implementasi PS masih lemah dalam : kebijakan, dukungan kelembagaan, basis pengetahuan, dan transfer keterampilan (Galudra, 2019). Target PS seluas 12,7 juta hektar sampai 2021, namun implementasinya hingga 2021 baru tercapai 4,8 juta hektar (MoEF, 2021). Kontras dengan program PS yang memiliki makna penting bagi masyarakat sekitar hutan dalam memberi kepastian pengelolaan lahan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

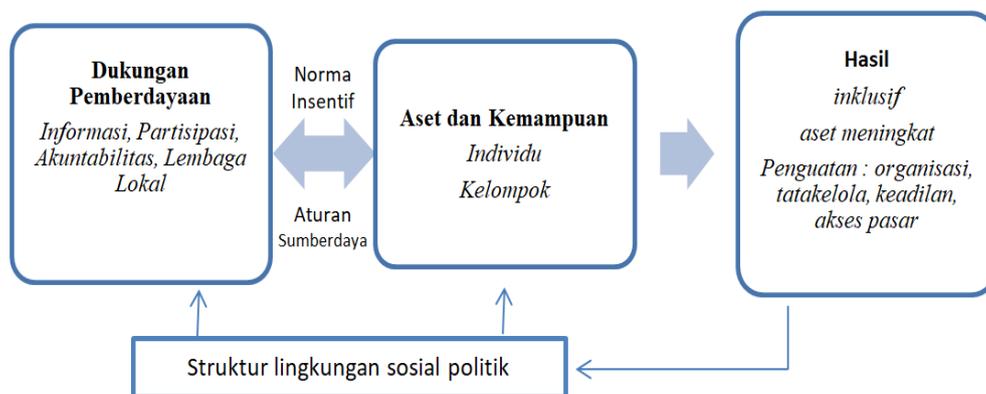
Salah satu provinsi yang sudah menjalankan program perhutanan sosial yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB memiliki kawasan hutan seluas 1.071.722,83 hektar dimana 319.000 hektar dicadangkan untuk PS, namun realisasinya baru 70.357,77 Ha (DLHK NTB, 2021). Perhutanan sosial sudah dilaksanakan di seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh NTB. Seperti KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Pelangan Tastura, dan lain sebagainya. Ini artinya masih banyak yang mesti disiapkan untuk program tersebut agar realisasinya bagus.

Melihat latar belakang dan untuk mengisi kekosongan mengapa pemberdayaan melalui PS kurang menunjukkan perkembangan yang baik meskipun dalam praktiknya telah berlangsung lama

maka perlu untuk dilakukan penelitian ini. Studi ini melihat program pemberdayaan masyarakat khususnya PS dari sisi proses pemberdayaan itu sendiri. Hal ini penting karena pemberdayaan dapat mempercepat efektivitas program pembangunan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan (Narayan, 2002). Proses PS sangat menarik untuk dikaji sebagai bagian dari program pemberdayaan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran agar PS berkontribusi dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Salah satu teori terkait pemberdayaan masyarakat yaitu dari Narayan (2002). Tulisan ini menggunakan teori tersebut karena mampu menjelaskan proses perpaduan antara dukungan pemberdayaan (informasi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas organisasi lokal) dengan aset dan kemampuan individu/kelompok dalam lingkungan sosial politik tertentu untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam pemberdayaan diperlukan aset dan kemampuan individu/kelompok. Disisi lain untuk menghasilkan aset dan kemampuan individu/kelompok diperlukan insentif, aturan, sumberdaya, dan norma yang sesuai agar dukungan pemberdayaan dapat meningkatkan kualitasnya. Untuk lebih memahami dalam teori tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Proses Pemberdayaan



Sumber : Narayan (2002)

Dukungan dalam pemberdayaan sesuai Gambar 1 yaitu :

- *Informasi*. Kemudahan mendapat informasi menguntungkan masyarakat kecil dalam akses kebutuhan dasar informasi yang diperlukan seperti program pemerintah, akses pasar, layanan keuangan dan sebagainya. Penyebaran informasi melalui dua arah fasilitator ke petani dan petani ke fasilitator yang mencakup diskusi kelompok, puisi, dongeng, debat, teater jalanan, informasi tertulis, dan sebagainya.
- *Inklusi/partisipasi*. Yaitu akses masyarakat marjinal kepada sumberdaya yang dapat digunakan dalam merubah keadaan. Kebutuhan satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat sekitar hutan, akses pada sumber-sumber tanaman yang menghasilkan penghasilan merupakan kebutuhan pokok ketimbang fasilitas lainnya. Penduduk lokal merupakan aktor utama, sedangkan pihak lain membantu dalam melecutkan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- *Akuntabilitas*. Pejabat negara, pegawai negeri, swasta, pengusaha, dan praktisi kebijakan lainnya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Akuntabilitas dalam pemberdayaan dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan terutama sumber daya yang selama ini digunakan.
- *Kapasitas lembaga lokal*. Kelompok dan komunitas terorganisir agar dapat mengatur diri mereka sendiri. Kapasitas organisasi lokal mengacu pada kemampuan bekerja bersama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah bersama. Untuk itu, kelembagaan lokal harus dibentuk untuk mampu menggali potensi yang dapat dikembangkan sesuai tujuan bersama.

Yumantoko

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB

Pemberdayaan dalam bidang kehutanan diatur dalam sejumlah aturan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 mengatur pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pada Pasal 83 disebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, yang dilakukan dengan cara pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Bentuknya disebutkan dalam Pasal 84 yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan. Selanjutnya hal ini yang disebut sebagai Perhutanan Sosial (PS). Pada awalnya PS disusun dalam peraturan yang berbeda-beda seperti *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa*, *Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 Tentang Program Kemitraan Kehutanan*, dan *Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Namun pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 83 Tahun 2016, PS disusun dalam satu peraturan di dalamnya mencakup Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat. Kemudian pada tahun 2021 keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana dalam aturan tersebut terdapat perbedaan dari peraturan sebelumnya antara lain, lebih rinci, dan lebih melibatkan banyak pihak.

Masyarakat sekitar hutan banyak menggantungkan hidup dari sumber daya alam sekitar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat dengan mengolah sumber daya terutama hayati mulai dari memungut langsung hingga memanen. Namun, pembangunan dan industrialisasi yang berkembang selama ini banyak merugikan masyarakat rentan karena biasanya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan memberi penguatan kepada masyarakat rentan seperti dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

2. Metode

1.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember 2020. Lokasi penelitian berada di kawasan hutan Sesaot, dimana disekitar kawasan ini terdapat PS jenis HKm. Secara geografis kawasan Sesaot yang luasnya 5.950,18 hektar terletak diantara 8° 15' - 8° 35' Lintang Selatan dan 116° 03' - 116° 44' Bujur Timur, dan ketinggian 300 – 600 meter dari permukaan laut. Kawasan ini merupakan penyangga air Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Mata air yang berasal dari kawasan ini mengalir ke Kali Jangkok, Kali Sesaot, Kali Timbesar, dan Kali Bensua. Sungai tersebut berguna untuk pertanian, pariwisata, perikanan, dan kebutuhan domestik rumah tangga di Lombok Barat dan Kota Mataram (KPH Rinjani Barat, 2019).

Kawasan hutan ini berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Ada lima desa yang berbatasan langsung yaitu Sedau, Lebah Sempaga, Sesaot, Pakuan, dan Buwun Sejati. Satu desa berada di wilayah Kecamatan Lingsar yaitu Batu Mekar. Masyarakat memanfaatkan hutan untuk tanaman tumpang sari atau tanaman semusim. Tanaman tumpang sari sangat penting dalam pemenuhan hidup masyarakat setempat karena mampu menghasilkan produk pangan untuk kebutuhan jangka pendek atau harian. Warga juga mengusahakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang.

1.2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selain itu untuk mendapatkan narasi dan menggali informasi bermanfaat dari program pemberdayaan tersebut tersebut. Data primer diperoleh lewat wawancara yang dilakukan dalam model tidak terstruktur. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive*. Pencarian informan didasarkan pada tujuan agar dapat memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian terkait PS. Penelitian mengambil informan yang berasal dari semua kalangan yang terlibat dalam PS di kawasan Sesaot seperti ketua kelompok tani sebanyak satu orang, petani satu orang,

Yumantoko

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dua orang, penyuluh satu orang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) satu orang. Data yang dikumpulkan berupa informasi dalam pemberdayaan, akuntabilitas, partisipasi, lembaga lokal, dan dampak PS terhadap warga lokal. Informan merupakan tokoh kunci di komunitasnya yang dianggap paling mengetahui PS di kawasan Sesaot.

Peneliti menggunakan panduan kuesioner yang pertanyaannya terbuka sehingga informan bebas menjawab. Dalam penelitian lapangan, peneliti menanyakan pertanyaan terkait partisipasi masyarakat, informasi dalam proses sosialisasi, organisasi lokal, akuntabilitas, dan juga manfaat yang dirasakan dalam mengikuti program. Peneliti merahasiakan informasi yang diperoleh dan semata untuk penelitian misalnya peneliti hanya menuliskan inisial informan dalam laporan. Data sekunder diperoleh antara lain dari laporan dan catatan dari lembaga yang diperoleh lewat lembaga langsung maupun lewat internet.

1.3. Analisis Data

Analisis dilakukan selama proses penelitian. Karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan ketika penelitian berlangsung (Creswell, 2018). Sasaran utama analisis adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan apa yang telah terjadi dalam satu konteks terbatas (Miles et al., 2014). Tujuannya untuk menghubungkan data dengan konsep-konsep penting yang menarik (Yin, 2018). Analisis antara lain berisi kegiatan menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis, membaca seluruh data, memberi kode data sesuai tema dan mendeskripsikan, saling menghubungkan tema dan deskripsi, selanjutnya yaitu menginterpretasi makna (Creswell & Creswell, 2018). Peneliti membagi analisis berdasar dua tujuan: *pertama* untuk melihat proses pemberdayaan di Hutan Kemasyarakatan Sesaot dari teori Narayan (2002) yaitu mencakup informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. *Kedua* untuk melihat hasil dalam pemberdayaan. Kesimpulan dilakukan terhadap keseluruhan analisis tentang makna apa yang bisa dipelajari dari hasil peneliti. Dalam pembahasan studi ini secara garis besar membahas tentang proses pemberdayaan dan dipadukan dengan pendapat ilmuwan terkait sosialisasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kelembagaan.

3. Hasil Penelitian

1.4. Proses Pemberdayaan di Kawasan Sesaot

1.4.1. Akses Informasi (Sosialisasi Program)

Petani memperoleh informasi PS lewat lembaga fasilitator ketika sosialisasi. Selain itu pada saat sosialisasi petani menyampaikan aspirasi tentang apa yang akan diharapkan dari program. Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan fasilitator yaitu saat membahas format PS apakah Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Kemitraan. Seorang petani mengatakan:

“Seperti itu sering rapat, di kantor desa, rumah-rumah, resort, ya murni dari masyarakat, kalau mau HKm atau kemitraan. Kalau memang tidak ada izin baru kita buat Kemitraan. Apa aspirasinya itu dari masyarakat” (Su/petani).

Bagi fasilitator sosialisasi merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi yang dilakukan dengan diskusi. Tawar menawar kegiatan sering terjadi antara fasilitator dengan petani. Petani menginginkan program berdampak dan menguntungkan mereka. Kesepakatan terjadi setelah para pihak yang hadir menyetujui hasil walaupun hal tersebut dicapai dalam negosiasi yang tidak mudah. Misalnya dalam suatu pertemuan KPH menawarkan program Kemitraan, sedangkan petani lebih memilih HKm. Seperti yang diungkapkan penyuluh:

“Kita sudah kasih perbandingan HKm akan begini, Kemitraan begini. Kalau saya mau pindah ke Kemitraan ketua kelompok bilang kalau Kemitraan kan nanti ada bantuan dari pemerintah seperti bibit produktif, batuan teknis penyuluhan dan sarana dan prasarana, belum pelatihan. Mereka bilang, saya tidak butuh itu bahkan saya yang akan ngasih bantuan ke pemerintah, ya susah kalau kayak gitu. (W/Penyuluh).

Musyawarah dalam memilih program seringkali berjalan tidak mudah. Hasil wawancara bisa saja memberi multitafsir dalam melihat fenomena di lapangan. Namun hal ini memperlihatkan tantangan dalam pendekatan ke masyarakat dalam memilih opsi yang dapat membawa pada kesepakatan-kesepakatan bersama. Program yang ditentukan berdasar dengan kesepakatan bersama memudahkan jalannya kegiatan. Diharapkan setelah memilih HKm, partisipasi masyarakat menjadi baik.

Menurut sudut pandang ketua kelompok tani sendiri mengapa memilih HKm dibanding Kemitraan yaitu dilihat dari tiga hal : *pertama* petani bebas menentukan tanaman, *kedua* tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan *ketiga* hak pengelolaan jelas. Informasi terkait HKm ini sebelumnya diperoleh lewat kelompok lain di sekitar desa yang telah melaksanakan program HKm. Ketua kelompok tani mengatakan:

Kalau Kemitraan itu dipegang Pemerintah, ada bagi hasil penggarap jadi bingung, baru masuk kok bayar, kalau bagi dua tidak bisa. Itu yang bikin bingung penggarap. Jadi dipertahankan HKm.... (S/Kelompok Tani)

KPH dan petani memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan format manajemen di dalam kawasan. Persepsi kelompok tani terhadap Kemitraan antara lain: *pertama* petani membayar PNBP, *kedua* keterlibatan petani dalam kawasan dibatasi, *ketiga* pengelola dapat mengganti tanaman yang sudah ditanam petani, dan *keempat* ruang diskusi dalam pengelolaan hutan kecil. Dari alasan tersebut kelompok tani tidak dapat memproyeksikan keuntungan di masa yang akan datang ketika memilih Kemitraan.

Baik HKm maupun Kemitraan memiliki aturan pembayaran PNBP bagi pemegang izin. Namun, karena informasi yang tersebar tidak jelas, Petani merasa HKm tidak memiliki jenis-jenis iuran. Seperti yang dikatakan staf KPH:

Informasinya yang berkembang, HKm tidak mengambil hasil yang terlalu tinggi. Sementara kemitraan tinggi setorannya. Padahal mereka tidak tahu HKm dan kemitraan.... Keduanya ada PNBP-nya kan setelah berhasil tidak langsung cash. ... (E/Staf KPH).

Penyampaian informasi kepada petani menjadi tantangan dalam sosialisasi program PS. Masyarakat menjadi apatis pada program pemberdayaan bisa jadi karena informasi yang diperoleh tidak akurat. Dan sebaliknya, apabila sosialisasi berhasil, partisipasi masyarakat bisa jadi dapat meningkat. Salah satu upaya mengatasi hambatan dalam sosialisasi, seorang penyuluh mengatakan:

Kalau kita lagi sosialisasi kita koordinasi kepada kepala kelompok. Karena biasanya kan ada kesibukan anggota kelompok banyak di hutan. Kita mengikuti waktu mereka kapan luang. Oleh karena itu kita ambil hari jumat, nah jumat itu pun sebelum atau sesudah jumat. Kadang sebelum jumat kan tergesa gesa. (W/Penyuluh).

Penggunaan nilai-nilai lokal dalam proses pemberdayaan membantu dalam kelancaran program. Petani akan lebih menerima ketika fasilitator menggunakan nilai sosial budaya setempat ketika sosialisasi program. Dengan pendekatan kultural, diharapkan informasi yang disampaikan mudah dipahami dan diterima.

1.4.2. Partisipasi

Partisipasi petani dalam program masih perlu untuk ditingkatkan. Misalnya dalam struktur organisasi tingkat tapak, minat anggota dalam kepengurusan masih kurang. Ketua kelompok tani mengatakan:

Kalau di Gapoktan Saya sekretaris, Gapoktan Alam Lestari. Saya mengetuai 200 penggarap. Saya sebenarnya sudah tidak mau menjadi ketua tapi masih diberi kepercayaan sejak lama. (S/ Kelompok Tani).

Regenerasi kepengurusan lembaga menjadi penting dalam menjamin kelangsungan kelompok tani dimasa yang akan datang agar program PS terus berkelanjutan. Diperlukan cara-cara yang tepat untuk menjaring minat warga berpartisipasi pada kelompok tani, sehingga kesenjangan jarak dengan

pengurus yang sekarang menjabat tidak terlalu jauh. Partisipasi juga tidak hanya soal kepengurusan pada kelompok tani, namun bermacam kegiatan dalam rangka menunjang tujuan kelompok. Misalnya dalam sosialisasi, kehadiran anggota menjadi perhatian tersendiri seperti yang dikatakan pegawai KPH:

Sosialisasi gampang di Desa X (nama disamarkan). Kalau Desa Y (nama disamarkan) mau ngumpul-ngumpul harus disiapkan uang transport, tapi kalau di Desa X Cuma kopi saja sudah biasa. Sosialisasi biasanya lewat kumpul-kumpul untuk penyuluhan. Kendala sosialisasi yang datang ketua-ketuanya saja. (H/Pegawai KPH).

Partisipasi masyarakat satu wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Fasilitator tidak harus menyamakan kondisi setiap lokasi dengan satu pendekatan. Para pihak semestinya menerapkan pendekatan beragam ketika masuk pada wilayah yang berbeda. Pemetaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebelum program berjalan akan memudahkan fasilitator dalam menjalankan kegiatan. Sikap acuh masyarakat dalam program pembangunan bisa jadi karena para pihak banyak menjanjikan sesuatu namun ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan, mereka merasa berat mengikuti kegiatan berikutnya. Sehingga untuk mengatasi hal ini, fasilitator menggunakan sumberdaya keuangan sebagai sumber insentif agar partisipasi masyarakat tetap ada. Namun disisi lain keterbatasan keuangan menjadi permasalahan dalam menjalankan program. Seperti yang dikatakan petugas KPH:

Masyarakat tergantung kita sebagai petugas. Kalau petugasnya baik mereka akan menerima. Ujung-ujungnya kita butuh asupan suplemen (keuangan) dan SDM, resort tidak punya dana, pengelolaan pemberdayaan masyarakat. (E/Pegawai KPH).

Perluasan jaringan misalnya menggandeng pihak-pihak yang belum bergabung untuk terlibat dalam kegiatan bersama sangat diperlukan. Para pihak yang selama ini banyak terlibat dalam pemberdayaan di kawasan Sesaot banyak berasal dari instansi bidang kehutanan. Diharapkan dengan melibatkan banyak stakeholder selain kehutanan akan mempermudah upaya penyelesaian masalah dengan beragam pendekatan.

1.4.3. Akuntabilitas

Fasilitator memainkan peran penting dalam program perhutanan sosial di Kawasan Sesaot. Mereka memiliki mekanisme akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan para pihak. Peran penting yang dimiliki dalam program mengharuskan mereka terus memperbaiki akuntabilitas. Penguatan aspek akuntabilitas lembaga fasilitator akan menguatkan output program pemberdayaan (Kilby, 2011). Stakeholders yang terdiri dari jaringan NGO, pemerintah, swasta, dan masyarakat menjaga hubungan dengan sesama mereka agar saling terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak lain. Fasilitator menyiapkan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan banyak pihak. Staf LSM mengatakan :

Kalau di skema kegiatan kita namanya kick off meeting seperti sosialisasi, kita mau ngapain sih dalam jangka waktu tertentu, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat instansi tertentu dinas LHK, termasuk pemerintah desa. Kalau kita akan bekerja durasi tertentu, manfaatnya seperti ini, penerima manfaat akan kita sampaikan. Kita ada strategi planning kaya renstra, renstra mengakomodir kepentingan nasional provinsi, nasional, dan global. (Sy/Staf LSM).

Perencanaan pengelolaan dalam tata kelola hutan merupakan ketentuan formal dan instrumen kontrol kegiatan. KPH memiliki Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) yang disusun berdasar masukan dari berbagai *stakeholder* terkait. Begitu juga dengan LSM yang melakukan evaluasi program agar kualitasnya dapat terjaga, dan sebagai pertanggungjawaban kepada para pihak. Staf LSM mengatakan:

Setiap kali kegiatan, nanti di tengah kegiatan kita akan buat pelaporan berkala mengenai perkembangan yang kita lakukan misalnya pelatihan sekian orang, kita sampaikan ke semua pihak, kita menggunakan pendekatan kolaboratif manajer. Jadi proyek ini bukan hanya kita saja

tapi milik semua pihak. Ini penting untuk pertanggung jawaban ke donor, jadi ada kepercayaan. (S /Staf LSM).

Informasi program merupakan kewajiban yang harus disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kegiatan ke para pihak. Dengan pelaporan yang baik diharapkan meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam kegiatan pemberdayaan. Semakin baik informasi yang tersampaikan kepada lembaga donor akan semakin meningkatkan kepercayaan para donor pada kegiatan yang dilaksanakan.

1.4.4. Lembaga Lokal sebagai agen dalam pemberdayaan

Kelembagaan di sekitar kawasan hutan Sesaot terbagi menjadi dua yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal berkaitan dengan kegiatan sosial dan budaya antara lain besiru, kelompok dzikir, pengajian, arisan, kesenian, olahraga, dan kepemudaan. Kelembagaan formal berkaitan dengan pemerintahan antara lain : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok wisata, kelompok perempuan, dan kelompok petani.

Kelompok tani merupakan lembaga formal karena berstruktur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu lembaga formal yaitu kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 1. Kelompok tani memiliki peran salah satunya sebagai pintu masuk informasi dari para pihak ke petani. Anggotanya terdiri atas petani-petani yang berada pada satu kesatuan wilayah, dan mereka memiliki hak dan kewajiban sama. Petani memiliki hak berpendapat dalam rapat. Namun ketika yang disampaikan berseberangan dengan aturan, kelompok tani dapat menolak pendapat tersebut. Ketua kelompok tani mengatakan :

Semua apapun bentuk masukan untuk kelompok akan kita terima. Seperti untuk menanam jenis-jenis tanaman tertentu, kita sangat senang ada masukan. Akan tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan akan kita tolak. (S/Ketua kelompok tani).

Suara petani dapat membantu organisasi menjadi lebih baik jika apa yang disampaikan direspon secara tepat. Dalam sejarah pengelolaan hutan memperlihatkan bahwa masyarakat sekitar hutan tidak terbiasa dengan organisasi formal yang birokratis. Mereka mengelola sumber daya berdasar nilai-nilai lokal misalnya *besiru*, yaitu jenis kearifan lokal kegiatan gotong royong. *Besiru* yang dilakukan dalam kegiatan kehutanan misalnya membuat jalan di hutan, menata lahan garapan, menanam, dan lain sebagainya. Kegiatan ini mirip sistem arisan. Arisan biasanya menggunakan uang atau barang sebagai objeknya, sedang *besiru* menggunakan tenaga kerja. Pada perhutanan sosial, petani diwajibkan berorganisasi bersama kelompok tani. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah merangkul banyak pihak misalnya LSM yang berpotensi dalam menjembatani kebutuhan lembaga tani yang bersifat formal dengan kondisi riil masyarakat sekitar hutan yang masih menggunakan kearifan mereka. Harapannya adalah petani dapat mengikuti kegiatan termasuk masyarakat rentan yang tidak masuk program PS. Strategi semacam itu memunculkan tokoh lokal yang menjadi kepercayaan para pihak atau fasilitator sebagai penghubung dengan masyarakat lokal.

Fasilitasi dari proses pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat memiliki ide, inisiatif dan komitmen pada tujuan yang sudah ditentukan (Lemay-Hébert, 2012). Fasilitator mengharapkan kelompok tani mandiri dan terlepas campur tangan pihak lain, namun hal tersebut belum nampak. Staf KPH mengatakan:

beberapa waktu ini belum ada pertemuan, seharusnya mereka melakukan sendiri karena harapan kita mereka sudah mandiri, akan tetapi dalam kenyataannya mereka masih menunggu kita untuk mengadakan suatu kegiatan, padahal mereka sekarang sudah memiliki anggaran yang didapat dari iuran anggota". (E/ Pegawai KPH)

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut menjadi refleksi apakah substansi yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atukah masih memerlukan input lain ke masyarakat. Keluhan fasilitator pada hasil wawancara mengindikasikan bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan agar potensi inisiatif dari masyarakat dapat

diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri. Masih dominannya fasilitator tidak terlepas dari sejarah dimasa silam dalam pengelolaan hutan yang bersifat *top down*. Kebiasaan tersebut masih terasa hingga sekarang misalnya ketika ada pembangunan fisik fasilitas pariwisata masih mengandalkan fasilitator. Perubahan dari suasana informal ke formal atau dari yang sebelumnya besiru menjadi kelompok tani menjadi salah satu transformasi kelembagaan di desa. Namun perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan sikap masyarakat ketika menjalankan organisasi formal secara cepat.

Tabel 1. Kelompok Pengelola HKm di Kawasan Sesaot, Narmada

Nama Kelompok	Luas Garapan (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
KMPH Lebah Suren	236 116	116
Wana Abadi	100	104
Wana Lestari	215	218
Wana Dharma	130	675
Gapoktan Pakuan Abadi	118	114
KTH Patuh Angen	26	25
KTH Mandiri Bersama	25	30
KTH Bao Daye	114	87
KMPL Selen Aik	115	97
KTH Sedayu Indah	30	25
Gapoktan Alam Lestari	830,98	1279

Sumber : KPH Rinjani Barat (2019)

1.5. Hasil Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui PS adalah untuk peningkatan *skill* dan aset dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari sehingga berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi petani. Peningkatan itu misal petani mampu menyeleksi tanaman dengan baik sehingga hasilnya mengalami peningkatan, seperti yang diungkapkan Bapak Sup :

Kalau sekarang tanamannya lebih bagus karena yang ditanam dipilih-pilih, seperti benih Bangkok. Petani sekarang lebih milih jenis yang baik....Tapi sekarang ada nilai ekonomi komersilkan, dulu tidak, sekarang komoditinya lebih bagus..". (Su/Petani).

Berdasar wawancara mengindikasikan bahwa informan merasakan ada perbaikan kondisi hasil dari tanaman di hutan. Sejak beberapa tahun ini para pihak mengenalkan kopi sambung, durian sambung, dan tanaman berkualitas lainnya yang diyakini produksi buahnya bagus. Biasanya setelah ada petani berhasil mengusahakan jenis komoditas tertentu, kemudian petani yang lain belajar kepada petani yang menjadi *role model* tersebut. Keberhasilan dalam pembelajaran pengusaha komoditas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan lebih banyak dipengaruhi jaringan di desa yang menjadi panutan apakah itu individu atau kelompok. Itulah pentingnya bagaimana memunculkan kader atau panutan lokal atau *local champion* yang dapat diterima masyarakat sekitar agar apa yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang diungkapkan staf LSM :

Itu yang kita lakukan termasuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ibu-ibu, misalnya pengolahan produk kita latih sehingga ada beberapa anggota kelompok yang kemudian menjadi mentor bagi yang lain, kemudian membantu kita di lapangan untuk menjelaskan ke pihak yang lebih luas.... (Sy/Staf LSM).

Dari hasil wawancara menegaskan tentang pentingnya memunculkan tokoh-tokoh lokal yang akan dijadikan kader fasilitator lokal atau *local champion*. Penciptaan kader ini bertujuan agar ketika program selesai masih ada beberapa penduduk yang menggantikan peran fasilitator dari lembaga

formal. Keberlanjutan program sangat penting agar sumber daya yang digunakan selama ini dapat terus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk dimasa yang akan datang.

Aset yang berupa tanaman MPTS memiliki nilai yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, tanaman durian pada masa awal penanaman memiliki nilai ekonomi kecil, namun ketika sudah tumbuh besar dan berbuah rutin nilainya akan semakin meningkat. Investasi tanaman MPTS seperti durian menjadi populer terutama beberapa pihak mengenalkan jenis durian dengan buah besar, tidak tergantung musim, dan rasa yang unik. Kondisi ini mendorong petani menanam durian di lahan mereka lebih banyak lagi. Bersamaan dengan tanaman durian, petani juga banyak mengusahakan tanaman seperti alpukat, empon-empon, umbi-umbian, pisang, aren, dan lain sebagainya. Tanaman yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan harian, bulanan, dan tahunan.

Hasil tanaman di hutan dapat dinikmati petani dan keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perubahan terjadi di desa setelah petani berhasil mengusahakan HKm karena hasilnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pernyataan Bapak Sup:

Sekarang ini banyak yang sukses terutama di Rumbuk, karena garapan, Dia bangun rumah Dia ekonominya tinggi itu karena HKm nya bagus. Karena Dia terlalu dekat dengan lahan dan kebanyakan tidak punya kebun, sehingga intens di hutan... Ya dari aren kopi sambung ya durian. Kalau Dia satu arah Rumbuk, tapi Kita ada sawah sehingga tidak fokus..."(Su/Petani).

Pengusahaan berbagai komoditas di HKm dilakukan dengan cara agroforestry. Petani mengusahakan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di sela tanaman kayu. Pengusahaan dengan cara agroforestry memaksimalkan potensi penggunaan lahan untuk mencukupi pendapatan keluarga petani. Penggarap yang lokasinya jauh dari hutan biasanya memiliki pekerjaan lain misalnya petani sawah, sehingga mereka tidak fokus memanfaatkan program HKm. Inilah yang menyebabkan perbedaan antara petani yang dekat dengan hutan yang biasanya intens mengerjakan di hutan sebagai pekerjaan pokok dengan petani yang agak jauh dari hutan yang menggarap hutan untuk tambahan pendapatan.

Namun program PS juga mengisahkan kepiluan pada sebagian warga. Tidak semua masyarakat sekitar hutan mendapat akses HKm karena keterbatasan sumberdaya hutan yang tersedia untuk dibagi secara merata dengan penduduk yang lain. Pada awal pembagian lahan garapan, penggarap mendapatkan lahan sesuai kesepakatan dalam kelompok. Seiring berjalannya waktu, interaksi antar warga membuat hubungan-hubungan transaksi sosial ekonomi berjalan secara alami. Tanah merupakan aset yang dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup, termasuk jika sedang terdesak dalam permasalahan keuangan dengan cara menawarkan lahan garapannya kepada orang lain untuk diganti dengan sejumlah uang. Jika hal ini terus berlangsung maka hanya orang tertentu saja yang memiliki lahan yang luas. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil petani yang terus mengecil pada satu sisi dan disisi lain ada petani yang hasil hutannya semakin membesar. Program perhutanan sosial secara rata-rata berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi disisi lain program ini juga menyebabkan kesenjangan di pedesaan. Seorang petani Bapak Sup mengungkapkan tentang penyebab perbedaan kepemilikan lahan garapan pada HKm sebagai berikut:

Setiap orang beda lahan garapan, waktu L U dikasih lahan, kemudian ada yang dipindahtangankan, itu kan tidak rata dulu katanya diratakan, tapi karena ada yang berpindah transmigrasi sehingga luasnya berbeda beda. Ada yang sampai punya 2 hektar ada yang 12 are. Paling paling rendah disini 7 are, tapi dirumbuk itu 1 hektar ke atas. (Su/Petani).

Dari wawancara dengan Bp Sup memperlihatkan bahwa ketika awal pembagian lahan penggarap mendapat jatah tanah garapan dengan luasan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, luasan kepemilikan lahan garapan berubah dari awal pembagian. Penyebabnya seperti perubahan struktur sosial ekonomi seperti kasus kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, jual beli, dan lain sebagainya yang berubah setiap waktu. Pengawasan dari kelompok tani masih minim dalam mengontrol pindah tangan lahan garapan. Kontrol kelompok tani diperlukan agar dikemudian hari penguasaan lahan garapan HKm tidak menyebabkan kesenjangan di dalam kawasan HKm.

4. Pembahasan

1.6. Perbaiki proses pemberdayaan

Empat elemen pemberdayaan sebagaimana pendapat Narayan (2002) yaitu informasi, akuntabilitas, kelembagaan lokal, dan partisipasi membantu analisis studi ini. Keempatnya saling berkaitan, misalnya partisipasi petani dipengaruhi informasi yang disampaikan dan diterima secara tepat, akuntabilitas lembaga yang baik, dan organisasi lokal yang mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan.

Pada proses pemberdayaan di Sesaot, petani memperoleh informasi PS lewat sosialisasi dari lembaga terkait yang menjadi fasilitator. Pada saat sosialisasi, fasilitator juga berupaya agar memperoleh informasi masukan berupa keinginan dan harapan petani pada PS. Informasi ini penting dalam menentukan kegiatan selanjutnya. Misinformasi antara masyarakat dan lembaga fasilitator menyebabkan hambatan yang tidak dapat dihindari. Misalnya ketika petani harus memilih jenis PS apakah HKm atau Kemitraan. Pada saat itu terjadi jalan buntu di antara kedua belah pihak yang saling mempertahankan pendapatnya. Petani menganggap kemitraan memiliki beban iuran lebih besar dibanding HKm, dan tidak bebas menentukan tanaman. Namun berdasar aturan keduanya memiliki iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar pemegang izin lahan garapan. Fakta ini menunjukkan sosialisasi tidak efektif karena menimbulkan kecurigaan petani. Menurut penelitian Waddington et al. (2014) menemukan bahwa tidak efektifnya sosialisasi ke petani karena: penyampaian materi secara *top-down*, menggunakan pendekatan alih teknologi, substansi tidak sesuai atau relevan dengan konteks lokal, ketidakseimbangan dalam hubungan petani dan fasilitator, dan fasilitator menggunakan bahasa asing (bukan lokal). Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi lokal juga sering terjadi dalam pengelolaan kehutanan seperti penelitian Suharjo & Wulandari (2019). Perencanaan yang memperhatikan kondisi lokal membantu program PS berjalan baik. Hal ini karena penduduk lokal akan lebih mudah memahami materi ketika isinya sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan mereka.

Saluran komunikasi sekarang ini memudahkan petani dalam memperoleh informasi tentang kehutanan misalnya lewat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi ini meningkatkan literasi dan kemandirian petani dalam PS. Namun, latar belakang penggarap/petani beragam dari pendidikan, ekonomi, dan usia. Sebagian besar penggarap berada pada kondisi sosial ekonomi rentan. Keadaan seperti ini mengurangi kepekaan mereka terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Mittal & Mehar (2016) melalui penelitiannya menyatakan bahwa akses informasi petani dipengaruhi karakteristik sosial petani seperti umur, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Biasanya di Sesaot penyampaian informasi melalui pertemuan yang melibatkan penggarap dalam sebuah forum di kelompok-kelompok tani. Mungkin kedepan perlu strategi baru dengan tujuan agar petani lebih mudah mendapat informasi penting tentang perhutanan sosial.

Para pihak mengajak masyarakat untuk aktif dalam PS. Lembaga dapat menggerakkan partisipasi dengan insentif (Chapman et al., 2019; Luo et al., 2014; Liu et al., 2018). Insentif yang sudah dilakukan di kawasan Sesaot antara lain berupa izin tanam, bantuan bibit, modal usaha, pelatihan, dan bantuan alat. Pemberian ini membantu kelancaran program, misalnya reboisasi yang dilakukan beriringan dengan izin penanaman MPTS dan tumpang sari pada era 80 an di kawasan Sesaot memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibanding dengan kegiatan yang tidak ada insentif. Para pihak juga dapat mengembangkan partisipasi dengan membuat aturan yang mendukung petani misalnya pengaturan harga yang sesuai (Zakaria, 2010). Namun Berglund et al. (2013) berpendapat lain dengan melihat bahwa partisipasi yang dipengaruhi oleh insentif tidak melatih belajar petani dan keberlanjutannya dipertanyakan. Hal senada juga diungkap Sahide et al. (2020) melihat bahwa partisipasi yang dilakukan dalam suasana formal seperti pemberian insentif membuat ketidakpedulian petani dan lambat laun mengancam perencanaan hutan menjadi turun kualitasnya. Dari sini fasilitator harus lebih cermat dalam melihat kondisi masyarakat agar cara-cara pendekatan terhadap masyarakat memperoleh hasil baik. Fasilitator dapat memadukan pendekatan formal dengan non formal dalam memunculkan partisipasi. Perpaduan ini saling melengkapi satu sama lain. Misalnya masyarakat lokal

memiliki cara gotong royong yang dikenal dengan *besiru* yang efektif dalam menjaga partisipasi masyarakat dalam aktivitas kehutanan. Nilai lokal *besiru* bisa dimasukkan kedalam kelembagaan kelompok tani yang bersifat formal.

Kepercayaan masyarakat pada program dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam program PS. Fasilitator melaporkan kegiatan sebagai bentuk penggunaan sumber daya yang dilakukan secara akuntabel. Pertanggungjawaban dapat berupa respon positif fasilitator kepada para pihak yang meminta informasi pelaksanaan program. Misalnya laporan rutin kegiatan LSM kepada donor. Kepercayaan masyarakat harus dijaga karena menurut Mbeche & Dorward (2014) apabila tingkat kepercayaan petani turun menyebabkan mereka tidak berimprovisasi di lahan garapan sehingga terkesan program dibiarkan. KPH memberi informasi kegiatannya lewat media sosial, dan website Dinas Kehutanan NTB. Namun informasi luaran kegiatan kurang informatif karena dilakukan tidak rinci per item kegiatan. Laporan lebih banyak diketahui kalangan tertentu, sedangkan masyarakat secara umum belum peduli dengan proses akuntabilitas suatu program.

Kapasitas organisasi lokal merupakan perpaduan dari kemampuan menggerakkan anggota untuk bekerja sama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya dalam pemecahan masalah bersama (Narayan, 2002). Namun peran lembaga kelompok tani lebih banyak di bingkai dalam kegiatan formal. Kebiasaan semacam ini akan semakin menguatkan peran pemerintah dan melemahkan peran masyarakat lokal (Fisher & Muur, 2020). Kebiasaan lama di pedesaan yang biasa dengan gotong royong lambat laun terganti dengan kegiatan bersifat keproyekan. Pergantian suasana ini turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan. Hanya sedikit anggota petani yang memahami tentang lembaga kelompok tani dalam arti formal. Posisi elit desa dalam bidang perhutanan sosial yang sebelumnya sudah memiliki posisi sosial ekonomi baik menjadi lebih kokoh. Formalisasi hak pengelolaan dan pemanfaatan menjadikan perhutanan sosial lebih birokratis (Erbaugh, 2019). Persyaratan berbagai kegiatan sebelum dan setelah perhutanan sosial terdiri dari aturan yang tertuang dalam berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga peraturan kelompok tani. Hal ini juga sama dengan penelitian Purnomo et al. (2022) melihat bahwa kelompok tani pada program perhutanan sosial merupakan organisasi formal dimana keputusan dominan dipegang elit, dan petani secara umum kurang merasakan manfaat dari organisasi tersebut.

1.7. Mempertanyakan hasil pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan sebelum dan setelah program berjalan. Pemberdayaan menekankan pada proses menaikkan taraf hidup masyarakat rentan (Agarwal, 2020). Pemberdayaan berhasil adalah ketika tujuan yang tercantum dalam perencanaan dapat terwujud (Uphoff, 2005). Menurut Narayan (2002) keberhasilan pemberdayaan dilihat dari ukuran asset dan kemampuan individu untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban lembaga (Narayan, 2002). Peningkatan aset dapat mendekatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan sosial lainnya (Narayan, 2002).

Wawancara dengan petani memperlihatkan ada peningkatan usaha pertanian berbentuk aset dan keterampilan individu dalam pengusahaan komoditas tertentu. Petani selektif dalam memilih tanaman apa yang akan diusahakan. Sikap ini berkaitan dengan keuntungan yang sudah diproyeksikan petani. Hal ini juga sama dengan penelitian Lee et al. (2017) memperlihatkan bahwa PS meningkatkan kemampuan petani dalam penyiapan lahan dan pemilihan tanaman unggul. Pada saat ini penanaman jenis HHBK dan MPTS memiliki prospek bagus dalam peningkatan ekonomi petani. Namun di lokasi penelitian tidak semua petani mendapat hasil yang sama. Petani memperoleh hasil berbeda karena intervensi dalam pengelolaan lahan beragam. Menurut Dinas LHK NTB dalam Suradireja et al (2018), keberhasilan PS di NTB tidak merata pada tiap petani tergantung pada: 1) Kondisi lahan, 2) waktu pengerjaan lahan, 3) kemampuan petani, dan 4) intervensi pihak lain. Para pihak perlu memperhatikan dampak program PS pada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di desa dikemudian hari agar tidak semakin besar dan keadilan program semakin diperhatikan. Selain itu para pihak perlu menggali kearifan lokal untuk mendukung program, karena penguatan modal sosial dapat membantu program kehutanan berjalan baik (Rakatama & Pandit, 2020; Lee et al., 2017; Roslinda et al., 2017).

Program PS yang telah berjalan memiliki dua dimensi. Pada satu sisi perhutanan sosial telah berhasil mendistribusikan tanah negara kepada masyarakat sekitar hutan secara sah. Hal ini dimanfaatkan masyarakat sebagai kesempatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun pada sisi yang lain ada sebagian masyarakat yang belum siap dalam menjalankan sistem baru yaitu perhutanan sosial yang lebih terstruktur dan birokratis. Ada sebagian masyarakat yang masih memerlukan perhatian karena mereka tersisih untuk dapat mengembangkan diri. Perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan kepada masyarakat yang masih rentan tersebut agar mampu meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi lebih baik.

5. Kesimpulan

Studi ini ingin menunjukkan bagaimana proses pemberdayaan sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan program PS. Analisa menggunakan teori pemberdayaan yang menjelaskan mengenai dukungan pemberdayaan berupa informasi, akuntabilitas, partisipasi, dan dukungan lembaga lokal begitu penting untuk diterapkan. Ketika proses pemberdayaan sesuai target yang ditentukan diharapkan program pemberdayaan berjalan baik. Namun ketika proses tersebut bermasalah, bisa jadi keberhasilan programnya kecil. Idealnya program perhutanan sosial ingin memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan perusahaan berbagai komoditas kehutanan. Hasilnya untuk memajukan kondisi sosial ekonomi dan peningkatan aset sekaligus kapasitas petani. Kenyataannya program menghasilkan luaran yang beragam. Intervensi yang dilakukan tanpa memahami konteks lokal akan semakin membuat kondisi tidak seimbang. Yaitu dimana ada masyarakat yang terus meningkat perekonomiannya dengan apa yang diusahakan, namun ada sekelompok masyarakat yang kurang beruntung karena ada keterbatasan pada akses dan kemampuan mengolah sumber daya yang ada.

Proses dalam program PS memiliki karakter yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Program terkesan kaku ketika kurang improvisasi dan menyamakan cara-cara yang digunakan untuk semua lokasi. Para pihak perlu mengekspresikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kondisi setempat, namun tidak boleh melupakan dasar-dasar pelaksanaan program seperti akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terbangun, begitu juga dengan informasi, partisipasi, dan peran lembaga lokal. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu lama dan dibutuhkan kerja keras dari para pihak bukan kerja periode keproyekan.

6. Saran

Keberhasilan pemberdayaan dilihat dari penambahan aset yang menunjukkan perbaikan kuantitas dan kualitas yang diperoleh dari kawasan hutan. Namun hal ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir pada petani secara umum, karena masih ada diantara mereka yang belum berhasil. Untuk kedepannya diperlukan evaluasi terhadap program yang berjalan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Fasilitator dapat menguatkan posisi sebagian petani yang belum tersentuh secara baik dan belum menunjukkan perkembangan perusahaan. Perlakuan bertujuan agar PS berhasil secara bersama-sama dan mencegah terjadinya kesenjangan masyarakat di sekitar hutan.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (2020). Does group farming empower rural women? Lessons from India's experiments. *The Journal of Peasant Studies*, 47(4), 841–872. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1628020>
- Andersson, K. P., Gibson, C. C., & Lehoucq, F. (2004). The Politics of Decentralized Natural Resource Governance. *PS: Political Science & Politics*, 37(3), 421–426. <https://doi.org/10.1017/S1049096504004597>
- Berglund, B., Hallgren, L., & Aradóttir, Á. L. (2013). Cultivating Communication: Participatory Approaches in Land Restoration in Iceland. *Ecology and Society*, 18(2), art35. <https://doi.org/10.5751/ES-05516-180235>
- Chapman, M., Satterfield, T., & Chan, K. M. A. (2019). When value conflicts are barriers: Can relational values help explain farmer participation in conservation incentive programs? *Land Use Policy*, 82, 464–475. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.017>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ>
- de Jong, W. (2012). Discourses of community forestry. *Forest-People Interfaces*, 107–120. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-749-3_6
- Djamhuri, T. L. (2008). Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: the effect of incentive structure and social capital. *Agroforestry Systems*, 74(1), 83–96. <https://doi.org/10.1007/s10457-008-9150-5>
- DLHK NTB. (2021). *No Title*. Tingkatkan Sinergitas Untuk Pemberdayaan Kemitraan Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan. <https://dislhk.ntbprov.go.id/2021/06/15/tingkatkan-sinergitas-untuk-pemberdayaan-kemitraan-perhutanan-sosial-dan-kemitraan-lingkungan/>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fisher, M.R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Fisher, Micah R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Fisher, Micah R., & van der Muur, W. (2020). Misleading Icons of Communal Lands in Indonesia: Implications of Adat Forest Recognition From a Model Site in Kajang, Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 55–76. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670244>
- Galudra, G. (2019). Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5995>
- Kilby, P. (2011). *NGOs in India : the challenges of women's empowerment and accountability*. Routledge.
- KPH_Rinbar. (2019). *Makalah Perkembangan (IUPHKm) Batu Mekar "Gapoktan Alam Lestari*. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat.
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141. <https://doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>
- Lemay-Hébert, N. (2012). Coerced transitions in Timor-Leste and Kosovo: managing competing objectives of institution-building and local empowerment. *Democratization*, 19(3), 465–485. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.674358>
- Liu, M., Yang, L., Bai, Y., & Min, Q. (2018). The impacts of farmers' livelihood endowments on their participation in eco-compensation policies: Globally important agricultural heritage systems case studies from China. *Land Use Policy*, 77, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.054>
- Luo, L., Wang, Y., & Qin, L. (2014). Incentives for promoting agricultural clean production technologies in China. *Journal of Cleaner Production*, 74, 54–61. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.045>
- Mbeche, R. M., & Dorward, P. (2014). Privatisation, empowerment and accountability: What are the policy implications for establishing effective farmer organisations? *Land Use Policy*, 36, 285–295. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.014>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Mittal, S., & Mehar, M. (2016). Socio-economic Factors Affecting Adoption of Modern Information and Communication Technology by Farmers in India: Analysis Using Multivariate Probit Model. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 22(2), 199–212. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2014.997255>
- MoEF. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- MoEF. (2021). *Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2021*. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Waty Bong, I., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15239>
- Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 tentang Program Kemitraan Kehutanan. (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa. (n.d.).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan*

Sosial.

- PP No. 6 Tahun 2007. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Purnomo, M., Hadiwiyono, E., Andriatmoko, N. D., Pariasa, I. I., Kustanti, A., & Faust, H. (2022). Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project. *SAGE Open*, 12(1), 215824402210821. <https://doi.org/10.1177/21582440221082144>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- ROSLINDA, E., EKYASTUTI, W., & KARTIKAWATI, S. M. (2017). Social capital of community forest management on Nusapati Village, Mempawah District, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(2), 548–554. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180215>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Suharjo, D., & Wulandari, C. (2019). A reflection of Social Forestry in 2019: Towards inclusive and collaborative government approaches. *Forest and Society*, 3(1), 137. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6099>
- Suradireja, D. Y., Pramaria, A., Markum, Santoso, W. J., & Hakim, M. R. (2018). *Menoleh Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan. Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok*. CV Bee Media Publisher.
- Uphoff, N. (2005). Analytical Issues in Measuring Empowerment at the Community and Local Levels. In D. Narayan (Ed.), *Measuring Empowerment : Cross Disciplinary Perspectives*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7441>
- Waddington, H., Snilstveit, B., Hombrados, J., Vojtkova, M., Phillips, D., Davies, P., & White, H. (2014). Farmer Field Schools for Improving Farming Practices and Farmer Outcomes: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1). <https://doi.org/10.4073/CSR.2014.6>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zakaria, A. K. (2010). Program Pengembangan Agribisnis Kedelai Dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 29(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/jp3.v29n4.2010.p147-153>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Pengaruh Kompetensi Petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Terhadap Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat Miskin

Ruaida Murni ^{1*}  Hari Harjanto Setiawan ¹ 

¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: ruai001@brin.go.id ; Tel: +62 081514190867

Diterima: 6 Mei 2020; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Kompetensi petugas pada Sistem Layanan Terpadu (SLRT) terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin. SLRT merupakan salah satu solusi untuk menyatukan layanan pemerintah bagi keluarga miskin. Hal ini membutuhkan Kompetensi petugas yang mampu memberikan pelayanan kepada penerima manfaat secara maksimal. Metode yang digunakan adalah kuantitatif didukung data kualitatif. Responden terdiri dari petugas dan penerima manfaat. Lokasi penelitian adalah SLRT di Indonesia dengan cara stratifiet random sampling. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan; a) seberapa pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kualitas layanan; b) seberapa besar pengaruh ketrampilan terhadap kualitas layanan dan seberapa besar pengaruh konsep diri terhadap kualitas layanan. Penelitian ini akan bermanfaat secara praktis untuk mengembangkan kapasitas SLRT dan untuk pengembangan keilmuan Kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, kapasitas petugas sangat signifikan berpengaruh terhadap pelayanan bagi masyarakat miskin. Petugas memahami secara keseluruhan yang terkait dengan pelayanan, memahami Pedoman Umum, program Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Memiliki keterampilan yang mampu membantu menyelesaikan masalah dan menindak lanjuti keluhan penerima manfaat. Memiliki sikap tidak pilih kasih terhadap penerima manfaat, selalu siap membantu menyelesaikan keluhan, bersikap sopan, ramah dan dapat memberi penjelasan dengan baik. Penelitian ini berkontribusi dalam praktek Pekerjaan sosial khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Kopetensi, Petugas, Kualitas Layanan

This study aims to see the effect of the competence of officers in the Integrated Service System (SLRT) on the quality of service for the poor. SLRT is one of the solutions to realize government services for poor families. This requires the competence of officers who are able to provide maximum service to beneficiaries. The method used is quantitative supported by qualitative data. Respondents consisted of officers and beneficiaries. The research location is SLRT in Indonesia by means of random sampling stratification. This research will answer the question; a) how much influence does science have on service quality; b) how much influence skills have on service quality and how much influence self-concept has on service quality. This research will be of practical use for developing SLRT capacities and for the development of social welfare scientific work. Research shows that the capacity of officers has a very significant effect on services for the poor. The officer understands everything related to services, understands General Guidelines, Government programs in poverty alleviation and social protection. Have skills that are able to help solve problems and follow up on beneficiary complaints. Have a non-discriminatory attitude towards beneficiaries, always ready to help answer complaints, please be polite, friendly and able to provide good explanations. This research contributes to the practice of social work, especially in dealing with poverty problems.

Keywords: Poverty, Competence, Officers, Service Quality

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan Fenomena sosial yang tidak hentinya dibicarakan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat yang terdampak dan atau masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan ketidak mampuan orang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan hidup keluarganya, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan lain (Adi, 2005). Permasalahan yang muncul seperti anak putus sekolah, anak terlantar, anak nakal, orang lanjut usia terlantar dll (Ward & Birgden, 2007). Munculnya permasalahan ini perlu diantisipasi dengan cara meningkatkan tarap hidup masyarakat. Karena kemiskinan merupakan ketidak mampuan orang atau keluarga dalam memenuhi. Sehingga pola asuh anak dari keluarga miskin akan mempengaruhi perkembangan anak (Setiawan, 2014).

Pemerintah dengan berbagai program telah melakukan upaya peningkatan tarap hidup masyarakat miskin. Namun masih belum secara penuh dapat menjangkau atau menanggulangi kemiskinan karena berbagai hal, salah satunya adalah karena keluarga miskin belum dapat mengakses semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini karena pelayanan sosial yang diberikan masih belum optimal, belum ada keterpaduan pelayanan atau masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Sementara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 5 bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya Pemerintah agar masyarakat miskin mampu mengakses semua pelayanan sosial, adalah dengan menyatukan atau memadukan pelayanan sosial menjadi satu pintu yang disebut juga dengan One Stop Services, maka Pemerintah membentuk satuan pelayanan yaitu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik (Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018, 2018). Melalui SLRT masyarakat miskin dapat melaporkan keluhannya dan kebutuhan pelayanan yang diinginkan, dan kemudian petugas SLRT akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin sebagai penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada di SLRT. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan SLRT sudah tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan pelayanan terhadap penerima manfaat, memiliki kompetensi serta harus didukung oleh pasilitas SLRT yang mencukupi (Setiawan et al., 2020). Bagaimana kondisi sumber daya manusia atau petugas SLRT maka perlu dilakukan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui kondisi petugas SLRT yang melakukan pelaksanaan pelayanan terhadap penerima manfaat. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola SLRT sebagai tambahan bahan penyusunan program SLRT khususnya terkait dengan petugas SLRT.

SLRT didirikan sejak tahun 2016 di 50 Kabupaten/Kota dan Puskesmas di 100 desa/kelurahan. Pada tahun 2017 dikembangkan lagi di 20 Kabupaten Kota dan Puskesmas sebanyak 40 desa/kelurahan. Pada tahun 2018 dikembangkan 60 kabupaten kota dan Puskesmas di 120 desa/kelurahan. Diharapkan pada tahun 2019, jumlah daerah sebagai penyelenggara SLRT mencapai 150 kabupaten/kota, semuanya masih dalam anggaran APBN. SLRT berkedudukan di daerah tingkat II sedangkan Puskesmas berkedudukan di Desa/kelurahan. Sejalan dengan perkembangan SLRT dan banyak manfaat yang dirasakan oleh warga miskin, sehingga Pemerintah Daerah tertentu mengembangkannya dengan menyelenggarakan SLRT dan Puskesmas secara mandiri dengan anggaran APBD. Melalui Puskesmas lebih banyak lagi keluarga penerima manfaat yang dapat mengakses pelayanan kesejahteraan sosial

untuk penyelesaian permasalahannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya (Setiawan et al., 2021).

Sistem ini memberikan pelayanan kepada penerima manfaat atau orang yang tidak mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Pada dasarnya tujuan SLRT adalah 1) Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/layanan; 2). Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 3) Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif; 4). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam "pemutakhiran" Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah; 5). Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 6). Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan 7). Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Sedangkan fungsi SLRT meliputi: 1) Integrasi Informasi, Data dan Layanan SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan; 2) Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan maupun non kepesertaan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa/kelurahan untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut; 3) Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program SLRT menginventarisasi program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka; 4) Pemutakhiran DT-PPFM secara dinamis SLRT menyediakan daftar awal (prelist) yang menjadi basis verifikasi dan validasi DT-PPFM melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG). SLRT juga membantu memutakhirkan profil warga miskin dan rentan miskin yang ada dalam DT-PPFM

Berbagai tujuan dan fungsi SLRT yang dituangkan dalam kegiatan pelayanan terhadap penerima manfaat, pada akhirnya adalah meningkat kesejahteraan penerima manfaat. Kesejahteraan sosial pada prinsipnya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga. Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terpenuhinya kondisi sosial tersebut tentu melalui suatu proses yang sudah direncanakan. Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Friedlander yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Fahrudin, 2012). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial dalam prospek pelayanan sosial dapat dicapai melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan dari lembaga atau institusi yang memberi layanan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat, mencegah dan mengatasi masalah sosial, sehingga keadaannya menjadi sejahtera.

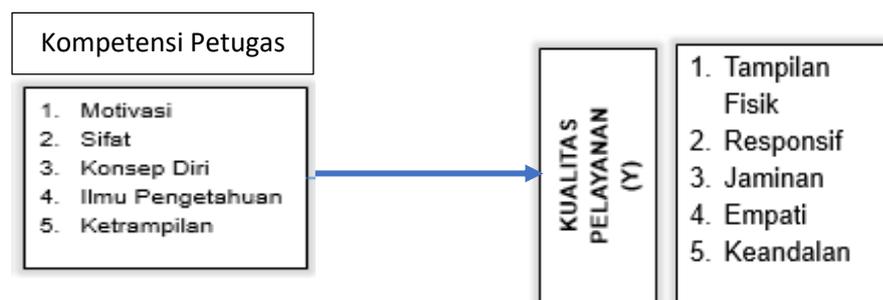
Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan

sosial (Gadjah Mada & Sosio Yustisia Yogyakarta, 2011). Hal seperti itu pulalah yang dilakukan oleh SLRT melakukan aktivitas berinteraksi dengan penerima manfaat dan instansi terkait dalam pelayanan untuk memecahkan permasalahannya. Penelitian ini akan menggambarkan pengaruh kompetensi petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin. Kompetensi petugas dimaksud adalah motivasi, sifat, konsep diri, ilmu pengetahuan, dan ketrampilan dan konsep diri. Sehingga penelitian ini akan menjawab pertanyaan; Seberapa pengaruh motivasi, sifat, konsep diri, ilmu pengetahuan, dan ketrampilan terhadap kualitas layanan. Penelitian ini akan bermanfaat secara praktis untuk mengembangkan kapasitas SLRT dan untuk pengembangan keilmuan Kesejahteraan sosial.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif (Creswell, 1994) yang akan menggambarkan hubungan antara variable yaitu kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas. Pertama, kualitas pelayanan yaitu berdasarkan teori *servqual* (Zeithaml et al., 2010). Disusun definisi konseptual variabel: Kualitas Pelayanan SLRT adalah karakteristik pelayanan yang diselenggarakan oleh SLRT yang terungkap dari *tangibles, responsiveness, assurance, empathy* dan *reability*. Dari definisi konseptual ini diperoleh 5 (lima) dimensi kajian : (1) Dimensi tampilan fisik, (2) Dimensi responsif, (3) Dimensi jaminan, (4) Dimensi empati, dan (5) Dimensi keandalan. Operasionalisasi variabel Kualitas Pelayanan SLRT dijabarkan menjadi 5 (lima) dimensi dan diturunkan menjadi 11 indikator penelitian. Dari 11 (sebelas) indikator tersebut dijadikan 20 (dua puluh) butir pertanyaan/ Pernyataan yang disampaikan kepada para responden penelitian (penerima manfaat).

Kompetensi Petugas adalah kepribadian dan kemampuan pelaksana SLRT dalam melaksanakan pekerjaan yang terungkap dari *Motives, Traits, Self-concept, Knowledge, dan Skill* (Spencer & Spencer, 1993). Dari definisi konseptual diturunkan menjadi 5 dimensi analisis: (1) Dimensi *Motives*; (2) Dimensi *Traits*; (3) Dimensi *Self-concept*; (4) Dimensi *Knowledge*; dan (5) Dimensi *Skill*. Kemudian kelima dimensi tersebut dikembangkan menjadi 15 indikator (variabel manifes). Definisi konseptual diturunkan lima dimensi kajian, meliputi: (1) Dimensi *Motives*, (2) Dimensi *Traits*, (3) Dimensi *Self-Concept*, (4) Dimensi *knowledge*, (5) Dimensi *Skills*. Kelima dimensi kajian dioperasonalkan menjadi 15 indikator (variabel manifest) untuk dijadikan 19 item pernyataan penelitian. Berikut adalah gambar kerangka piker hubungan antar variable:



Gambar 1. Ini adalah gambar kerangka pikir hubungan antar variable.

Hipotesis dari Penelitian ini adalah: Kompetensi Petugas yang terdiri dari motivasi, sifat, konsep diri, ilmu pengetahuan, dan ketrampilan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan SLRT. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan dengan data lapangan yang diolah dan dianalisa. Berdasarkan deskripsi teori kompetensi yang dipaparkan, maka penulis memilih teori kompetensi pendapat (Spencer & Spencer, 1993) yang menunjukkan lima dimensi kompetensi, berikut : (1) *Motives*; (2) *Traits*; (3) *Self-concept*; (4) *Knowledge*; dan (5) *Skill*, kemudian disusun definisi konseptual variabel bahwa Kompetensi Petugas adalah kepribadian dan kemampuan pelaksana SLRT dalam melaksanakan pekerjaan yang terungkap dari *Motives, Traits, Self-concept,*

Knowledge, dan Skill. Kisi-kisi operasional Variabel Kompetensi Petugas dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1. Konstruk operasional variable Kompetensi Petugas.

Variabel	Dimensi	Indikator
Kompetensi Petugas	Motifasi	1.1 Motivasi mengabdikan
		1.2 Motivasi melayani
		1.3 Motivasi berprestasi
	Sifat	2.1 Watak
		2.2 Sifat
		2.3 Kebiasaan
	Konsep diri	3.1 Briefing perencanaan operasional
		3.2 Komando pelaksanaan operasional
		3.3 Arahan tertulis
	Ilmu pengetahuan	4.1 Pengetahuan etika anggaran
		4.2 Pengetahuan administrasi anggaran
		4.3 Pengetahuan teknis anggaran
	Kerampilan	1.1 Keterampilan melaksanakan anggaran
		1.2 Keterampilan menilai hasil anggaran
		1.3 Keterampilan melaporkan anggaran

Sumber : (Spencer & Spencer, 1993)

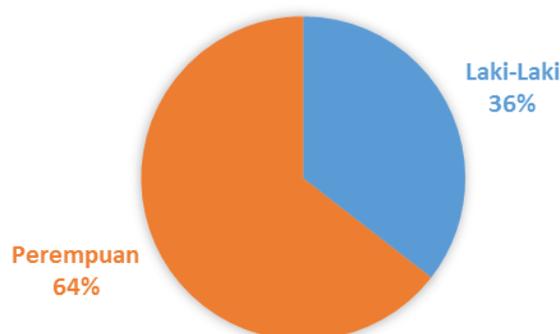
3. Hasil

Pada penelitian tentang Kualitas Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Indonesia ada dua karakteristik responden yang bisa digambarkan berdasarkan yaitu penerima manfaat dan petugas.

3.1 Profil Responden

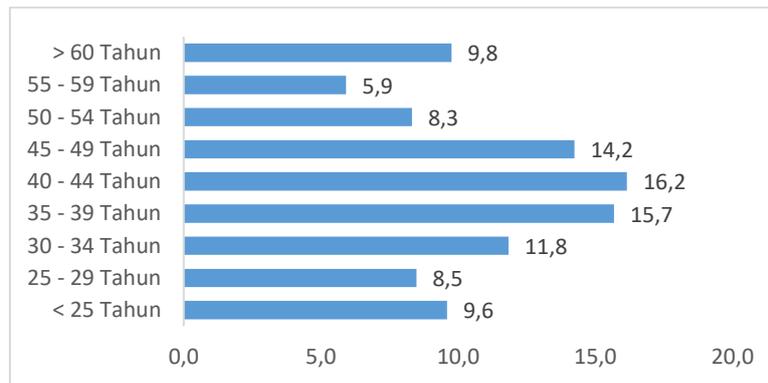
3.1.1 Penerima Manfaat

Karakteristik penerima manfaat akan menjelaskan tentang jenis kelamin, usia, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan bapak, pekerjaan ibu, penghasilan bapak, penghasilan ibu, keikutsertaan dalam program sosial, status kepemilikan tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga dan lingkup layanan yang diterima.



Gambar 2. Ini adalah gambar jenis kelamin penerima manfaat.

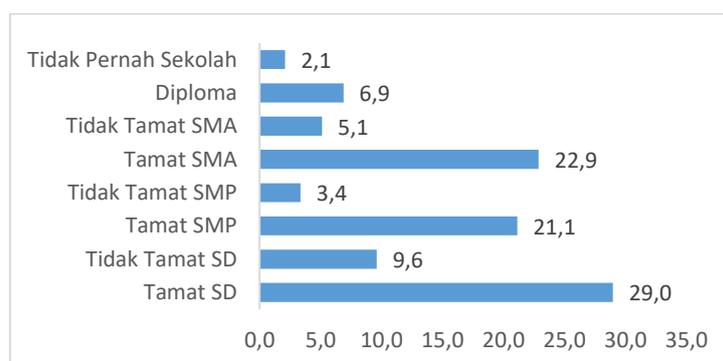
Hasil penelitian dengan sampel sebanyak 625 orang penerima manfaat menunjukkan bahwa jenis kelaminnya sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 64 persen. Sisanya adalah laki-laki sebanyak 36 persen. Perempuan masih mendominasi menjadi penerima manfaat SLRT karena laki-laki sebagian besar sibuk bekerja sehingga penyelesaian masalah rumah tangga dianggap sebagai urusan perempuan. Seharusnya tidak demikian, laki-laki yang harus menyelesaikan permasalahan sosial.



Gambar 3. Ini adalah gambar Usia Penerima Manfaat.

Gambar diatas menunjukkan bahwa usia penerima manfaat sangat beragam yaitu dari usia dibawah 25 tahun sampai diatas 60 tahun. Namun dalam rentang usia tersebut usia yang paling banyak adalah rentang usia antara 40 sampai dengan 44 tahun yaitu sebanyak 16,2 persen. Selanjutnya rentang usia 35 sampai dengan 39 tahun yaitu sebanyak 15,7 persen. Sedangkan yang paling sedikit adalah rentang usia 55 sampai dengan 59 tahun yaitu sebanyak 5,9 persen. Rentang usia 15-64 tahun adalah termasuk usia produktif. Yang di maksud usia produktif adalah saat dimana seseorang masih mampu bekerja secara maksimal dan masih bisa terus mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun banyak orang. Usia seperti ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga permasalahan ini seharusnya memperoleh perhatian dari pemerintah karena usia ini masih dapat dikembangkan untuk menjadi produktif.

Tingkat pendidikan perlu dilihat karena ada asumsi bahwa tingkat pendidikan berkorelasi dengan kesejahteraan suatu keluarga. Adapun tingkat pendidikan dari penerima manfaat dapat dilihat dalam diagram berikut;



Gambar 4. Ini adalah gambar tingkat pendidikan penerima manfaat.

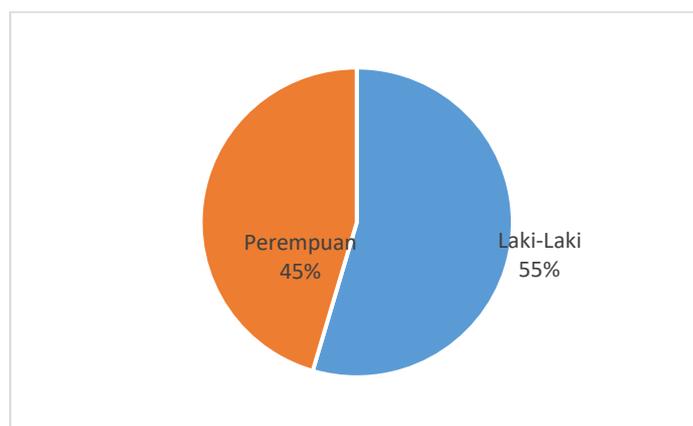
Gambar diatas memperlihatkan bahwa pendidikan penerima manfaat sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebesar 29 persen. Selanjutnya tamat SMA sebesar 22,9 persen dan tamat SMP sebesar 21,1 persen. Pada umumnya, permasalahan mengenai pendidikan dan kemiskinan

hampir serupa. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Dari data tersebut diatas membuktikan bahwaternyata penerima manfaat yang menjadi sasaran adalah penduduk miskin, ternyata pendidikannya adalah rendah.

3.1.2 Petugas SLRT

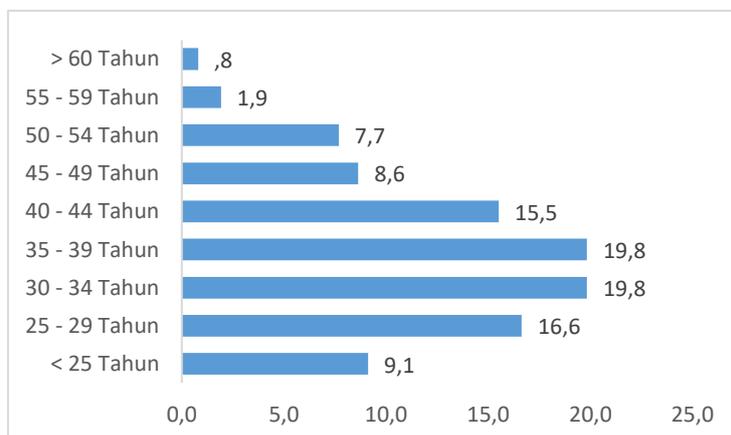
Selain penerima manfaat, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petugas SLRT yang terdiri dari manajer, supervisor, fasilitator, FO SLRT, BO SLRT, koordinator puskesmas, FO puskesmas, BO puskesmas. Selain itu ada beberapa daerah yang menambahkan kepengurusan antara lain pokja puskesmas, seksi pendidikan, sekretaris, bendahara, sekretaris SLRT. Pemilihan responden dilakukan melalui sistem random sehingga semua pengurus mempunyai hak yang sama menjadi responden. Berikut adalah jabatan petugas dalam SLRT.

Data menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah yang menjabat sebagai fasilitator sebanyak 69,3 persen karena persentase jumlah yang paling banyak adalah fasilitator yaitu ada 50 orang setiap kabupaten/kota.



Gambar 5. Ini adalah gambar jenis kelamin petugas SLRT.

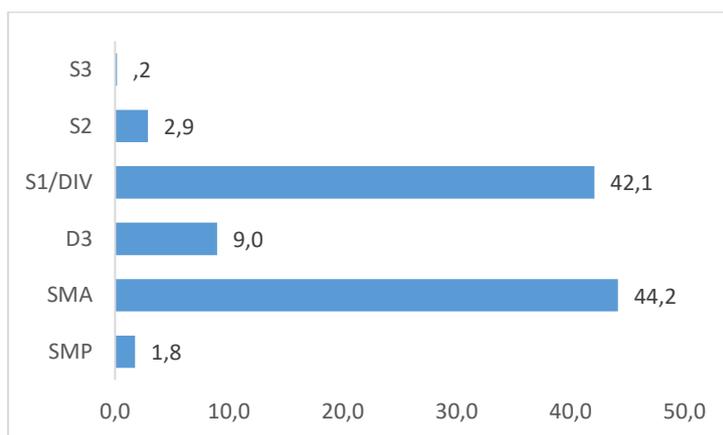
Bila dilihat jenis kelamin, maka sebagian besar petugas SLRT adalah laki-laki yaitu sebesar 55 persen. Hampir berimbang dengan jumlah petugas perempuan yaitu sebesar 45 persen.



Gambar 6. Ini adalah gambar usia petugas SLRT.

Usia petugas SLRT yang paling tinggi adalah berusia 30 sampai dengan 34 tahun dan 35 sampai dengan 39 tahun masing-masing adalah 19,8 tahun. Terbanyak selanjutnya adalah usia 25 sampai dengan 29 tahun yaitu sebanyak 16,6 tahun yang dilanjutkan usia 40 sampai dengan 44 tahun sebanyak 15,5 tahun. Sebagian besar adalah masih usia produktif karena sebelum menjadi petugas SLRT dipersyaratkan bisa mengoperasikan tablet atau komputer.

Pendidikan petugas sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas layanan SLRT. Tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan kualitas pelayanannya juga tinggi. Pendidikan petugas dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

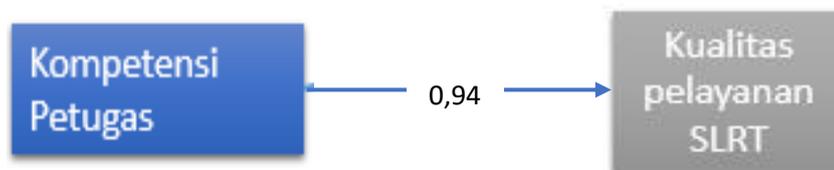


Gambar 7. Ini adalah gambar pendidikan petugas SLRT.

Pendidikan petugas SLRT sebagian besar adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 44.2 persen. Selanjutnya adalah lulusan S1/DIV sebesar 42,1 persen, dan D3 sebanyak 9 persen. Pendidikan petugas banyak yang tinggi karena dipersyaratkan dan apabila ada yang dibawah SMA kemungkinan karena berasal dari relawan. Petugas yang punya pendidikan tinggi akan dapat meningkatkan prestasi kerjanya sehingga standar yang diharapkan organisasi yaitu kualitas layanan SLRT juga tinggi. Sebagai petugas SLRT, dalam kategori relawan yang hanya mendapatkan tali asih dan bukan honor atau gaji. Namun demikian ada beberapa daerah yang menyikapi untuk menambah penghasilan dari program-program yang lain maupun melalui pekerjaan lain diluar SLRT. Berikut adalah pekerjaan lain dari petugas SLRT diluar tugasnya di SLRT.

3.2 Hasil Hubungan Kausalitas Antar Variabel Terhadap Kualitas Pelayanan

Faktor yang mempengaruhi kualitas layanan yang diukur dalam penelitian ini antara lain; pengembangan kapasitas, sistem informasi, kompetensi petugas, koordinasi, dan implementasi kebijakan. Hasil pengukuran kelima variabel tersebut adalah sebagai berikut:



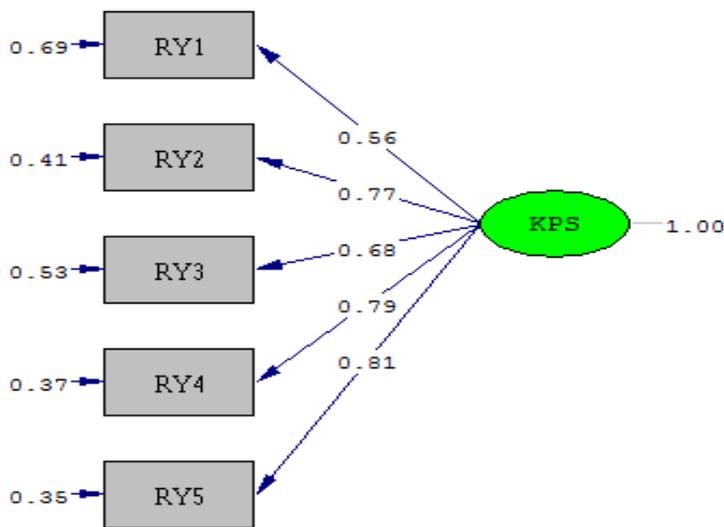
Gambar 8. Ini adalah gambar hubungan kausalitas antar variable dengan kualitas layanan SLRT.

Berdasarkan hasil pengukuran diatas hubungan antara variabel kualitas pelayanan dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima faktor yang berpengaruh terhadap kualitas layanan SLRT adalah hasilnya signifikan. Variabel pengembangan kapasitas mempunyai pengaruh sebesar 0,84 terhadap pelayanan SLRT. Variabel sistem informasi mempunyai pengaruh sebesar 0,53 terhadap kualitas pelayanan SLRT.

Variabel Kompetensi Petugas mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 0,94. Variabel Koordinasi mempunyai pengaruh sebesar 0,84 terhadap kualitas pelayanan SLRT. Variabel Implementasi Kebijakan mempunyai pengaruh sebesar 0,81 terhadap kualitas pelayanan SLRT. Nilai pengaruh tersebut apabila diurutkan menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan SLRT adalah karakteristik pelayanan yang diselenggarakan oleh SLRT yang terungkap dari tangibles, responsiveness, assurance, empathy dan realibility. Ada 5 dimensi yang membentuk Kualitas pelayanan antara lain ; (1) Dimensi tampilan fisik, (2) Dimensi responsif, (3) Dimensi jaminan, (4) Dimensi empati, dan (5) Dimensi keandalan. Hasil pengukuran masing-masing dimensi yang membentuk kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Ini adalah gambar variable yang mempengaruhi kualitas layanan SLRT.

Gambar diatas menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan dibentuk dari 5 dimensi antara lain; Tampilan fisik mempunyai nilai 0,56 dalam membentuk variabel kualitas pelayanan. Responsif mempunyai nilai 0,77 dalam membentuk variabel kualitas pelayanan. Dimensi jaminan mempunyai nilai 0,68 dalam membentuk kualitas pelayanan. Dimensi empati mempunyai nilai 0,79 dalam membentuk kualitas pelayanan. Dan dimensi keandalan mempunyai nilai 0,81 dalam membentuk kualitas pelayanan. Nilai tersebut apabila di buat skala prioritas adalah sebagai berikut;

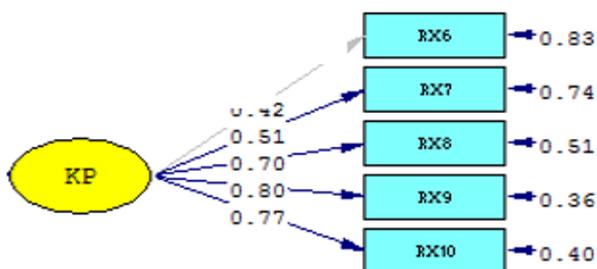
Tabel 1. Skala prioritas yang mempengaruhi kualitas layanan.

NO	Dimensi	Nilai
1.	Keandalan (RY5)	0,81
2.	Empati (RY4)	0,79
3.	Responsif (RY2)	0,77
4.	Jaminan (RY3)	0,68
5.	Tampilan Fisik (RY1)	0,56

3.1.2. Kompetensi Petugas

Kompetensi petugas adalah kepribadian dan kemampuan pelaksana SLRT dalam melaksanakan pekerjaan yang terungkap dari Motives, Traits, Self-concept, Knowledge, dan Skill. Dari definisi konseptual diturunkan menjadi 5 dimensi analisis: (1) Dimensi Motives; (2) Dimensi Traits; (3) Dimensi

Self-concept; (4) Dimensi Knowledge; dan (5) Dimensi Skill. Hasil pengukuran Variabel Kompetensi Petugas adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Ini adalah gambar variable yang mempengaruhi kompetensi petugas.

Gambar diatas menunjukkan bahwa kompetensi petugas dibentuk dari 5 dimensi antara lain; motivasi dengan nilai 0,42 dalam membentuk variabel kompetensi petugas. Dimensi yang kedua adalah sifat yang mempunyai nilai 0,51 dalam membentuk variabel kompetensi petugas. Dimensi yang ketiga adalah konsep diri yang mempunyai nilai 0,70 dalam membentuk variabel kompetensi petugas. Dimensi keempat adalah pengetahuan yang mempunyai nilai 0,80 dalam membentuk variabel kompetensi petugas. Yang kelima adalah dimensi ketrampilan yang mempunyai nilai 0,77 dalam membentuk variabel kompetensi petugas. Hasil pengukuran variabel kompetensi petugas tersebut apabila diurutkan menurut skala prioritas adalah sebagai berikut;

Tabel 3. Skala prioritas yang mempengaruhi kompetensi petugas

NO	Dimensi	Nilai
1.	Ilmu Pengetahuan (RX9)	0,80
2.	Ketrampilan (RX10)	0,77
3.	Konsep Diri (RX8)	0,70
4.	Sifat (RX7)	0,51
5.	Motivasi (RX6)	0,42

Hubungan tersebut apabila dilihat dari hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar petugas (sebanyak 70,7 persen) mengatakan bahwa memahami dengan jelas Pedoman Umum SLRT, sehingga memahami sistem rujukan dalam pelaksanaan SLRT (sebanyak 90,7). Sebagian besar petugas (sebanyak 89,4 persen) mengatakan memahami program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, dan sebagian besar (sebanyak 94,6 persen) mengatakan mudah memahami permasalahan yang dikeluhkan penerima manfaat. Dengan demikian petugas SLRT dapat menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan arahan pimpinan (sebanyak 89,3 persen). Demikian halnya yang dikatakan oleh sebagian besar penerima manfaat (sebanyak 79 persen) bahwa petugas memberikan rujukan yang tepat sesuai kebutuhan penerima manfaat. Dan sebagian besar (sebanyak 85,5 persen) juga mengatakan petugas mampu menyelesaikan keluhan penerima manfaat, dan sebanyak 84,2 persen mengatakan petugas peka dalam melihat permasalahan masyarakat. Hanya Sebagian kecil dari petugas SLRT yang belum memahami Sistem Rujukan Terpadu sehingga pelaksanaan tugasnyapun belum sesuai dengan arahan pimpinan

Terkait dengan keterampilan (skill) petugas SLRT, sebagian besar petugas (sebanyak 86,7 persen) mampu menindak lanjuti permasalahan yang dikeluhkan penerima manfaat. Sebagian besar penerima manfaat (sebanyak 71,1 persen) juga mengatakan bahwa petugas menyelesaikan keluhan penerima manfaat sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kemudian sebagian besar petugas (sebanyak 86,7 persen) juga mengatakan mampu menjangkau penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan. Sebagian besar petugas (sebanyak 92,0 persen) mengatakan mampu membangun jejaring kerja dalam menyelesaikan keluhan penerima manfaat. Kemudian sebagian besar petugas (sebanyak 68,0 persen)

mampu mengoperasionalkan aplikasi SLRT. Sebagian lagi masih belum terampil dalam mengoperasionalkan aplikasi program SLRT, hal ini terkait dengan petugas yang belum mengikuti bimbingan teknis dan perangkat keras yang dimiliki belum sesuai dengan perangkat lunak SLRT.

Kemudian Sikap (*attitude*) petugas yang merupakan pola perilaku petugas dalam melaksanakan tugasnya memberi pelayanan kepada penerima manfaat. Sebagian besar penerima manfaat (sebanyak 89,5 persen) mengatakan petugas selalu siap membantu keluhan penerima manfaat, dan sebagian besar penerima manfaat (sebanyak 92,2 persen) mengatakan petugas tidak memintak imbalan untuk memperlancar urusan penerima manfaat, hanya sebagian kecil merasa ragu apakah petugas selalu siap membantu keluhan masyarakat.

4. Pembahasan

Kompetensi sumberdaya manusia (Shermon, 2004) dilihat dari 3 komponen utama yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) (Manajemen Pengetahuan et al., 2019). Secara umum petugas SLRT sudah memahami tugasnya, baik melalui pedoman umum yang harus dipelajari dan dimengerti oleh petugas, dan program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Merupakan hal penting yang harus dipahami oleh petugas SLRT, bahwa keluhan penerima manfaat yang disampaikan melalui SLRT sesuai dengan tujuan dari SLRT. Karena sebagian petugas sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan memahami program yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat melakukan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan penerima manfaat dengan tepat waktu. Dengan memahami SLRT dari berbagai sumber, sehingga petugas SLRT juga mampu menyelesaikan permasalahan penerima manfaat dan memberikan rujukan yang tepat sesuai kebutuhan. Hal yang sama terungkap dalam FGD dengan instansi terkait, dikatakan bahwa petugas terutama yang sudah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis SLRT tentunya mempunyai pengetahuan dan keterampilan terhadap sistem rujukan, maupun penggunaan teknologi informasi. Peserta FGD juga mengatakan bahwa petugas SLRT umumnya memahami permasalahan sosial. Karena sebagian besar mereka adalah pilar-pilar kesejahteraan sosial atau pegawai Dinas Sosial yang tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) maupun potensi dan sumber kesehatan sosial (PSKS). Jadi pengetahuan yang diperoleh bukan saja dari Pedoman Umum SLRT atau bimbingan teknis tetapi juga telah dimiliki sebelum menjadi petugas SLRT, karena sebelumnya sudah merupakan pilar masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial.

Namun demikian sebagian kecil petugas masih ada keraguan terhadap pemahamannya tentang Pedoman Umum SLRT, dan sebagian kecil juga belum memahami sistem rujukan dalam pelaksanaan SLRT, demikian juga dengan pemahaman tentang program pemerintah dan permasalahan penerima manfaat. Hal ini dapat dipahami karena sebagian petugas yang merupakan sebagai pengganti petugas yang terdahulu belum mengikuti bimbingan teknis, sehingga hal-hal teknis maupun teori yang terkait dengan pelayanan terhadap penerima manfaat di SLRT, belum sepenuhnya dapat dipahami oleh petugas tersebut. Walaupun dalam jumlah yang kecil, perlu mendapat perhatian agar petugas pengganti ini juga harus mengikuti bimbingan teknis, karena terkait langsung dengan pelayanan terhadap penerima manfaat. Akan menjadi permasalahan baik bagi petugas maupun bagi penerima manfaat jika petugas tidak memahami pelayanan yang harus dilakukan terhadap penerima manfaat.

Petugas SLRT juga memiliki keterampilan (*skill*) untuk memberikan pelayanan kepada penerima manfaat dengan maksimal. Keterampilan petugas yang baik dalam memberikan pelayanan merupakan faktor kapuasan penerima manfaat (Nulhakim et al., 2017). Hal ini ditunjukkan dengan data hasil penelitian yang menunjukkan sebesar 86,7 persen petugas mampu menindaklanjuti permasalahan yang dikeluhkan penerima manfaat dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dan petugas memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk memilih cara mengatasi keluhan, artinya penerima manfaat diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Hasil FGD dengan petugas dikatakan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas tidak dapat memastikan waktu selesainya keluhan masyarakat yang ditangani, karena terkait dengan proses di instansi/OPD lainnya. Petugas hanya bisa memastikan dan menjelaskan bahwa keluhan masyarakat dirujuk ke instansi yang berwenang dan memberikan rentang waktu atau perkiraan waktu selesainya, sehingga penerima manfaat memahami jalur penyelesaian masalahnya dan waktu yang dibutuhkan

dalam penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa petugas mampu menangani permasalahan penerima manfaat dan memberikan informasi yang akurat kepada penerima manfaat.

Kemudian petugas juga melakukan penjangkauan jika ada penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan, akan tetapi tidak mampu menjangkau SLRT karena kondisi fisik yang tidak mendukung, seperti orang dengan lanjut usia, penderita cacat dan lainnya. Hal ini didukung dengan hasil *FGD* bersama penerima manfaat diungkap bahwa, petugas sering datang ke kampung-kampung untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi penerima manfaat. Petugas melayani penerima manfaat untuk menyampaikan keluhannya serta langsung menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa penerima manfaat harus ke SLRT. Hasil *FGD* bersama petugas juga dikatakan bahwa hal tersebut dilakukan khusus bagi penerima manfaat yang diketahui melalui penjangkauan dan penerima manfaat tersebut tidak dapat mengakses SLRT karena kondisi fisik (tua, sakit, disabilitas), sementara bagi penerima manfaat yang masih mampu untuk datang ke SLRT, selalu dihimbau untuk datang ke SLRT agar petugas dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Hasil *FGD* bersama instansi terkait dikatakan bahwa petugas sering turun ke masyarakat untuk mencari tau permasalahan yang ada di masyarakat, dan petugas bukan hanya memberi rujukan atau memberi saran dalam penyelesaian permasalahan penerima manfaat, tetapi juga sering mendampingi masyarakat sampai permasalahan yang dialami penerima masalah selesai, terutama pada permasalahan yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penerima manfaat, petugas SLRT mampu membangun jejaring kerja dengan instansi terkait. Untuk memudahkan dan melancarkan penyelesaian permasalahan penerima manfaat, petugas SLRT membangun jejaring dengan instansi terkait rujukan yang dilakukan.

Data lapangan menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat dikatakan, bahwa petugas selalu siap membantu keluhan penerima manfaat, hanya sebagian kecil penerima pelayanan merasa ragu apakah petugas selalu siap membantu keluhan masyarakat. Hal ini terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian keluhan penerima manfaat terkadang cukup lama, karena penyelesaian keluhan penerima manfaat bukan hanya ada pada SLRT dan pada satu instansi saja, akan tetapi terkait dengan instansi rujukan, hal ini yang perlu diberi penjelasan kepada penerima manfaat, agar tidak terjadi selisih paham antara petugas SLRT dengan penerima manfaat. Dalam *FGD* dengan petugas dikatakan bahwa petugas selalu siap untuk didatangi penerima manfaat dan menyampaikan keluhannya, walaupun tidak di gedung SLRT, masalah tentang kesehatan yang sering dikeluhkan ketika penerima manfaat langsung mendatangi rumah petugas, karena membutuhkan pelayanan yang lebih cepat. Hal seperti ini lebih sering terjadi di Puskesmas dan petugas sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian sebagian kecil lagi merasa ragu dan tidak setuju kalau petugas selalu siap membantu keluhan penerima manfaat. Hasil *FGD* dengan petugas maupun dengan instansi terkait, dikatakan bahwa pada kasus tertentu penanganan permasalahan penerima manfaat tidak bisa langsung memberikan surat rujukan, karena permasalahan yang dihadapi penerima manfaat dapat diselesaikan dengan kerjasama dengan daerah lain, sehingga membutuhkan berbagai administrasi surat menyurat yang disiapkan oleh penerima manfaat, hal ini yang membuat penerima manfaat merasa petugas tidak siap menangani permasalahan penerima manfaat dan merasa terlalu bertele tele, padahal sesungguhnya syarat-syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebagai contoh permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kasus ini pernah ditemukan, karena orang dengan gangguan jiwa tidak bisa langsung ditangani oleh petugas SLRT, karena membutuhkan orang yang ahli dibidang ODGJ, sehingga rujukan yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak setiap daerah memiliki keahlian tersebut atau memiliki rumah sakit khusus atau panti yang menangani ODGJ.

Sebagian besar petugas juga mengatakan bahwa bekerja di SLRT semata-mata untuk pengabdian dan sebagian besar juga mengatakan tidak mengharapkan imbalan. Hal ini di dukung pernyataan Sebagian besar penerima manfaat bahwa petugas tidak meminta imbalan untuk memperlancar urusan penerima manfaat. Sebagian kecil lagi merasa ragu apakah petugas tidak memintak imbalan dalam membantu menyelesaikan masalah penerima manfaat. Mengacu pada kasus di atas dengan pengurusan yang lebih banyak membutuhkan pengurusan dan membutuhkan waktu, sehingga muncul pandangan yang berbeda antara penerima pelayanan yang meragukannya dengan kegiatan pelayanan petugas yang memberi pelayanan dengan iklas tanpa meminta imbalan (THORPE &

PHELPS, 1991). Petugas mengatakan merupakan suatu kebanggaan menyelesaikan permasalahan penerima manfaat dan semua petugas mengatakan penerima manfaat harus dilayani dengan ramah.

Sikap seorang petugas SLRT tidak boleh membedakan dan memandang rendah penerima manfaat (RUSYIDI, 2018). Dalam menyelesaikan masalah, petugas juga tidak pilih kasih dalam menerima keluhan penerima manfaat dan sebagian besar penerima manfaat juga mengatakan petugas SLRT mampu merahasiakan keluhan penerima manfaat. Dalam FGD dengan instansi terkait dikatakan bahwa dalam memberikan pelayanan petugas bersikap sopan, ramah dan dapat menjelaskan dengan baik kepada masyarakat sekiranya ada hal-hal yang tidak dimengerti, dan merupakan suatu keharusan petugas untuk tidak membedakan antar penerima manfaat dan merahasiakan keluhannya. Peserta FGD juga mengatakan bahwa sejauh ini petugas SLRT sudah memberikan layanan yang baik, keluhan-keluhan yang disampaikan langsung direspon dengan cepat.

Dari berbagai penjelasan di atas bahwa petugas memiliki pengetahuan, kemampuan, skill dan memiliki sikap yang membuat penerima manfaat mampu mengakses pelayanan sosial melalui SLRT. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat (Zastrow, 2010) dengan tertanganinya permasalahan yang dihadapi. Pendapat sebagian kecil penerima manfaat maupun pengurus puskesmas yang ragu-ragu maupun tidak setuju mengenai pengetahuan, keterampilan maupun sikap petugas, hal ini dalam jumlah kecil dan hal ini dapat dipahami karena sebagian kecil petugas merupakan petugas pengganti, sehingga belum mengikuti bimbingan teknis, maupun bimbingan lainnya baik dari kementerian Sosial maupun dari Pemerintah daerah setempat. Dan juga pada kasus tertentu penerima manfaat yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat atau segera, sementara fasilitas setempat belum memungkinkan sehingga menyelesaikan permasalahannya harus dengan kerjasama dengan daerah lain yang membutuhkan waktu yang lebih lama, karena membutuhkan persyaratan yang lebih lengkap. Hal ini yang dibangun oleh petugas SLRT yaitu membangun jejaring kerja dengan instansi terkait setempat maupun dengan instansi daerah lain

5. Kesimpulan

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dirasakan sangat membantu bagi masyarakat miskin. SLRT membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Dengan demikian penempatan SLRT di Kabupaten atau Kota, diharapkan sebagai lini terdepan (front line) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. Hasil penelitian di atas dalam menentukan skala prioritas untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan SLRT, diambil variabel yang mempunyai nilai pengaruh tinggi (di atas 0,70). Sehingga dapat ditentukan sebagai berikut; Kompetensi Petugas (0,94): Ilmu Pengetahuan (0,80), Keterampilan (0,77), Konsep Diri (0,70). Pengembangan Kapasitas (0,86) : Infra struktur (0,78). Koordinasi (0,84): Kerjasama (0,90), Komitmen (0,86).

Petugas SLRT memiliki keterampilan (*skill*) yang mampu membantu menyelesaikan masalah penerima manfaat, dan sebagian besar mampu menindak lanjuti permasalahan yang dikeluhkan penerima manfaat sesuai dengan waktu yang dijanjikan, artinya dalam memberikan pelayanan, petugas tidak semata-mata dapat memastikan waktu selesainya keluhan masyarakat yang ditangani, karena terkait dengan proses di instansi/OPD lainnya. Petugas hanya bisa memastikan dan menjelaskan bahwa keluhan masyarakat dirujuk ke instansi yang berwenang dan memberikan rentang waktu atau perkiraan waktu selesainya, sehingga penerima manfaat memahami jalur penyelesaian masalahnya dan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya. Petugas juga memberi kesempatan kepada penerima manfaat untuk memilih cara mengatasi keluhan, artinya penerima manfaat diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu petugas juga menjangkau penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan, petugas berkunjung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi masyarakat, sehingga bisa mengetahui masyarakat yang membutuhkan pelayanan melalui SLRT. Melalui penjangkauan, ada penerima manfaat yang tidak langsung datang ke SLRT karena ketidak mampuannya, seperti lansia, difabel, ODGJ, tetapi petugas yang mendatangi penerima manfaat. Petugas juga mampu membangun jejaring kerja untuk menyelesaikan masalah

penerima manfaat. Sebagian petugas belum terampil mengoperasikan aplikasi program SLRT, hal ini terkait dengan petugas yang belum mengikuti bimbingan teknis dan perangkat keras yang dimiliki belum sesuai dengan perangkat lunak SLRT.

Terkait dengan sikap petugas dalam memberikan pelayanan terhadap penerima manfaat, sebagian petugas selalu siap membantu keluhan penerima manfaat, namun sebagian kecil penerima manfaat merasa ragu apakah petugas selalu siap dalam membantu keluhan masyarakat, hal ini terjadi pada kasus tertentu membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkait dengan instansi lain di luar wilayah tersebut, sehingga membutuhkan berbagai administrasi surat menyurat yang harus disiapkan oleh penerima manfaat maupun petugas, hal ini yang membuat penerima manfaat merasa petugas tidak siap menangani permasalahan penerima manfaat dan merasa terlalu bertele tele, padahal memang syarat-syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan informasi yang kurang dipahami oleh penerima manfaat, sehingga butuh sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat.

Petugas tidak memintak imbalan kepada penerima manfaat untuk memperlancar urusan penerima manfaat. Sebagian kecil lagi merasa ragu apakah petugas tidak memintak imbalan dalam membantu menyelesaikan masalah penerima manfaat. Petugas memberi pelayanan dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Merupakan suatu kebanggaan bagi petugas menyelesaikan permasalahan penerima manfaat dan semua petugas mengatakan penerima manfaat harus dilayani dengan ramah serta tidak pilih kasih dalam menerima keluhan penerima manfaat, petugas SLRT juga mampu merahasiakan keluhan penerima manfaat. Dalam memberikan pelayanan, petugas bersikap sopan, ramah dan dapat menjelaskan dengan baik kepada masyarakat sekiranya ada hal-hal yang tidak dimengerti dan keluhan-keluhan yang disampaikan langsung direspon dengan cepat.

6. Saran

Kualitas Pelayanan dapat dipercepat dengan meningkatkan kompetensi petugas terutama ilmu pengetahuan, ketrampilan dan konsep diri melalui Pendidikan dan pelatihan oleh Balai Diklat Kementerian Sosial sebagai *training center* maupun BPSDM di masing-masing daerah. Pengembangan kapasitas bagi petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis/coaching, study banding dan mengikuti rapat koordinasi, perlu diikuti oleh semua petugas SLRT secara bergantian, sehingga semua petugas mendapat materi yang sama dan semua mampu menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Terutama bagi petugas pengganti yang belum memahami masalah SLRT dan pelayanan yang dilaksanakan. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dilakukan secara berkelompok per wilayah, sehingga jumlah peserta tidak terlalu banyak, dan materi pelatihan/bimbingan teknis dapat diterima dengan baik oleh petugas SLRT sebagai peserta.

Merumuskan standar kompetensi petugas SLRT yang mempertimbangkan beban kerja secara proporsional. Diperlukan sertifikasi kompetensi kepada petugas SLRT. Demi menjaga kinerja dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas SLRT sesuai dengan perkembangan SLRT, maka perlu dilakukan pelatihan/bimbingan teknis secara berkesinambungan dan untuk mendorong kinerja petugas maka perlu meningkatkan insentif sebagai bentuk peningkatan motivasi dari Lembaga pengelola SLRT. Agar tidak terjadi salah persepsi antara pelaksanaan pelayanan terhadap penerima manfaat yang membutuhkan waktu dan perangkat administrasi (surat-surat pelengkap rujukan), maka perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat secara berkala, bisa melalui pertemuan Rw/Rt, kegiatan karang taruna, kegiatan pos yandu dll, sehingga informasi mengenai SLRT dan bagaimana pelayanan itu dilakukan oleh petugas, menjadi jelas di masyarakat.

Ucapan terimakasih: Disampaikan terimakasih kepada pengurus SLRT di Kabupaten/Kota lokasi penelitian dan rekan-rekan enumerator yang telah membantu mendampingi dalam pengumpulan data yang diperlukan. Semua penulis adalah kontributor utama dalam penulisan ini yang berperan mengumpulkan data dengan membagi berdasarkan lokasi dan mendiskusikan hasilnya di semua tahapan penelitian..

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2005). Kemiskinan Multidimensi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(1), 27. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i1.109>
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. International Educational and Professional Publisher.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Gadjah Mada, U., & Sosio Yustisia Yogyakarta, J. (2011). Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/JSP.10921>
- Manajemen Pengetahuan, P., dan Sikap terhadap Kinerja Karyawan, K., Latief, A., Medagri, E., Suharyanto, A., kunci, K., & dan Sikap, K. (2019). Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap terhadap Kinerja Karyawan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 173–182. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.12608>
- Nulhakim, L., Sahar, J., Fitriyani, P., Keperawatan, J., Kaltim, P. K., Ilmu, F., & Ui, K. (2017). Keterampilan Petugas Yang Baik Dalam Memberikan Pelayanan Merupakan Faktor Kapuasan Lansia. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 3(9), 491–500. <https://doi.org/10.35963/HMJ.K.V3I9.28>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018. (2018). *Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)*.
- RUSYIDI, B. (2018). SIKAP PEKERJA SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 74–86. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V8I1.16678>
- Setiawan, H. H. (2014). Pola Pengasuhan Keluarga Dalam Proses Perkembangan Anak . *SOSIO INFORMA*, 19(Kesejahteraan Sosial), 284–300.
- Setiawan, H. H., Sumarno, S., kurniasari, A., Yusuf, H., Murni, R., & Rahman, A. (2021). The Village Integrated Social Services Through the Social Welfare Center in Indonesia. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, 578, 139–143. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210918.027>
- Setiawan, H. H., Sumarno, S., Murni, R., Kurniasari, A., Yusuf, H., & Rahman, A. (2020). *The Influence of Staff Competency of Integrated Service in Handling of Poverty*. 452(Aicosh), 117–122. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200728.026>
- Shermon, G. (2004). *Competency Based HRM A Strategic for Competency Mapping, Assessment and Development Centres*. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence At Work Models For Superior Performance*. John Wiley & Sons, Inc.
- THORPE, K. E., & PHELPS, C. E. (1991). THE SOCIAL ROLE OF NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS: HOSPITAL PROVISION OF CHARITY CARE. *Economic Inquiry*, 29(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1991.tb00840.x>
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human Rights and Correctional Clinical Practice. *Aggression and Violent Behavior*, 12, 628–643.
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Brooks/Cole Cengage Learning.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (2010). *Delivering quality service : balancing customer perceptions and expectations*. The Free Press. <https://www.worldcat.org/title/delivering-quality-service-balancing-customer-perceptions-and-expectations/oclc/1112998100?referer=di&ht=edition>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

